

# PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DESA

Pedesaan merupakan kawasan penyangga pangan perkotaan. Pedesaan memiliki banyak fungsi yang harus dijaga keasliannya, untuk itu banyak studi dan literatur berbicara dengan tema pedesaan. Buku ini memberikan lingkup yang luas mengenai desa, dari pengertian desa, dokumen pembangunan desa hingga aspek tata ruang pedesaan. Pembahasan pedesaan dimulai dengan karakteristik pedesaan dan menunjukkan bagaimana posisi desa pada penataan ruang. Buku ini tidak meninggalkan faktor sosial yang sangat erat dengan pedesaan, sehingga didalamnya berisi tentang bagaimana organisasi, stratifikasi, budaya hingga perubahan-perubahan sosial yang ada pada masyarakat pedesaan. Permasalahan pada kawasan pedesaan dibahas secara terbuka dengan menghadirkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Masyarakat pedesaan pada buku ini juga diarahkan untuk diberdayakan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Kawasan pedesaan pada umumnya kurang diberikan prioritas dalam penataan ruang, namun dalam buku ini penataan ruang pedesaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing desa dibahas tuntas dengan beragam model pengembangan pedesaan. Selain itu, buku ini juga menghadirkan metode-metode dalam mengidentifikasi permasalahan dan menggali potensi yang ada di kawasan pedesaan. Buku ini memberikan deskripsi yang lengkap mengenai keseluruhan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam mengelola kawasan pedesaan. Sehingga buku ini layak untuk dibaca bagi pemangku kepentingan, pemerintah desa, akademisi hingga masyarakat umum. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pedesaan yang ada di Indonesia.

ISBN: 978-623-7598-25-1



9 786237 598251

# PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DESA

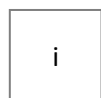
Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si  
 Dr. Agung Witjaksono, ST., MT  
 Rizka Rahma Maulida, ST., MT



# Perencanaan dan Pengembangan Desa

Ardiyanto Maksimilianus Gai  
Agung Witjaksono  
Riska Rahma Maulida

Dream Litera  
2020



# Perencanaan dan Pengembangan Desa

©Dream Litera Buana  
Cetakan pertama, Agustus 2020  
193 halaman, 18,2 x 25,7 cm

**ISBN: 978-623-7598-25-1**

**Penulis:**

Ardiyanto Maksimilianus Gai  
Agung Witjaksono  
Riska Rahma Maulida

Diterbitkan oleh:

**CV. Dream Litera Buana**  
Anggota IKAPI No. 158/JTI/2015

Perum Griya Permata Alam Blok KP 29,  
Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang  
Email: [dream.litera@gmail.com](mailto:dream.litera@gmail.com)  
Website: [www.dreamlitera.com](http://www.dreamlitera.com)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku ini dengan cara apapun,  
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Distributor:  
Dream Litera Buana

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karuniaNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku dengan judul “Perencanaan dan Pengembangan Desa”.

Buku ini dimulai dengan pengertian mengenai desa dengan memberikan detail pada tipologi dan karakteristik desa. Selain itu penulis membahas mengenai perencanaan dalam desa serta sosiologi pedesaan seperti organisasi, stratifikasi dan kultural. Penulis juga memberikan gambaran mengenai profil wilayah pedesaan, peluang dan tantangan serta kebijakan yang dilakukan dalam pengembangan desa. Selain itu, buku ini berisikan tentang pengembangan ekonomi lokal (PEL) serta solusi dari masalah infrastruktur pedesaan. Pada buku ini juga membahas tentang pemberdayaan masyarakat desa, penataan ruang pada pedesaan, sistem perencanaan pembangunan desa hingga pembagasan mengenai metode identifikasi dan penyusunan desain survei. Selain itu penulis memberikan pembahasan khusus mengenai *natural capital* serta ragam model pengembangan desa.

Buku ini disusun secara praktis dan sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dengan harapan, dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam proses pengajaran maupun penelitian. Buku ini masih jauh dari kata sempurna, namun semoga buku ini dapat menjadi tambahan referensi untuk pembangunan dan pengembangan desa-desa di Indonesia.

Februari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
<i>BAB I Latar Belakang serta Permasalahan dalam Perencanaan dan Pengembangan Desa .....</i>	<i>1</i>
<i>BAB II Pengertian Desa</i>	
2.1 Tipologi Desa .....	7
2.2 Karakteristik Desa .....	21
2.2.1 Karakteristik Wilayah .....	21
2.2.2 Karakteristik Masyarakat .....	24
<i>BAB III Dasar-dasar Perencanaan Desa</i>	
3.1 Kedudukan Perencanaan Desa dalam Perencanaan dan Pengembangan Wilayah .....	30
3.2 Proses Perencanaan Desa .....	32
<i>BAB IV Konsep dan Sosiologi Pedesaan</i>	
4.1 Konsepsi Ruang Lingkup Sosiologi Pedesaan .....	36
4.2 Organisasi Sosial Masyarakat Desa .....	37
4.3 Stratifikasi Sosial Masyarakat Desa .....	39
4.4 Aspek Kultural masyarakat desa .....	42
4.5 Dinamika dan Perubahan Sosial Masyarakat Desa .....	47
<i>BAB V Masalah dan Tantangan Perencanaan dan Pengembangan Desa di     Indonesia</i>	
5.1 Profil Wilayah Pedesaan di Indonesia .....	50
5.2 Problematika Wilayah Pedesaan di Indonesia .....	51
5.3 Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Desa di Indonesia .....	56

5.4	Kebijakan Pembangunan Desa di Indonesia .....	64
-----	---	----

*BAB VI Masalah dan Solusi Pengembangan Pedesaan*

6.1	Masalah dan Solusi Pengembangan Ekonomi Lokal Pedesaan.....	67
6.1.1	Kesenjangan Perkotaan dan Pedesaan.....	67
6.1.2	Upaya mengatasi Kesenjangan Perkotaan dan Pedesaan.....	72
6.1.3	Teori, Konsep dan Prinsip Pengembangan Ekonomi Lokal di Pedesaan .....	74
6.1.4	Proses Pengembangan Ekonomi Lokal di Pedesaan.....	78
6.2	Masalah dan Solusi Pengembangan Infrastruktur Pedesaan .....	81
6.2.1	Permasalahan Infrastruktur Desa.....	81
6.2.2	Teori, konsep, dan prinsip pengembangan infrastruktur desa..	82
6.2.3	Infrastruktur sebagai Modal Fisik dalam Pembangunan Desa...	83
6.2.4	Skema pembiayaan pembangunan infrastruktur desa.....	83

*BAB VII Konsep dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*

7.1	Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	87
7.2	Permasalahan-permasalahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	91
7.3	Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	94

*BAB VIII Tata Ruang Pedesaan*

8.1	Tujuan, Kebijakan dan Strategi Tata Ruang Desa .....	104
8.2	Teknik Penyusunan Tata Ruang Desa.....	108
8.3	Pengendalian Tata Ruang Desa .....	110

*BAB IX Rencana Pembangunan Desa*

9.1	Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa.....	113
9.2	Teknik Penyusunan RPJM Desa.....	118
9.3	Teknik Penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.....	121

*BAB X Modal Alam dalam Perencanaan Desa*

10.1	Konsep Natural Capital dalam Pengembangan Desa .....	126
10.2	Permasalahan dan Pengelolaan Natural Capital dalam Perencanaan	

Desa .....	129
 <i>BAB XI Model Pengembangan Desa</i>	
11.1 Model Pengembangan Desa Wisata .....	135
11.2 Model Pengembangan Desa Pesisir .....	136
11.3 Model Pengembangan Desa Agropolitan.....	138
 <i>BAB XII Tata Cara Survei dan Observasi Pedesaan</i>	
12.1 Metode Identifikasi Potensi dan Masalah.....	140
12.2 Penyusunan Desain Survey.....	150
 <i>BAB XIII Penyusunan Dokumen Tata Ruang Desa</i>	
13.1 Aspek yang Diperlukan dalam Tata Ruang Desa.....	155
13.2 Analisis Aspek-aspek Tata Ruang Desa .....	157
<i>BAB XIV Inovasi Smart Village.....</i>	166
Daftar Pustaka	
Daftar Indeks	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Ciri-ciri tingkat perkembangan desa swadaya, desa swakarsa dan desa swasembada.....	19
Tabel 2. 2	Tipologi Desa Berdasarkan Sistem Pengaturan Desa .....	20
Tabel 2. 3	Perbedaan Kualitatif antara Masyarakat Desa dan Kota .....	28
Tabel 4. 1	Perbedaan antara Diferensiasi dan Ketidaksamaan Sosial.....	40
Tabel 5. 1	Perbedaan Dua Pendekatan Pembangunan Pedesaan Lama dan Baru.....	57
Tabel 6. 1	Keterkaitan Utama dalam Pernbangan Spasial .....	73
Tabel 6. 2	Pendekatan Baru Teori Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).....	75
Tabel 6. 3	Perbedaan Utama antara Kebijakan Pembangunan Tradisional dan PEL.....	77
Tabel 6. 4	Sasaran PEL dari beberapa kepustakaan terpilih.....	81
Tabel 11. 1	Isu-Isu Agraria di Desa Pesisir-Pulau-Pulau Besar .....	138
Tabel 12. 1	Perbedaan Antara RRA dan PRA.....	141
Tabel 12. 2	Contoh Ceklist Data Sekunder .....	153
Tabel 12. 3	Contoh Ceklist Data Primer .....	153
Tabel 12. 4	Contoh Desain Survei .....	154
Tabel 13. 1	Indeks untuk Substansi Pembangunan Pedesaan .....	155



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Gradasi Perubahan Penggunaan Lahan Pedesaan ke Perkotaan.....	21
Gambar 9. 1	Alur Perencanaan dan Penganggaran pada Keterkaitan RPJMDesa dengan Perencanaan Daerah .....	116
Gambar 9. 2	Siklus Perencanaan Pembangunan Desa.....	117
Gambar 9. 3	Format Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa ...	124
Gambar 10. 1	Fungsionalitas Sistem Ekologi.....	128
Gambar 14. 1	Skema Strategi Pengembangan Desa Wisata .....	178



## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG SERTA PERMASALAHAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DESA**

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana kearah yang lebih baik. Sedangkan tujuan dari pembangunan adalah untuk dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta memiliki kesejahteraan materiil maupun spiritual yang baik. Pada hakekatnya pembangunan adalah upaya perbaikan secara terencana dari satu situasi kesituasi lainnya yang dianggap lebih baik (Syaukani, 2004).

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok atau kegiatan kolektif yang harus melibatkan banyak orang atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, lebih efisien dan efektif (Affifuddin, 2010).

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman (Helmy, 2004).

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat dipedesaan. Pembangunan desa harus mulai dengan memperbaiki aparat

pelaksana yaitu orang yang merealisasikan rencana dan sanggup serta mampu mewujudkan menjadi manfaat dan kenikmatan bagi orang desa melalui proses yang ajar dan tepat. Pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya melibatkan tiga faktor yaitu manusia dengan beragam perilakunya, faktor dana yang tergantung pada kemampuan keuangan negara, dan faktor alam yang sulit diramal. Oleh karena itu penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan pembangunan mungkin saja dapat terjadi. Dalam hal ini pengawasan perlu dilakukan sehingga penyimpangan secara lebih dini dapat segera diketahui, guna menghindari kerugian yang lebih besar.

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat pondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telpon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang. Sehingga diperlukan pembangunan yang efektif untuk mewujudkan hal tersebut.

Efektifitas pembangunan merupakan suatu ukuran bagi tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika sasaran atau tujuan itu tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif. Sehubungan dengan efektifitas pembangunan tersebut, maka dukungan dan bantuan dari pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti.

Upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mengubah pola pikir serta sikap mental mereka. Melalui upaya terpadu ini, diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupannya serta membantu dan memberdayakan mereka dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai

dengan potensinya masing-masing. Kesulitan untuk memperoleh akses tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa tingkat kesejahteraan atau pendapatan masyarakat miskin tetap rendah. Oleh sebab itu, dalam sebuah program yang akan dalam pelaksanaannya harus lebih mengutamakan swakelola, dalam pengertiannya masyarakat lokal mendapat peluang yang seluas-luasnya untuk mengelola kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Mereka dapat dengan mudah mengakses fasilitas yang dibuat untuk mereka. Selain itu, perencanaan yang dipakai adalah "*bottom-up planning*" atau perencanaan pembangunan yang disusun dari bawah ke atas maka rencana pembangunan meliputi program dan proyek yang benar-benar dibutuhkan dan melibatkan masyarakat lokal dalam rencana pembangunan (Adisasmita, 2006).

Pemahaman dalam pembangunan pedesaan perlu diungkapkan secara sistematis dan menyeluruh. Hal ini bertujuan agar proses dalam pengembangan desa dari perencanaan hingga pembangunan memiliki kesesuaian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada kondisi di lapangan pada umumnya, perencanaan yang dilakukan dengan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sesuai.

Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai teori-teori dalam perencanaan dan pengembangan desa. Pendalaman yang diperlukan antara lain pengertian, prinsip pengembangan, permasalahan yang sering terjadi, bagaimana perencanaan desa dilakukan serta aplikasi teori-teori tersebut dalam pelaksanaan perencanaan dan pengembangan desa di kehidupan nyata.



## BAB II PENGERTIAN DESA

Desa dapat diartikan melalui beberapa aspek, yaitu aspek bahasa, aspek administrasi perundang-undangan, aspek sosial kemasyarakatan, aspek demografi dan aspek geografis.

### A. Aspek Bahasa

Kata 'desa' beradal dari bahasa India *swadesi* yang memiliki arti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leleuhur yang berada pada satu kesatuan hidup dan norma serta memiliki batasan yang jelas (Yulianti, Yayuk dan Mangku, 2003). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah "(1) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota); (3) tempat, tanah daerah".

Berdasarkan pendapat S. Wojowasito dan W. J. S Poerwodarminto (1972) menyebutkan bahwa perdesaan diartikan "seperti desa atau seperti di desa", sedangkan perkotaan diartikan "seperti kota atau seperti di kota". Sehingga sesuai batasan tersebut, maka perdesaan dan perkotaan didasari oleh karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota didasarkan pada suatu wilayah administrasi atau teritori. Pada pengertian ini suatu daerah perdesaan dapat terdiri dari beberapa desa.

Sedangkan menurut pendapat lain, yaitu Tarigan (2003) menyatakan bahwa desa dan perdesaan dihubungkan dengan pengertian *rural dan village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*).

### B. Aspek Administrasi Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisikan materi tentang Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggara Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembanguann Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa serta Pembinaan dan Pengawasan. Undang-undang ini mengatur juga mengenai ketentuan khusus yang diberlakukan untuk Desa Adat sesuai yang diatur dalam Bab XIII.

Dalam peraturan di bawahnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berisi antara lain mengatur tentang Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.

Peraturan untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Perubahan terbaru mengenai perubahan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun



2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yaitu Pasal 81 dan Pasal 100. Selain itu diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 2 pasal, yaitu Pasal 81A dan Pasal 81B. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD atau sumber lain dalam APBDDesa selain dana desa.

### C. Aspek Sosial Kemasyarakatan

Talcot Parsons dalam Muta'ali (2016) memberikan gambaran bahwa masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*gemeinschaft*) yang memiliki ciri tingginya rasa kesetiakawanan, mengutamakan rasa kebersamaan dan kesamaan derajat, hubungan khusus, kebiasaan dan keturunan, partikularisme (khusus), hubungan yang impersonal.

Menurut Roucek & Warren dalam Muta'ali (2016) karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat desa adalah sebagai berikut : (1) kelompok primer memiliki peran yang besar; (2) pembentukan kelompok masyarakat dipengaruhi oleh faktor geografis; (3) sifat hubungan sosial lebih intim dan lebih bertahan lama; (4) memiliki struktur masyarakat yang homogen; (5) rendahnya tingkat mobilitas sosial; (6) keluarga berfungsi sebagai unit ekonomi; (7) memiliki jumlah anak yang cukup besar dalam struktur kependudukan.

### D. Aspek Demografi

Menurut Paul H. Landis dalam Muta'ali (2016) pedesaan adalah daerah dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang. Sedangkan WS. Thompson dalam Muta'ali (2016) menyatakan bahwa desa adalah salah satu tempat yang menampung penduduk.

Terdapat klasifikasi desa berdasarkan jumlah penduduk menurut Kolb dan Brunner. Klasifikasi ini didapat dari penggolongan desa yang ada di Amerika Serikat. Berikut ini penggolongan tersebut:

1. Desa kecil atau *small village* merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk antara 250 hingga 1.000 orang.

2. Desa sedang atau *medium village* merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk antara 1.000 hingga 1.750 orang.
3. Desa besar atau *large village* merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk antara 1.750 hingga 2.000 orang.

#### E. Aspek Geografis

Bintarto (1983) yang memandang desa dari segi geografi mendefinisikan desa sebagai suatu hasil perwujudan dari kegiatan kelompok manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dimana hasil dari kegiatan tersebut adanya perwujudan yang dipengaruhi oleh unsur fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur dan antar hubungan dengan daerah lainnya.

Desa adalah suatu perwujudan geografis, yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisigrafis, sosial, ekonomi, politik dan budaya dan memiliki hubungan timbal-balik dengan daerah lain.

#### 2.1 Tipologi Desa

Penyusunan tipologi wilayah didasarkan pada asumsi bahwa setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada desa yang memiliki karakteristik yang sama, dimasukkan dalam kelompok tipologi yang sama. Masing-masing tipologi desa memiliki beragam potensi dan permasalahan yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan keragaman indikator fisik dan non-fisik dalam menentukan penggolongan desa, serta mempertimbangkan perbedaaan karakteristik, sehingga pengelompokan desa-desa di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan didasarkan pada lingkungan fisik yang sama, sosial budaya masyarakat, posisi geografis desa terhadap kota, kondisi spasial, administrasi atau tingkat perkembangan desa.

##### 1) Tipologi desa berdasarkan aspek Lingkungan Fisik

Tipologi lingkungan fisik berkaitan dengan kandungan potensi sumber daya alam, khususnya pada aspek biotik (flora fauna) dan abiotik (tanah dan air) yang pada akhirnya menentukan potensi sumber daya alam dan tingkat

produktivitas desa. Tipologi desa dan kelurahan berdasarkan lingkungan fisik wilayah antara lain :

a. Tipologi desa pegunungan

Kelompok desa ini berada pada daerah dengan kelerengan  $>40\%$  dan pada ketinggian  $>5000$  meter di atas permukaan laut. Apabila berada pada daerah aliran sungai, kelompok desa ini berada di kawasan hulu dan masuk dalam kawasan konservasi dan daerah tangkapan hujan (*catchment area*). Kawasan ini pada umumnya ditandai dengan adanya tanaman hutan atau tanaman tahunan. Kelompok desa ini memiliki curah hujan yang tinggi dan sumber daya air yang melimpah, sehingga memiliki potensi sumber daya alam misalnya perkebunan atau hortikultura. Beberapa potensi lain adalah penambangan pasir dan batu atau galian tambang lainnya. Pada desa pegunungan pada umumnya berhubungan dengan letak gunung tertentu, baik gunung aktif maupun yang tidak aktif, sehingga memiliki potensi sebagai kawasan rawan bencana gunung meletus. Pada umumnya di desa pegunungan, pola permukiman terpencar karena dibatasi kondisi topografi dan aksesibilitas, sehingga kepadatan penduduk juga rendah.

b. Tipologi desa dan kelurahan perbukitan

Kelompok desa di kawasan perbukitan memiliki morfologi bukit bergelombang dengan kemiringan lereng  $30-40\%$  dan ketinggian antara  $75-500$  meter di atas permukaan laut. Potensi pada desa perbukitan bergantung pada struktur geologi dan pembentukan material dasar. Pada umumnya desa perbukitan memiliki potensi kayu-kayuan dan tanaman tahunan serta perkebunan. Potensi galian pertambangan juga banyak ditemukan, misalnya penggalian tambang golongan C, golongan B atau golongan A. Beberapa lokasi desa di kawasan perbukitan juga menjadi daerah konservasi yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan kawasan resapan air.

c. Tipologi desa dan kelurahan dataran

Tipologi desa dataran tergolong paling luas dan banyak ditinggali penduduk dengan kepadatan yang tinggi. Secara morfologi berada pada wilayah datar dengan ketinggian rendah pada kemiringan kurang dari 15%. Dalam lingkup, desa-desa ini berada di daerah hilir dan selalu berasosiasi dengan keberadaan sungai yang menjadi sumber kehidupan. Potensi air cukup melimpah sehingga daerah dataran banyak digunakan untuk permukiman dan kegiatan lainnya seperti pertanian, industri, perdagangan dan jasa lainnya. Sebagian besar peruntukan kawasan adalah untuk pengembangan kawasan budidaya. Pada desa-desa di daerah dataran sungai banyak ditemukan sawah baik irigasi maupuntadah hujan sehingga menjadi penghasil pangan terbesar. Sebagian besar desa berciri perkotaan atau kelurahan banyak ditemukan pada tipologi ini.

d. Tipologi desa dan kelurahan pesisir/pantai

Desa tipologi pesisir atau pantai merupakan kelanjutan dari sistem morfologi dataran. Tipologi desa pesisir/pantai adalah kelompok desa yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh ekologi laut. Desa tipe pesisir secara geografis dapat berbatasan langsung dengan laut, namun juga bisa tidak berbatasan langsung dengan laut namun secara lingkungan masih dipengaruhi laut (zona pasang surut dan penyangga laut). Secara morfologi, datar dengan kemiringan kurang dari 5%. Posisi geografis yang strategis sebagai pintu masuk ekonomi antar pulau dan antar negara pada zona pesisir ini, juga mengakibatkan tumbuhnya permukiman kota. Ekonomi desa pesisir/pantai yang potensial bergantung pada bagaimana perkembangan wilayahnya. Selain itu potensi desa pesisir juga ditentukan morfologi dan bentuk pantai, seperti pantai berpasir dan berbatu atau morfologi datar dan tebing curam. Desa pesisir dan pantai merupakan kawasan hilir, sehingga rawan bencana banjir.

e. Tipologi desa pulau-pulau kecil

Desa yang berada pada pulau kecil pada umumnya terpencil dan terpisahkan oleh lautan yang luas. Beberapa ciri desa di pulau kecil adalah insular yang tinggi, daerah tangkapan air yang relatif kecil dan mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi. Potensi kegiatan ekonomi pada kawasan ini adalah perikanan, kelautan dan pariwisata. Kendala utama pengembangan pulau-pulau kecil tersebut karena masalah keterisolasian dan biaya-biaya tambahan yang timbul akibat kondisi geografis. Konsekuensinya walaupun pulau-pulau kecil memiliki potensi yang cukup besar, namun sulit berkembang.

2) Tipologi desa berdasarkan Posisi Geografis Terhadap Pusat Pertumbuhan (Kota)

Pada tipologi ini digunakan dasar asumsi bahwa desa yang berada pada pusat pertumbuhan memiliki tingkat perkembangan tertinggi dan kemudian perkembangannya menurun seiring dengan menjauhnya jarak desa tersebut terhadap pusat pertumbuhan (kota). Tipologi desa dan kelurahan berdasarkan posisi geografis terhadap pusat pertumbuhan (kota) terdiri dari:

a. Tipologi desa dan kelurahan di kota (*urban*)

Tipologi ini merupakan kelompok desa atau kelurahan yang berada pada wilayah perkotaan dengan ciri jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi, sebagian besar wilayah berupa areal terbangun (*built-up area*) yang berupa permukiman padat dan juga banyaknya gedung perkantoran dan perdagangan besar serta memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi. Sebagian terbesar (>80%) penduduk bekerja di sektor non-pertanian. Dalam terminologi administratif pemerintahan desa-desa tipe ini lebih banyak disebut dengan kelurahan. Kecuali sektor pertanian, semua sektor ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga memungkinkan memiliki potensi ekonomi dan pendapatan per kapita terbesar.

b. Tipologi desa dan kelurahan di pinggiran kota

Berdasarkan letaknya, kelompok desa-desa ini berada di pinggiran kota baik dalam pengertian batas administrasi maupun batas fungsional. Keberadaan desa-desa memiliki aksesibilitas yang baik terhadap kota dan secara sosial ekonomi dan budaya sangat dipengaruhi oleh desa sebelumnya (kota), dengan kata lain bersifat peralihan antara ciri desa dengan ciri kota. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka desa-desa ini memiliki ciri-ciri jumlah penduduk dan perkembangan permukiman tinggi akibat perluasan kota. Luas *open space* dan lahan pertanian semakin menyusut akibat konversi lahan pertanian untuk kegiatan non-pertanian, kegiatan non-pertanian semakin berkembang sehingga masyarakatnya pun campuran antara petani dan non-petani. Potensi ekonomi desa di pinggiran sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi kota. Berdasarkan karakteristiknya, desa-desa pada tipologi inilah yang sangat potensial untuk terjadinya perubahan dari status desa menjadi status kelurahan.

c. Tipologi desa dan kelurahan di koridor antar kota

Berdasarkan keruangan, desa dan kelurahan yang masuk dalam kategori ini berada pada kawasan disepanjang jalur transportasi darat yang menghubungkan kota (besar) satu dan kota (besar) lainnya. Desa ini termasuk desa yang dilalui secara langsung oleh jalur transportasi maupun desa diluarnya, namun desa tersebut dipengaruhi oleh adanya jalur tersebut. Desa atau kelurahan ini memiliki karakter yang sama dengan desa yang berada di pinggiran kota (dalam hal demografis dan penggunaan lahan), perbedaannya terletak pada apa yang menjadi pemicu perkembangan wilayahnya, yaitu keberadaan akses transportasi jalan yang menjadikan desa ini memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat. Potensi ekonomi yang dikembangkan sangat tergantung kepada potensi lokal dan rencana pengembangan wilayah, seperti kawasan industri perdagangan, pergudangan, kawasan



permukiman dan lain sebagainya. Desa ini dapat menjadi penghubung ekonomi antara kota dan desa.

d. Tipologi desa dan kelurahan di pedesaan

Kelompok desa-desa ini secara geografis jauh dari kota dan pengaruhnya, namun memiliki hubungan atau aksesibilitas yang baik sehingga memungkinkan terjadinya hubungan desa-kota atau *rural-urban linkages* yang lancar dan sangat mempengaruhi perkembangan keduanya. Desa-desa ini menjadi pendukung (*hinterland*) dari keberadaan kota, khususnya dukungan terhadap komoditas pertanian dan mobilitas penduduk. Desa-desa ini memiliki ciri desa pada umumnya yaitu jumlah dan kepadatan penduduk maupun permukiman yang rendah, hubungan sosial yang akrab, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian dan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas.

e. Tipologi desa dan kelurahan terisolasi dari pusat perkembangan

Kelompok desa-desa ini secara geografis berjarak sangat jauh dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik terhadap pusat-pusat pertumbuhan bahkan kadang terisolir, sehingga tidak memungkinkan adanya hubungan intensif dengan kota. Faktor keterisolasian ini seringkali menjadi faktor penyebab keterbelakangan wilayah dan masyarakatnya, diantaranya dari rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan serta pendapatan. Komunitas adat terpencil dan desa tertinggal banyak tinggal di daerah tipe ini. Ciri-ciri masyarakat diantaranya tinggal dalam lingkungan alam yang masih asli dengan budaya utama bercocok tanam berkebun dan berternak, memenuhi kebutuhan secara mandiri, intensitas hubungan dengan wilayah terbatas, tidak tergantung pada wilayah lain khususnya kota, serta intensitas pembangunan dan ketersediaan sarana prasarana dasar sangat terbatas.

### 3) Tipologi desa berdasarkan aspek Spasial

Interaksi faktor-faktor geografis terutama lingkungan fisik dan manusia menghasilkan bentuk-bentuk pemanfaatan ruang yang sangat bervariasi baik dalam hal (empat bermukim maupun tata guna lahan untuk penghidupan (mata pencaharian). Tipologi desa yang dilihat dari kenampakan letak permukiman dan tata guna lahan pedesaan dapat digunakan untuk menganalisis spasial (pola distribusi keruangan) pedesaan, Bintarto (dalam Daldioeni, 1987) menemukan 4 tipe distribusi spasial desa, yaitu : (1) Desa Menyusur Sepanjang Pantai, (2) Desa Terpusat, (3) Desa Linier di dataran rendah, (4) Desa Mengelilingi Fasilitas Tertentu.

Tipologi distribusi keruangan desa menurut Bintarto dalam Dalioeni (1987) terbagi menjadi :

#### 1. Desa di sepanjang pantai

Pada kawasan pantai yang landai, permukiman dapat tumbuh dengan sektor unggulan berupa perikanan, perkebunan kelapa dan juga perdagangan. Desa pantai ini berkembang semakin meluas dengan sambung menyambung dari suatu pantai hingga pantai lainnya. Pusat industri perikanan pada umumnya berada di dekat kawasan permukiman.

#### 2. Desa terpusat

Desa terpusat pada umumnya berada di kawasan pegunungan. Pada umumnya penduduk yang ada di desa ini memiliki pemusatan tempat tinggal dan umumnya berkumpul secara turun temurun. Pemusatan tempat tinggal didasari pada prinsip gotong royong. Pertambahan jumlah penduduk yang terjadi akan mengakibatkan pemekaran desa yang mengarah dari pegunungan ke lembah tanpa ada penataan terencana. Pusat kegiatan penduduk akan disesuaikan dengan pemekaran wilayah yang terjadi.

#### 3. Desa linier di dataran rendah

Permukiman penduduk di dataran rendah pada umumnya berbentuk linear, sejajar dengan jalan raya yang ada di kawasan tersebut. Jalan

dan transportasi menjadi faktor penentu sebaran permukiman yang ada di kawasan tersebut. Misalnya saja, dengan pembangunan *ring road* maka akan ada pembangunan permukiman yang mengikuti. Selain itu, pola linear dapat juga terjadi pada transportasi sungai sehingga terbentuk permukiman di sepanjang sungai.

#### 4. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu

Desa dengan jenis ini pada umumnya berada di dataran rendah. Fasilitas umum yang dimaksudnya pada umumnya mata air, waduk, lapangan terbang dan lainnya. Arah perkembangannya dapat tersebar sesuai dengan jalur transportasi yang menghubungkan dengan fasilitas lainnya. Permukiman ini pada umumnya mudah dilihat di kawasan perkotaan.

Sedangkan Everett M. Rogers dan Rabel J. Burdge (dalam Leibo, 1995) mendasarkan pada pola permukiman mengelompokkan desa kedalam empat tipe distribusi keruangan permukiman desa yaitu : (1) *The Scattered Farmstead Community*, (2) *The Cluster Village*, (3) *The Line Village*.

##### 1. *The Scattered Farmstead Community*

Pola permukiman desa terpencar, yang umumnya mengikuti sawah, ladang, atau sumber penghidupan penduduk. Tipologi biasanya terdapat pada daerah pegunungan klan perbukitan dan daerah terpencil lainnya. Perkembangan desa ditentukan oleh aksesibilitas dan interaksi desa tersebut dengan desa lain atau kota

##### 2. *The Cluster Village*

Tipologi desa menunjukkan pola permukiman yang mengelompok dan dikelilingi oleh sawah atau kebun mereka. Tipe ini banyak ditemukan di daerah dataran dengan pola kehidupan sosial yang homogen, guyub, gotong royong, dan sebagainya. Desa-desanya akan mengalami perkembangan tercepat mengingat terkonsentrasi penduduk dan efisiensi pelayanan.

### 3. *The Line Village*

Tipologi desa yang membentuk pola spasial memanjang mengikuti komponen utama desa, seperti jalan dan sungai, pantai, danau, dan khususnya transportasi baik darat maupun sungai

#### a. Pola linier mengikuti jalan

Pola yang paling umum terjadi di pedesaan baik yang telah maju maupun yang belum maju. Jalan sebagai sarana interaksi menarik banyak penduduk dan permukiman untuk tinggal disekitarnya karena memiliki nilai aksesibilitas tinggi. Desa-desa ini juga termasuk tipe desa koridor transportasi antar kota.

#### b. Pola linier mengikuti sungai

Pola linear juga terkait dengan fungsi sungai tidak hanya sebagai sumber air tetapi juga sarana transportasi. Pola desa memanjang ditepi sungai banyak di jumpai di Sumatera dan Kalimantan.

#### c. Pola linier sepanjang pantai adalah desa-desa yang terletak disepanjang pantai

Bentuk dari spasial desa diatas berhubungan dengan upaya dalam pengembangan dan eksplorasi sumber daya pedesaan yang optimal dan manfaat yang didapatkan bagi penataan ruang. Dengan cara yang bijaksana perkembangan pemukiman dalam arti pemekarannya serta sistem tata ruangnya harus direncanakan secara khusus, sehingga terjamin sistem pemukiman dan penghidupan yang baik. Sehingga, keruangan yang terbentuk dari suatu desa dapat digunakan sebagai penentu atau dasar dalam penataan ruang di kawasan pedesaan.

#### 4) Tipologi desa berdasarkan aspek Potensi Ekonomi

Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia akan menentukan potensi ekonomi pedesaan. Selain itu, potensi ekonomi pedesaan juga dipengaruhi oleh peluang ekonomi dari posisi dan relasi dengan wilayah lainnya. Potensi yang ada pada suatu wilayah bergantung pada kondisi fisik wilayah seperti geolog, iklim, tanah, air dan vegetasi yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari makhluk hidup. Sumber daya alam dimanfaatkan sesuai

dengan manfaat lahan dan struktur mata pencaharian masyarakat. Sehingga, pengelompokan desa berdasarkan potensi ekonomi didasarkan pada kondisi fisik pemanfaatan ruang dan mata pencaharian yang paling dominan. Pembagian tipologi desa berdasarkan potensi pengembangan ekonomi disesuaikan dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, yaitu :

- a) Tipologi desa persawahan, merupakan kelompok desa yang kondisi fisiknya didominasi oleh dataran dengan jumlah air yang mencukupi dan penggunaan lahan didominasi sawah irigasi dengan potensi pertanian tanaman pangan atau tanaman semusim lain. Selain itu, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.
- b) Tipologi desa perladangan, merupakan kelompok desa yang memiliki kondisi fisik berupa daerah dataran hingga perbukitan namun memiliki ketersediaan air yang terbatas. Pemanfaatan lahan didominasi ladang dan pertanian lahan kering serta tanaman tahunan. Penduduk sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Pada kelompok ini juga termasuk kelompok yang biasanya melakukan area perladangan berpindah.
- c) Tipologi desa perkebunan, merupakan kelompok desa yang memiliki kondisi fisik wilayah pada dataran, perbukitan dan pegunungan dengan ketersediaan air beragam dan didominasi penggunaan lahan berupa tanaman perkebunan dan tanaman tahunan. Penduduk sebagian besar bekerja di sektor perkebunan pribadi maupun perkebunan besar milik perusahaan.
- d) Tipologi desa peternakan, merupakan kelompok desa yang berlokasi dimanapun yang kondisi fisiknya sesuai untuk beternak. Pada umumnya desa ditandai dengan dominasi mata pencaharian penduduk adalah peternak. Penduduk pada umumnya beternak dengan ternak besar hingga unggas, selain itu peternakan dapat berupa perseorangan maupun badan usaha.
- e) Tipologi desa nelayan, merupakan kelompok desa yang berada pada kawasan pesisir atau pantai dan didominasi oleh mata pencaharian

nelayan atau petambak. Pada desa ini banyak ditemui pembudidayaan ikan dikawasan pesisir, yang dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan yang memiliki banyak pekerja. Pada desa ini, potensi desa bergantung pada bagaimana kondisi laut pada saat itu.

- f) Tipologi desa hutan atau tepi hutan, merupakan kelompok desa yang secara kondisi geografis berada di dalam atau di tepian hutan. Pada umumnya penduduk bekerja sebagai petani, pekebun, peternak atau pengrajin, yang dipengaruhi oleh hasil hutan. Tipe desa ini dapat ditemui pada komunitas desa adat yang ada di dalam maupun tepi hutan.
- g) Tipologi desa pertambangan/galian, merupakan kelompok desa yang memiliki potensi ekonomi di sektor pertambangan seperti adanya eksistensi deposit tambang berupa bahan galian golongan C, golongan A dan B yang merupakan pertambangan vital dan strategis. Penduduk pada umumnya didominasi bekerja di sektor pertambangan sebagai penambang pada tipe perorangan, kelompok atau pada perusahaan pertambangan.
- h) Tipologi desa kerajinan dan industri kecil, merupakan kelompok desa yang potensi ekonominya bergantung pada industri kecil dan kerajinan sebagai bentuk pengolahan dari potensi lokal setempat. Selain itu penduduk didominasi oleh pengrajin rumah tangga atau pekerja di industri kecil.
- i) Tipologi desa industri sedang dan besar, merupakan kelompok desa yang berkegiatan sebagai ekonomi industri berskala sedang atau besar, dimana kondisi industri berpengaruh pada kehidupan desa sehingga penduduk pada umumnya bekerja sebagai pegawai atau buruh pada industri tersebut.
- j) Tipologi desa pariwisata, merupakan kelompok desa yang memiliki potensi daya tarik wisata alam atau wisata budaya serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung sehingga masyarakat bergantung pada kegiatan wisata tersebut. Desa wisata tidak harus didominasi oleh



penduduk yang bekerja di bidang pariwisata, namun dapat pula bekerja pada bidang yang menjadi daya tarik wisata misalnya petani, pengrajin atau budayawan.

- k) Tipologi desa jasa dan perdagangan, merupakan kelompok desa yang pada umumnya ada di kawasan perkotaan yang potensi kegiatannya berupa jasa dan perdagangan yang bermacam-macam. Jasa dan perdagangan dapat berbentuk usaha formal maupun informal. Banyaknya jumlah penduduk merupakan subjek dan objek kegiatan jasa dan perdagangan, sehingga pada desa ini, meskipun sebagian besar bekerja disektor jasa perdagangan, namun pekerjaan sangat heterogen.

Dalam analisis dan kenyataannya, sangat sulit dijumpai desa yang homogen baik dari segi potensi wilayah maupun mata pencahariannya, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat dijadikan sebagai acuan di dalam menentukan tipologi desa. Oleh karena itu, selain indikator pekerjaan dan potensi wilayah, yang lebih substansial dan penting diperhatikan adalah besar kecilnya pengaruh kegiatan tersebut terhadap dinamika kegiatan sosial ekonomi dan budaya dipengembangan wilayah pedesaan desa tersebut. Biarpun aktivitasnya secara kuantitas kecil, namun jika pengaruhnya sangat besar pada desa tersebut, maka potensi ekonomi tersebut dapat kita gunakan untuk menetapkan tipologi desa.

#### 5) Tipologi desa berdasarkan Tingkat Perkembangan

Tipologi pada desa ini didasarkan pada tingkat perkembangan yang menjadi proses penyusunan kelompok perkembangan desa dengan banyak kriteria. Indikator kriteria-kriteria tersebut digunakan untuk menetapkan tiga tingkatan perkembangan, antara lain indikator mata pencaharian, produksi, adat istiadat kelembagaan, pendidikan, swadaya dan sarana prasarana. Indikator ini dapat digunakan sebagai indeks komposit atau gabungan dan klasifikasi tingkat perkembangan desa swadaya, swakarsa dan swasembada.

**Tabel 2. 1 Ciri Tingkat Perkembangan Desa Swadaya, Desa Swakarsa dan Desa Swasembada**

No	Tingkat Perkembangan Desa	Karakteristik Desa
1	Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 50% penduduk bermatapencarian di sektor primer (berburu, menangkap ikan, dan bercocok tanam secara tradisional).</li> <li>• Produksi desa sangat rendah dibawah 50 juta rupiah per tahun</li> <li>• Adat istiadat masih mengikat kuat</li> <li>• Pendidikan dan ketrampilan rendah, kurang dari 30% lulus sekolah dasar</li> <li>• Prasarana masih sangat krang</li> <li>• Kelembagaan formal maupun informal kurang berfungsi dengan baik</li> <li>• Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu instruksi dari atas</li> </ul>
2	Swakarsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai menerapkan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang</li> <li>• Produksi desa masih pada tingkat sedang yaitu 50 - 100 juta rupiah tiap tahun</li> <li>• Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, ada 5-6 lembaga yang hidup</li> <li>• Ketrampilan masyarakat dan pendudukannya pada dtingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan</li> <li>• Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat</li> <li>• Swadaya masyarakat dan gotong royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.</li> </ul>
3	Swasembada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor jasa dan perdagangan atau lebih dari 55% penduduk bekerja di sektor tertier.</li> <li>• Produksi desa tinggi dengan penghasilan usaha diatas 100 juta rupiah setiap tahun</li> <li>• Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya</li> <li>• Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai fungsinya dan telah ada 7-9 lembaga yang hidup</li> <li>• Ketrampilan masyarakat dan [pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD, sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang lulus</li> </ul>

No	Tingkat Perkembangan Desa	Karakteristik Desa
		perguruantinggi • Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik • Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa

Sumber : Muta'ali, 2016

## 6) Tipologi desa berdasarkan Sistem Pengaturan Desa

Terdapat tiga asas untuk mengatur desa yaitu : (1) asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan); (2) desentralisasi (penyerahan kewenangan); (3) delegasi (tugas pembantuan). Dalam konteks ini desa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu desa adat dan desa non-adat. Desa non-adat dapat dibagi menjadi desa otonom sesuai dengan undang-undang desa dan desa administrasi yang berbentuk kelurahan.

**Tabel 2. 2 Tipologi Desa Berdasarkan Sistem Pengaturan Desa**

Kedudukan dan Tipe	Asas	Gambaran
Desa adat	Rekognisi (pengakuan dan penghormatan), mengakui bentuk, hak dan kewenangan asal usul (otonomi asli).	Desa hanya sebagai kesatuan masyarakat ( <i>self governing community</i> ), otonomi asli atau otonomi bawaan desa tidak menjalankan tugas administrasi dari negara, desa memperoleh bantuan dari negara.
Desa Otonom	Desentralisasi, membentuk desa otonom dan memberikan kewenangan kepada desa otonom sama seperti daerah otonom	Desa sebagai unit pemerintahan lokal yang itinim(Local self goverment) seperti daerah, desa memperoleh ADD dari APBN
Desa Administratif	Delegasi (tugas pembantuan). membentuk desa sebagai unit administratif	Desa sebagai unit administratif atau kepanjangan tangan negara ( local self government). contohnya adalah kelurahan

Sumber : Muta'ali, 2016

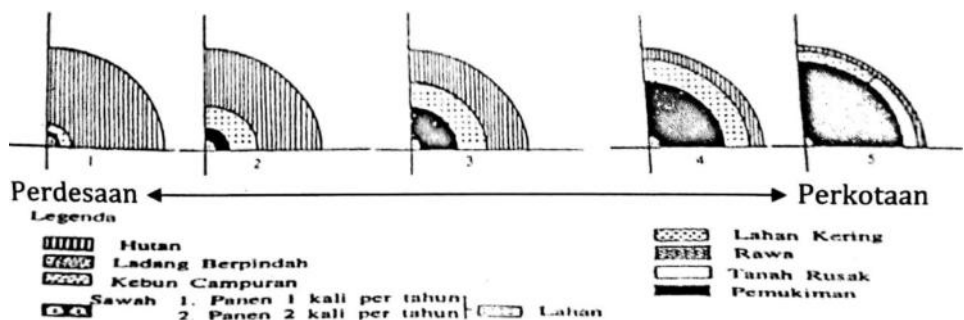
## 2.2 Karakteristik Desa

Karakteristik pada suatu desa merupakan hal yang melekat pada unsur-unsur desa yang menjadi ciri dan menunjukkan kekhas-an atau perbedaan sehingga memiliki aspek yang melekat dan disebut sebagai "desa". Karakteristik desa dapat didasarkan pada tinjauan lingkungan fisik dan tinjauan kehidupan masyarakat.

## 2.2.1 Karakteristik Wilayah

### A. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan sebagai salah satu produk hasil interaksi kegiatan manusia di permukaan bumi menunjukkan variasi yang sangat besar dan dapat digunakan untuk melakukandiferensiasi struktur keruangnya. Bentuk-bentuk penggunaan lahan yang mewarnai daerah terbangun (*built-up area*), *open space*, *green area* dapat digunakan untuk membedakan jenis penggunaan lahan sebagai penentu kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan. Evolusi dan gradasi dari pedesaan ke perkotaan dapat dilihat pada ilustrasi berikut:



Gambar 2. 1 Gradasi Perubahan Penggunaan Lahan Pedesaan ke Perkotaan (Koestoer, 1997. Modifikasi)

Ciri penggunaan lahan yang ada di pedesaan pada umumnya adalah sebagai berikut :

- Terdapat fungsi ruang terbuka (*open space*) yang lebih luas dibandingkan dengan area terbangun (*built up area*)
- Terdapat *green area* yang luas, yang memiliki sifat lindung seperti hutan dan vegetasi lindung lain seperti padang rumput ataupun area pertanian
- Kawasan penggunaan lahan memberikan kemungkinan tumbuhnya aneka ragam flora dan fauna
- Pemanfaatan lahan untuk permukiman dan sarana prasarana memiliki luasan yang lebih rendah dibandingkan dengan ruang terbuka hijau

- Perkembangan jenis penggunaan lahan memiliki heterogenitas lebih rendah dibandingkan kawasan perkotaan

Ciri-ciri tersebut tidak berlaku bagi desa-desa yang berada di wilayah perkotaan atau kelurahan.

#### B. Bangunan dan Perumahan

Bangunan dan permukiman di kawasan pedesaan dapat dilihat dari indikator luas dan ketinggian, kepadatan, jenis bahan bangunan dan peruntukan bangunan. Ciri bangunan dan permukiman di kawasan pedesaan tersebut antara lain :

- Pada setiap kawasan bangunan, nilai *building coverage ratio (BCR)* menunjukkan bahwa kawasan terbangun lebih rendah dibandingkan luas kavling
- Bangunan pada umumnya 1 lantai dengan ketinggian rendah
- Memiliki tingkat kepadatan bangunan dan permukiman yang rendah
- Jenis bahan bangunan yang digunakan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan pada umumnya terbuat dari bahan alam disekitarnya
- Bentuk bangunan pada umumnya terikat dengan nilai budaya masyarakat atau tradisional
- Bangunan diperuntukkan untuk fungsi sederhana seperti permukiman dan fasilitas yang diperlukan banyak orang seperti sarana pendidikan, kesehatan peribadatan dan perkantoran.

#### C. Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah

Sistem pada sarana dan prasarana wilayah yang mencerminkan kawasan pedesaan adalah sistem sarana transportasi, listrik, komunikasi dan sanitasi. Selain itu ada sarana pertanian seperti irigasi atau bangunan air, ada juga sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pada ketersediaan sarana dan prasarana, memiliki kesenjangan cukup jauh antara desa yang berada di kawasan perkotaan dengan desa yang berada di luar kawasan perkotaan. Di Indonesia kesenjangan juga terjadi antara desa-desa di Pulau Jawa-Bali dengan di Luar Pulau Jawa. Pada umumnya, ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ada di desa di luar kawasan

perkotaan memiliki jumlah yang lebih rendah dibandingkan desa yang berada di kawasan perkotaan. Berdasarkan unsur keruangan, penduduk di kawasan pedesaan berpola tersebar, sehingga mengakibatkan tingginya biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana barang dan juga jasa publik.

#### D. Peruntukan Ruang

Berdasarkan ciri sebelumnya, pedesaan memiliki sumberdaya sebagai penyangga kehidupan perekonomian masyarakat yaitu pertanian dan lingkungan hidup. Desa juga berfungsi sebagai penyangga interaksi sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan. Sumber daya alam dan lingkungan hidup seringkali dianggap sebagai halangan dalam pengembangan pertanian, namun dapat pula dikondisikan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan pendekatan lingkungan yang berkelanjutan demi kelestarian alam.

Pada tujuan pengembangan pedesaan, pola penggunaan lahan ruang pada desa diutamakan untuk zona konservasi dan fungsi lindung. Hal ini dapat dilihat pada peruntukan ruang kawasan pedesaan, dimana kecenderungan penggunaan lahan adalah zona konservasi dan fungsi lindung. Beberapa tujuan pemanfaatan ruang kawasan pedesaan adalah :

- Pemanfaatan ruang di kawasan pedesaan diatur untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagai bentuk penanggulangan dampak negatif pada lingkungan buatan dan sosial.
- Fungsi kawasan pedesaan ditingkatkan agar menciptakan keseimbangan dalam perkembangan lingkungan dan cara hidup masyarakat
- Tata ruang pedesaan perlu dicapai untuk menciptakan pengembangan kehidupan manusia yang optimal, serasi, selaras dan seimbang
- Dinamika pembangunan dan kawasan pedesaan perlu didorong agar mencapai kehidupan pedesaan yang berkeadilan dan tetap melestarikan budaya
- Membentuk hubungan fungsional antar kawasan pedesaan

- Mengendalikan peralihan penggunaan lahan secara besar-besaran
- Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan
- Peningkatan manfaat pada sumber daya alam dan sumber daya lainnya
- Menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni
- Menciptakan peningkatan dalam kondisi ekonomi masyarakat pedesaan

### 2.2.2 Karakteristik Masyarakat

Dalam kajian kemasyarakatan, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan (*rural community*) dan masyarakat perkotaan (*urban community*). Soekanto (1994) memberikan pendapat bahwa perbedaan tersebut tidak dapat dihubungkan dengan definisi masyarakat sederhana,. Hal ini dikarenakan, pada masyarakat modern, desa pada populasi terkecil tetap akan mendapatkan pengaruh dari kota. Hal ini juga berlaku sebaliknya pada masyarakat perkotaan akan dapat ditemui karakter pedesaan.

Disebutkan oleh Soemardjan dalam Muta'ali (2016) bahwa karakter pedesaan masih kental ditemukan di masyarakat pedesaan, walaupun saat ini ada pergeseran mengikuti karakter perkotaan. Maksud dari karakter pedesaan adalah gaya hidup masyarakat pada kawasan pedesaan merupakan gaya hidup agraris yang didasarkan pada adat istiadat yang turun temurun dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan yang signifikan. Pada karakter pedesaan dapat ditemukan unsur kekeluargaan, gotong royong dan sikap pada kekuatan alam di sekitarnya. Adat dan agama juga digunakan sebagai sumber motivasi bagi masyarakat yang menjaga dan melestarikan hubungan sosial yang kuat. Internalisasi kedua sumber tersebut yang pada prinsipnya dua hal yang terkait erat, maka masyarakat mempunyai pedoman mengenai perilaku yang diharapkan di dalam setiap situasi di masyarakat pedesaan.

Terdapat banyak pendapat tentang perbedaan masyarakat desa dan kota, namun umumnya untuk membedakannya dapat diukur dengan sejumlah indikator. Pada umumnya masyarakat desa berada dalam kondisi sosial

ekonomi rendah dengan menggantungkan hidup pada wilayah geografisnya seperti pertanian, peternakan, petambak, kerajinan tangan atau pedagang kecil. Komunitas ini pada umumnya memiliki jumlah yang kecil, homogen, bergantung pada tradisi, nilai dan adat istiadat. Selain ciri tersebut, menurut Khairudin, (1992) ada pula ciri lain, yaitu :

- 1) Pekerjaan (*occupation*). Pekerjaan di desa pada umumnya tergantung pada alam dan bersifat homogen. Pekerjaan ini masih memiliki banyak peluang khususnya di bidang usaha tani atau perikanan.
- 2) Ukuran masyarakat (*size of community*). Masyarakat pedesaan pada umumnya relatif kecil, hal ini terkait dengan perlunya keseimbangan antara potensi alam dan penduduknya. Tingginya rasio tanah dan manusia mengakibatkan ada batas tertentu (daya dukung lingkungan) yang harus ditaati sehingga masyarakat masih mampu di dukung dan kondisi cukup.
- 3) Kepadatan penduduk (*density of population*). Kawasan pedesaan memiliki kepadatan penduduk rendah, baik rasio penduduk dengan luas wilayah maupun rasio tempat tinggal dengan luas wilayah. Pada umumnya rumah masih dikelilingi oleh lahan pertanian. Sehingga dengan adanya kepadatan yang rendah ini, akan membentuk kedekatan hubungan sosial dan bentuk interaksi sosial yang menyebabkan orang tidak terisolasi secara psikologis.
- 4) Lingkungan (*environment*). Secara lingkungan fisik, biologis maupun sosial budaya masih berfungsi dengan baik sehingga menciptakan hubungan lingkungan fisik dan sosial budaya yang harmonis
- 5) Diferensiasi sosial rendah. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kelompok sosial dan struktur sosial. Pada masyarakat pedesaan jumlah kelompok sosial tidak sebanyak dan sekompleks masyarakat perkotaan. Pada dasarnya kawasan pedesaan merupakan kawasan yang homogen, dimana penduduk memiliki keseragaman dalam pekerjaan, bahasa, adat istiadat hingga garis keturunan yang sama



atau berdekatan. Pada umumnya masyarakat pedesaan tidak berasal dari komunitas dengan latar belakang yang berbeda.

- 6) Stratifikasi sosial (*social stratification*). Ada empat perbedaan pokok pada struktur sosial pedesaan dan perkotaan, antara lain :
  - Kelas sosial pedesaan berjumlah lebih sedikit dari pada perkotaan, walaupun masyarakat pedesaan pada kenyataannya lebih jauh dari pembagian kelas yang ada
  - Kesenjangan sosial di masyarakat tidak terlalu besar, sedangkan di kawasan perkotaan hal ini merupakan perbedaan yang mencolok
  - Prinsip kasta yang ada di kawasan perkotaan lebih fleksibel dibandingkan di kawasan pedesaan
- 7) Mobilitas sosial masyarakat pedesaan relatif rendah dan stagnan. Smith dalam Muta'ali (2016) melukiskan masyarakat pedesaan seperti "air tenang sedangkan masyarakat perkotaan seperti dalam sebuah ember", "air mendidih dalam ketel". Di pedesaan, anggota-anggotanya lebih kuat berkaitan dengan status sosial mereka, sedangkan perkotaan mereka lebih sering dan lebih mudah berubah satu status ke status lainnya. Faktor homogenitas profesi atau pekerjaan menyebabkan masyarakat desa sulit meningkatkan
- 8) Interaksi sosial diibaratkan hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok manusia, dan antara perorangan dengan kelompok. Interaksi sosial masyarakat desa lebih intens dan intensif dikarenakan kecilnya jumlah dan variasi sosial. Komunikasi masyarakat pedesaan lebih bersifat personal dan langsung (*face to face*) sehingga saling kenal dengan baik.
- 9) Solidaritas sosial sangat kuat pada masyarakat pedesaan, hal ini dikarenakan adanya kesamaan ciri sosial ekonomi budaya bahkan tujuan hidup. Kuatnya solidaritas ini didukung oleh oleh hubungan

yang bersifat informal dan tidak terikat kontrak (*non contractual solidaritas sosial relationships*).

- 10) Masyarakat pedesaan memiliki kontrol sosial yang sangat kuat dengan pranata-pranata sosial berupa norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam kontrol sosial tersebut terdapat sanksi-sanksi sosial yang dikenakan bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut. Kontrol sosial ini semakin kuat dalam masyarakat yang mempunyai hubungan primer, langsung atau *face to face*. Kuatnya kontrol sosial ini didukung oleh stabilitas dan solidaritas yang kuat di kalangan masyarakat desa, besarnya kekuatan kelompok kekerabatan, dan hubungan akrab di dalam komunitas
- 11) Masyarakat desa memiliki tradisi lokal yang kuat, dimana untuk hidup di kawasan pedesaan sering berkaitan dengan tradisi, nilai, norma adat yang telah berkembang secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga masyarakat desa cenderung statis.
- 12) Sebagian masyarakat pedesaan juga meyakini nilai dan kepercayaan yang bersifat mistis sehingga kurang menerima hal-hal yang bersifat rasional dan kurang kritis. Dari keseluruhan penjelasan mengenai karakterisasi desa dan posisi diametral (berlawanan) kota, dapat disusun sebuah tabel tentang perbedaan kualitatif antara masyarakat desa dan kota.

**Tabel 2. 3 Perbedaan Kualitatif antara Masyarakat Desa dan Kota**

No	Unsur-unsur untuk	Desa	Kota
1	Basis Ekonomi	Pertanian	Industri-Perdagangan- jasa
2	Mata pencaharian	Agraris— homogen	Non agraris heterogen
3	Ruang kerja	Lapangan terbuka	Ruang tertutup
4	Musim/Cuaca	Penting dan menentukan	Tidak penting
5	Keahlian/keterampilan	Umum dan tersebar	Ada spesialisasi
6	Rumah dan tempat kerja	Dekat	Berjauhan
7	Kepadatan penduduk	Tidak padat	Padat

<b>No</b>	<b>Unsur-unsur untuk</b>	<b>Desa</b>	<b>Kota</b>
8	Kontak /Interaksi sosial	Frekuensi kecil Personal	Frekuensi besar Impersonal
9	Stratifikasi sosial	Sederhana dan sedikit	Kompleks dan banyak
10	Diferensiasi Sosial	Kecil-Homogen	Kompleks-Heterogen
11	Lembaga-lembaga	Terbatas dan sederhana	Banyak dan kompleks
12	Kontrol sosial	Adat/tradisi	Hukum/peraturan tertulis
13	Sifat kelompok masyarakat	Gotong-royong akrab ( <i>Gemeinschaft</i> )	<i>Gesellschaft</i>
14	Mobilitas Sosial	Rendah	Tinggi
15	Karakter komunitas	Kecil dan Homogen	Besar dan Heterogen
16	Mobilitas Sosial	Rendah	Tinggi
17	Status sosial	Stabil	Tidak stabil
18	Tradisi dan Kepercayaan Lokal Rendah	Percaya Kuat, terkadang irrasional	Rasional

Sumber: Lowrey Nelson (1977)

Berdasarkan tantangan globalisasi dan urbanisasi yang semakin menguat, maka berdasarkan tabel perbandingan di atas pada hakekatnya akan terjadi proses alamiah pergeseran ciri-ciri kualitatif desa menuju ciri kota. Desa akan mengalami proses transformasi demografis, sosial dan kultural menjadi kota yang lebih heterogen dan kompleks.



### **3.1 Kedudukan Perencanaan Desa dalam Perencanaan dan Pengembangan Wilayah**

Adapun pengertian pembangunan yang ada dapat ditarik beberapa pokok, yaitu:

- a. Pembangunan merupakan suatu upaya perbaikan;
- b. Ada rangkaian kegiatan/aktivitas yang dilakukan;
- c. Didasarkan pada suatu rencana;
- d. Bermuara pada satu tujuan.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam konsep perencanaan pembangunan wilayah/daerah sering disamakan oleh perbedaan antara 'wilayah' dan 'daerah'. Akan tetapi perbedaan wilayah dengan daerah akan sangat terlihat pada konteks pembangunan wilayah dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang segala sesuatunya dilaksanakan dan dipersiapkan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dalam hal ini daerah memiliki hak otonomi, sedangkan pembangunan Wilayah merupakan kegiatan pembangunan yang perencanaan, pembiayaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh pusat sedangkan pelaksanaannya bisa melibatkan daerah tempat kegiatan tersebut dilaksanakan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin menunjukkan bahwa desa memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan pemerintahan. Pada pasal 1 ayat 1, desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 'desa', merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Supeno (2011) memberikan pernyataan bahwa pada garis besar perencanaan desa, terdapat pengertian sebagai berikut :

- a. Perencanaan merupakan kegiatan analisis yang diawali dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan
- b. Perencanaan pembangunan lingkungan, dimana program peningkatkan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian diadakens ecara menyeluruh dari tingkat RT/RW, dusun hingga desa
- c. Perencanaan pembangunan didasarkan pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya di sekitar masyarakat
- d. Perencanaan desa merupakan bentuk nyata dari peran serta masyarakat untuk membangun masa depan
- e. Perencanaan digunakan untuk menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dari penggalian gagasan dan keterlibatan masyarakat serta perlu identifikasi dari sumber daya yang ada.

### 3.2 Proses Perencanaan Desa

Proses perencanaan pembangunan wilayah/daerah di Indonesia, secara konseptual sudah diarahkan pada sistem perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*).

Perencanaan adalah suatu proses atau kegiatan dalam rangka menyusun rencana kegiatan. Dengan demikian, rencana adalah segala hal yang belum dilakukan tetapi diharapkan akan dilakukan. Perencanaan partisipatif pada tingkat lapangan secara sederhana adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam suatu bidang dan pihak-pihak merencanakan secara bersama-sama (partisipatif) dan terbuka.

Perencanaan partisipatif dimulai dari peninjauan kebutuhan atau permasalahan dan potensi (melalui kajian keadaan pedesaan partisipatif) sampai dengan penentuan dan perumusan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, proses perencanaan partisipatif terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

- Identifikasi masalah, potensi dan peluang;
- Prioritas masalah, potensi dan peluang;
- Mengtanalisa masalah, potensi dan peluang;
- Menentukan pemecahan terhadap masalah tersebut dan;
- Membuat suatu perencanaan untuk melaksanakan kegiatan pemecahan untuk menghindari masalahnya.

Perlu diingat bahwa perencanaan yang lengkap didasarkan dari beberapa aspek, dan perlu dipikirkan secara sistematis. Salah satu metode untuk mengecek kembali apakah semua aspek telah masuk adalah '5W' dan '1H'. Metode ini meliputi aspek-aspek berikut:

- Why : Mengapa kegiatan direncanakan?
- What : Apa yang direncanakan (secara terinci)?
- Where : Di mana kegiatan ini akan dilaksanakan?
- Who : Siapa akan melakukan?
- When : Kapan dilaksanakan?
- How : Bagaimana caranya?

Seperti yang disebut lebih dahulu, dalam proses pemberdayaan masyarakat, ada beberapa tahap yang tidak dapat dipisahkan dengan alasan proses tersebut berjalan terus-menerus. Demikian pula dengan perencanaan partisipatif sendiri, dimana tahap dalam proses tidak dapat berdiri sendiri. Mulai dari mengidentifikasi masalah, memilih teknik yang akan membantu proses, pemakaian teknik tersebut, memilih teknik yang akan membantu proses, pemakaian teknik tersebut, lalu melakukan monitoring dan evaluasi atas yang telah dilaksanakan, sampai kajian ulang supaya perencanaan tersebut dapat diperbaiki, disesuaikan atau menjadi rencana baru, proses tidak berhenti. Oleh karena itu, proses perencanaan partisipatif adalah bagian pelengkap dari proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses perencanaan partisipatif, ada beberapa teknik dan metode yang dapat membantu prosesnya, walaupun perlu diingat bahwa teknik dan metode tersebut hanyalah suatu alat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memfasilitasi perencanaan partisipatif.

Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Metode ZOPP. Secara harafiah pengertian ZOPP adalah suatu perencanaan (*Planung*) proyek (*Project*) yang berorientasi (*Orientierte*) pada tujuan (*Ziel*). Metode ZOPP merupakan suatu metode perencanaan atau suatu perangkat alat dan prosedur yang terarah pada fungsi perencanaan dalam proses untuk menangani suatu siklus proyek;

Perencanaan merupakan suatu antisipasi dari jadwal kegiatan untuk masa mendatang yang disusun dengan pemanfaatan sumber-sumber yang mengarah pada tercapainya tujuan yang ditetapkan.

Sebagai suatu teknik perencanaan, ZOPP secara khusus berorientasi kepada :

- a. Suatu analisis situasi secara sistematis dimana suatu interval bisa dilakukan, sehingga dengan mudah dimengerti elemen-elemen dalam situasi itu saling terkait. Hal ini dimaksudkan untuk menelusuri secara mendalam sebab-sebab permasalahan.

- b. Suatu indentifikasi dan penilaian secara transparan terhadap pengukuran dan pembatasan intervensi alternatif yang mengarah terhadap seleksi terhadap prilaku intervensi yang diharapkan.
- c. Penjadwalan tentang pengukuran-pengukuran intervensi dan pemanfaatan sumber yang terarah kepada tujuan yang diharapkan.
- d. Suatu perbedaan yang sistematis antara tujuan intervensi yang diperoleh di dalam tanggung jawab tim proyek dan tujuan-tujuan intervensi yang hanya dapat dicapai apabila suatu kondisi yang lain menjadi baik.

Pendekatan ZOPP untuk perencanaan adalah partisipasi yang dalam penerapannya. Para *stakeholder* dapat melakukan *joint* perencanaan, konsultasi pengambilan keputusan dan melakukan kontrol proses perencanaan, konsultasi pengambilan keputusan dan melakukan kontrol proses pelaksanaan. Elemen-elemen yang mendasar daripada ZOPP adalah *teamwork*, *visualisation* dan *facilitation*. Untuk melakukan peningkatan komunikasi dan kerjasama diantara *stakeholder* didalam konteks proyek.

Sebagai suatu metode perencanaan, ZOPP membahas tentang:

- a. Analisis situasi
  - 1) Analisis masalah menunjukkan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan kondisi yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan.
  - 2) Analisa tujuan, menelaah tujuan-tujuan yang mudah dicapai sebagai upaya pemecahan masalah.
  - 3) Analisa alternatif, menetapkan pendekatan proyek yang cocok dengan kondisi dan dapat memberikan hasil yang diinginkan.
  - 4) Analisa peran, menelaah pihak-pihak (lembaga, kelompok, masyarakat, dll) yang terkait dengan proyek yang direncanakan dengan melihat potensi dan kepentingannya.
- b. Rancangan proyek

Matriks Perencanaan Proyek (MPP) membuat rencana proyek dari hasil analisis situasi secara logis.



Hal-hal yang dilakukan dalam penerapan ZOPP adalah sebagai berikut:

(a) Kerja kelompok (*teamwork*), perencanaan harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan proyek yang diusulkan.

.....▶ PARTISIPASI

(b) Peragaan

Setiap tahap dalam perencanaan sebaiknya direkam secara lengkap pada papan atau lembar kertas ukuran besar agar semua pihak dapat mengikuti perkembangan perencanaan dengan baik.

.....▶ TRANSPARANSI (AKUNTABILITAS)

(c) Moderasi (fasilitas)

Agar kerjasama dalam perencanaan bisa berjalan lancar diperlukan bantuan moderator yang tidak terkait dengan proyek.

.....▶ MUFAKAT

Manfaat ZOPP:

- a. Mengefektifkan komunikasi dan kerjasama diantara pihak-pihak yang terkait melalui perencanaan bersama dan dokumentasi semua tahap perencanaan.
- b. Mencapai pengertian yang sama dan menghasilkan konsep yang jelas mengenai keadaan yang ingin diperbaiki oleh proyek.
- c. Merumuskan konsep yang jelas dan realistis mengenai tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- d. Menghasilkan rencana proyek yang merupakan landasan dan pedoman untuk pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Kualitas perencanaan sangat tergantung kepada informasi yang diperoleh dan diberikan oleh masyarakat. Dalam perencanan perlu melibatkan pihak-pihak terkait dengan proyek yang direncanakan.



## **BAB IV KONSEP DAN SOSIOLOGI PEDESAAN**

### **4.1 Konsepsi Ruang Lingkup Sosiologi Pedesaan**

Priyotantomo (2001) mendeskripsikan bahwa sosiologi pedesaan merupakan suatu studi yang melukiskan hubungan manusia di dalam dan antar kelompok yang ada di lingkungan pedesaan. Pengertian 'pedesaan' mencakup wilayah yang disebut '*rural*' dibedakan dengan '*urban*'. Secara lengkap pedesaan diartikan sebagai kawasan tempat tinggal dan kerja yang secara jelas dapat dipisahkan dari kawasan yang lain yang disebut 'kota'. Masyarakat pedesaan sering disebut sebagai '*rural community*' sedang masyarakat perkotaan disebut sebagai '*urban community*'. Perbedaan tersebut didasari oleh perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Soekanto dalam Yulianti, Yayuk dan Purnomo (2003) menyatakan bahwa perbedaan masyarakat pedesaan dan perkotaan dapat dilihat antara lain dari kehidupan kegamaan, individualisme, pembagian kerja, macam pekerjaan, jalan pikiran, jalan kehidupan, serta perubahan-perubahan sosial lainnya.

Sosiologi pedesaan adalah sosiologi yang melukiskan dan mencakup hubungan manusia didalamnya dan antara kelompok – kelompok yang ada di lingkungan pedesaan. Maksud untuk mempelajari sosiologi pedesaan adalah untuk mengumpulkan keterangan mengenai masyarakat pedesaan dan hubungan-hubungannya yang melukiskan setelitinya tingkah laku, sikap, perasaan, motif, dan kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan pedesaan itu. Hasil dari penelitian sosiologi pedesaan tadi dapat di pergunakan untuk usaha-usaha perbaikan penghidupan dan kehidupan manusia pedesaan.

## 4.2 Organisasi Sosial Masyarakat Desa

Lembaga sosial pedesaan pada dasarnya adalah terdiri dari kumpulan norma-norma dan nilai-nilai bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan tujuannya dapat dicapai.

Dalam kaitannya dengan struktural dan kultural organisasi sosial yang terbentuk di pedesaan, maka status menjadi sebuah refleksi dari struktur sosial dan peran menjadi refleksi dari kultur yang berlaku dalam masyarakat, oleh karena demikian lembaga sosial sengaja dibentuk dengan pada aspek strukturalnya tetapi peranan dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan merupakan perwujudan dari aspek kulturalnya dimana di kedepankannya aspek gotong royong dan kebersamaan dalam struktural organisasi tersebut. Misalnya kultur yang sangat kental yang di perhatikan oleh organisasi sosial pedesaan seperti kelompok tani yang sengaja di bentuk sebagai sebuah struktur untuk mempermudah kegiatan pertanian masyarakat pedesaan. Aspek yang sangat kental yang biasa kita lihat bagaimana kemudian adanya suatu kerja sama dalam bidang irigasi, disini masyarakat desa sangat menegedepankan budaya kebersamaan dan bergotong royong agar kemudian pola irigasi pertanian bisa teratur dan lancar.

### a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Dari aspek strukturalnya LKMD sengaja di bentuk oleh pemerintah desa untuk mempermudah dan membantu pemerintah desa dalam menjalankan sistem pemerintahannya, tetapi dalam aspek kulturalnya LKMD di bentuk sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa (*bottom up*).

Selain berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa, LKMD juga memiliki fungsi, antara lain sebagai wadah kegiatan pembangunan di desa, wadah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan masyarakat desa.

### b. Badan Perwakilan Desa (BPD)

BPD ada setelah UU No. 22 tahun 1999 disahkan. Dan fungsinya selain untuk legislatif menggantikan LMD juga untuk mengartikulasikan

kepentingan-kepentingan masyarakat. Keanggotaan BPD berdasar pada pemilihan warga desa, dan lembaga ini berdiri independen untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan BPD sebenarnya untuk mencapai masyarakat desa yang demokratis.

c. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK adalah salah satu lembaga baru yang muncul pada tahun 1984 di bawah LKMD yang berperan meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera dalam kehidupan masyarakat. PKK sendiri berarti gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan keluarga, ada 10 program pokok PKK, yaitu, penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, mengembangkan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup; dan perencanaan sehat.

d. Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)

UDKP adalah upaya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di pedesaan dengan pendekatan terpadu dari sejak perencanaan sampai pada evaluasi pembangunan desa.

e. Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD)

BUUD pada awalnya adalah kumpulan dari beberapa koperasi pertanian yang terdapat pada suatu desa. Setelah terjadi perkembangan yang menyebabkan mobilitas karena majunya teknologi transportasi dan komunikasi, pedesaan menjadi semakin transparan dan fungsi dalam sector agraris sebagai pusat kegiatan ekonomi menjadi kurang efektif karena batas-batas semakin abstrak. Maka dikembangkan UDKP dalam lingkup kecamatan, dan KUD menggantikan fungsi BUUD.

f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Keberadaan LSM berperan dalam membentuk semangat pembangunan yang tidak tergantung pada pemerintah. LSM muncul pada tahun 1970-an ketika pembangunan di Indonesia sangat teknokratis dengan birokrasi yang dominan, pembangunan menerapkan konsep *top-down*, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

LSM di pedesaan dalam bidang pertanian muncul sebagai reaksi dari Revolusi Hijau pada saat itu. Revolusi Hijau (modernisasi pertanian) memang sangat berperan dalam meningkatkan hasil produksi pertanian di pedesaan. Namun, di sisi lain Revolusi Hijau adalah kesenjangan ekonomi yang terjadi di pedesaan. Hasil produksi pertanian yang melimpah dipandang hanya dinikmati sebagian kecil petani kaya (pemilik modal pertanian), petani kecil menjadi semakin besar jumlahnya yang seolah-olah memang distrukturkan dalam situasi kemiskinan.

#### **4.3 Stratifikasi Sosial Masyarakat Desa**

Stratifikasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status (Susanto, 1993). Definisi yang lebih spesifik mengenai stratifikasi sosial antara lain dikemukakan oleh Sorokin (1959) dalam Soekanto (1990) bahwa pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah adanya kelas tinggi dan kelas rendah. Sedangkan dasar dan inti lapisan masyarakat itu adalah tidak adanya keseimbangan atau ketidaksamaan dalam pembagian hak, kewajiban, tanggung jawab, nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat.

Diferensiasi dan ketidaksamaan sosial mempunyai potensi untuk menimbulkan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Diferensiasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal berdasarkan pada ciri-ciri tertentu. Berbeda dengan ketidaksamaan sosial yang lebih menekankan pada kemampuan untuk mengakses sumberdaya, diferensiasi lebih menekankan pada kedudukan dan peranan.

**Tabel 4. 1 Perbedaan antara Diferensiasi dan Ketidaksamaan Sosial**

<b>Diferensiasi Sosial</b>	<b>Ketidaksamaan Sosial</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelompokan secara horizontal</li><li>• Berdasarkan ciri dan fungsi</li><li>• Distribusi kelompok</li><li>• Kriteria biologis/fisik sosiokultural</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelompokan secara vertikal</li><li>• Berdasarkan posisi, status, kelebihan yang dimiliki, sesuatu yang dihargai.</li><li>• Distribusi hak dan wewenang</li><li>• Stereotipe</li><li>• Kriteria ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan kehormatan.</li></ul>

Stratifikasi sosial dapat terjadi sejalan dengan proses pertumbuhan atau dibentuk secara sengaja dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Seperti apa yang dikemukakan Karl Marx yaitu karena adanya pembagian kerja dalam masyarakat, konflik sosial dan hak kepemilikan.

Menurut Bierstedt (1970) pembagian kerja adalah fungsi dari ukuran masyarakat, sehingga :

- a. Merupakan syarat perlu terbentuknya kelas.
- b. Menghasilkan ragam posisi dan peranan yang membawa pada ketidaksamaan sosial yang berakhir pada stratifikasi sosial.

Konflik sosial di sini dianggap sebagai suatu usaha oleh pelaku-pelaku untuk memperebutkan sesuatu yang dianggap langka dan berharga dalam masyarakat. Pemenangnya adalah yang mendapatkan kekuasaan yang lebih dibanding yang lain, dari sinilah stratifikasi sosial lahir. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan dalam pengaksesan suatu kekuasaan.

Hak kepemilikan adalah lanjutan dari konflik sosial yang terjadi karena kelangkaan pada sumber daya. Maka yang memenangkan konflik sosial akan mendapat akses dan kontrol lebih lebih dan terjadi kelangkaan pada hak kepemilikan terhadap sumber daya tersebut.

Setelah semua akses yang ada mereka dapatkan, maka mereka akan mendapatkan kesempatan hidup (*life change*) dari yang lain. Lalu, mereka akan memiliki gaya hidup (*life style*) yang berbeda dari yang lain serta menunjukannya dalam simbol-simbol sosial tertentu.

Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan. (Calhoun dalam Soekanto, 1990) adalah sebagai berikut :

- 1) Ukuran kekayaan, barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya rumah, kerbau, sawah, dan tanah.
- 2) Ukuran kekuasaan, barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atas. Contoh Pak Kades, Pak Carik, tokoh masyarakat.
- 3) Ukuran kehormatan, orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa.
- 4) Ukuran pengetahuan, pengetahuan sebagai ukuran, dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Barang siapa yang berilmu maka dianggap sebagai orang pintar.

Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat menurut Soekanto (1990) adalah kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).

Kedudukan (*status*) diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, *prestise*-nya, dan hak-hak serta kewajibannya. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu :

- a. *Ascribed-status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Pada umumnya *ascribed status* dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup, misalnya masyarakat feodal (bangsawan, kasta)
- b. *Achieved-status*, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa

saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap orang dapat menjadi hakim asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu *assigned status* yang merupakan kedudukan yang diberikan. *Assigned status* sering memiliki hubungan erat dengan *achieved status*.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

#### **4.4 Aspek Kultural masyarakat desa**

Obyek studi pokok sosiologi adalah masyarakat, dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan.

Definisi kebudayaan menurut ahli :

- 1) Horton dan Hunt mendefinisikan masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan masyarakat itu.
- 2) Ralph Linton, kebudayaan diartikan sebagai *way of life* suatu masyarakat. Meliputi *way of thinking* (cara berpikir, mencipta), *way of feeling* (cara mengekspresikan rasa), *way of doing* (cara berbuat, berkarya).
- 3) Selo Soemardjan dan Soelaeman Sumardi, kebudayaan sebagai semua hasil karya, cipta dan karya masyarakat.

Jadi kebudayaan adalah suatu yang berwujud berupa alat dan berbagai teknologi untuk keperluan hidup manusia, tata nilai dan berbagai aturan tertib sosial untuk menjaga keberlangsungan sistem yang ada baik ekonomi, sistem sosial dan berbagai sisi kehidupan manusia lainnya.

Menurut Koentjaraningrat, unsur-unsur kebudayaan terdiri dari :



1. Sistem kepercayaan
2. Sistem organisasi kemasyarakatan
3. Sistem pengetahuan
4. Bahasa
5. Kesenian
6. Sistem mata pencaharian hidup
7. Sistem teknologi

Mayor Polak menyatakan bahwa aspek kultural masyarakat adalah analog dengan aspek rohani sedangkan aspek strukturalnya adalah analog dengan aspek jasmani suatu makhluk. Aspek kultural masyarakat desa terorientasi pada jangkauan mengenai gambaran-gambaran asli masyarakat desa, yaitu masyarakat pertanian.

Masyarakat petani secara umum sering dipahami sebagai suatu kategori sosial yang seragam dan bersifat umum, artinya sering tidak disadari adanya diferensiasi atau perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek yang terkandung dalam komunitas petani. Contohnya seperti diferensiasi dalam komunitas petani itu akan terlihat berdasar perbedaan dalam tingkat perkembangan masyarakatnya, jenis tanaman yang mereka tanam, teknologi atau alat-alat yang mereka gunakan, sistem pertanian yang mereka pakai, topografi atau kondisi fisik-geografik lainnya.

Gambaran umum bentuk diferensiasi masyarakat petani terbagi menjadi dua :

- a. Petani bersahaja yang disebut juga petani tradisional golongan *peasant*

Kaum petani yang masih tergantung dan dikuasai alam karena rendahnya tingkat pengetahuan dan teknologi mereka, produksi mereka ditujukan pada suatu usaha untuk menghidupi keluarga.

- b. Petani modern atau *agricultural entrepreneur*

Kaum petani yang menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan modern dan menanam tanaman yang laku dipasaran. Sistem

pengelolaan pertanian mereka dalam bentuk agribisnis, agroindustri dan berusaha mengejar keuntungan.

Konsep tradisional masyarakat desa mengacu pada gambaran tentang cara hidup (*way of Life*) masyarakat desa yang hidupnya masih tergantung pada alam. Paul H. Landis mengemukakan bahwa besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa ditentukan oleh tiga faktor :

1. Sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian
2. Tingkat teknologi mereka
3. Sistem produksi yang diharapkan

Dari faktor di atas, maka terciptanya kebudayaan tradisional apabila masyarakat amat tergantung kepada pertanian, tingkat teknologinya rendah dan produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Ciri-ciri kebudayaan tradisional adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan adaptasi yang kuat terhadap lingkungan alam.

Masyarakat desa (petani) mengembangkan tingkat dan bentuk adaptasi terhadap pelbagai kekhususan lingkungan alam, sehingga dalam kaitan ini dapat dipahami bahwa pola kebudayaan masyarakat desa terikat dan mengikuti karakteristik khas lingkungan (alam).

2. Rendahnya tingkat inovasi masyarakat karena adaptasi pasif terhadap alam.

Tingkat kepastian terhadap elemen alam (jenis tanah, tingkat kelembaban, ketinggian tanah, pola geografis, dll) cukup tinggi sehingga mereka tidak terlalu memerlukan hal-hal yang baru karena teras telah diatur dan ditentukan oleh alam.

3. Faktor alam juga mempengaruhi kepribadian masyarakatnya.

Sebagai akibat dari kedekatannya dengan alam, orang desa umumnya mengembangkan filsafat hidup yang organis. Artinya mereka cenderung memandang segala sesuatu sebagai suatu kesatuan dan tebalnya rasa kekeluargaan.

4. Pola kebiasaan hidup yang lamban.

Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang dipengaruhi oleh irama alam yang tetap dan lamban. Tanaman yang tumbuh secara alami, semenjak tumbuh hingga berbuah selalu melewati proses-proses serta tahapan tertentu yang tetap.

5. Tebalnya kepercayaan terhadap takhayul

Konsepsi takhayul merupakan proyeksi dari ketakutan atau ketundukan mereka terhadap alam disebabkan karena tidak dapat memahami dan menguasai alam secara alam.

6. Sikap yang pasif dan adaptif masyarakat desa terhadap alam juga nampak dalam aspek kebudayaan material mereka yang bersahaja. Kebersahajaan itu nampak misalnya pada arsitektur rumah dan alat-alat pertanian.

7. Rendahnya kesadaran akan waktu

Faktor ini didasari oleh keterikatan mereka terhadap alam yang memiliki irama sendiri yang tidak terikat oleh waktu. Tanaman memiliki proses alami dengan paket waktu tersendiri terlepas dari pengaturan dan campur tangan manusia. Orang tinggal menanti proses yang alami itu. Akibatnya mereka tidak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya waktu.

8. Kecenderungan masyarakat yang serba praktis.

Dalam segala hal mereka tidak terbebani hal-hal yang kompleks, mereka tidak perlu berbicara panjang lebar dan berbasa-basi satu sama lain. Hal ini mendorong tumbuh dan berkembangnya sifat-sifat jujur, terus terang, dan suka bersahabat.

9. Terciptanya standar moral yang kaku dikalangan masyarakat desa.

Moralitas dalam pandangan masyarakat desa adalah sesuatu yang absolut, tidak ada kompromi antara baik dan buruk serta cenderung pada pemahaman *clear-cut definition* (pemahaman hitam putih).

Untuk sebagian, pola kebudayaan dari suatu kelompok masyarakat tidak terlepas (dan bahkan merupakan refleksi) dari cara hidup atau sistem mata

pencaharian masyarakat itu. Untuk sebagian lain, agama atau kepercayaan sering merupakan elemen pokok yang menjadi *cultural focus* pola kebudayaan suatu masyarakat, lebih-lebih untuk masyarakat yang relatif masih bersahaja. Bersumber atau terkait pada agama/kepercayaan ini terciptalah adat-istiadat atau berbagai bentuk tradisi (termasuk sistem kekerabatan) yang mengatur seluruh kehidupan masyarakatnya.

Bagi masyarakat desa yang secara umum pengelompokannya relatif kecil, adat-istiadat atau tradisi adalah identik dengan kebudayaan. Sebab, dalam adat-istiadat atau tradisi tersebut telah terkandung sistem nilai, norma, sistem kepercayaan, sistem ekonomi dan lainnya, yang cukup lengkap menjadi pedoman perilaku kehidupan mereka. Untuk sebagian lainnya lagi, pola kehidupan masyarakat Indonesia umumnya dan desa khususnya, harus dirunut asal-muasal nenek moyang kita yang ternyata berasal dari tempat dan suku bangsa yang berbeda-beda. Dengan sendirinya pula dengan pola kebudayaan yang beragam.

#### **4.5 Dinamika dan Perubahan Sosial Masyarakat Desa**

Aspek perubahan, terutama perubahan khusus yang ada pada masyarakat dianggap penting dalam memahami kehidupan masyarakat desa. Hal tersebut akan membantu memahami dinamika dalam kehidupan masyarakat desa.

##### **a. Urbanisasi dan Perkembangan Masyarakat Desa**

Urbanisasi dapat diartikan sebagai proses menjadi 'kota' dimana memiliki bentuk khusus atau modernisasi. Konsep modernisasi ini diartikan memiliki bentuk khusus dalam konsep urbanisasi. Urbanisasi merupakan proses suatu desa berubah menjadi kota dan juga perpindahan penduduk desa ke kota (*urbanward migration*).

Urbanisasi pada konsep perubahan desa menjadi kota memberikan gambaran adanya proses perubahan suatu wilayah, dimana diawali dari kawasan yang bersifat pedesaan, berkembang menjadi kawasan dengan sifat perkotaan. Secara umum, desa mengalami perubahan dan perkembangan, dimana besar kecilnya perubahan bergantung pada

faktor potensi wilayah tersebut. Perubahan yang terjadi pada umumnya mengarah ke sifat perkotaan,

Perubahan yang ada di kawasan desa merupakan prose perubahan desa menjadi kota. Dimana perubahan tersebut pada umumnya merupakan proses yang biasa terjadi pada semua masyarakat.

#### b. Perubahan Kultural

Perubahan kultural atau budaya merupakan perubahan masyarakat desa yang bersifat tradisional menjadi modern. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan yang bersifat tradisional, seperti ideologi dan pendidikan yang mengalami perubahan kearah modern.

Beberapa hal yang menjadi titik utama dalam pola kebudayaan tradisional dikemukakan oleh Paul H. Landis dan Everett M. Rogers. Dimana keberadaan pola kebudayaan ditentukan oleh tiga faktor, antara lain :

- Se jauh mana ketergantungan masyarakat terhadap alam
- Bagaimana tingkat teknologi
- Bagaimana sistem produksi

Kebudayaan tradisional akan tetap terjaga apabila masyarakat desa memiliki ketergantungan besar terhadap alam, namun memanfaatkan teknologi yang tinggi dan produksi hanya diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila ketergantungan terhadap alam menurun, tingkat penggunaan teknologi tinggi dan hasil produksi diarahkan untuk mencari keuntungan, maka budaya tradisional kehilangan dasar eksistensi. Hal ini akan menunjukkan adanya perubahan budaya atau kultural pada masyarakat. Selain itu, peningkatan teknologi juga menjadi salah satu tolak ukur perubahan kebudayaan di desa. Namun, perubahan-perubahan ini masih memiliki hambatan untuk berkembang menjadi desa modern, hal yang menjadi salah satu penghambat adalah kebutuhan biaya yang tinggi untuk mencapai kehidupan modern. Sedangkan pada gaya hidup tradisional, biaya yang dikeluarkan lebih

mudah. Sehingga, apabila masyarakat desa mendapatkan dan memahami pengetahuan dalam budaya modern, diharapkan pengaruhnya hanya sebatas sikap dan pandangan hidup. Hal ini dikarenakan masyarakat desa tidak memiliki kemampuan dalam menerapkan gagasan hidup modern, karena secara struktural masyarakat desa merupakan masyarakat yang tingkat pemberdayaannya rendah.

c. Perubahan Struktural

Seiring dengan adanya perubahan kebudayaan atau kultural, perubahan struktur masyarakat desa juga berubah menjadi lebih kompleks.

Struktur yang dimaksud merupakan bagian dari komponen yang berhubungan atau bagaimana komponen tersebut disatukan. Struktur merupakan sifat dasar dari seluruh sistem. Identifikasi pada suatu struktur merupakan tugas yang subjektif, hal ini dikarenakan adanya ketergantungan asumsi kriteria pada bagian-bagian tersebut dan hubungan yang terjadi. Sehingga, identifikasi kognitif pada suatu struktur akan mengarah pada tujuan dan pengetahuan yang sudah dimiliki.

d. Perubahan Lembaga dan Kelembagaan

Lembaga merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimana kelembagaan dikaitkan dengan penerapan dari tindakan bersama (*collective action*). Sehingga apabila ada suatu masyarakat yang menginginkan adanya kebutuhan baru dan beragam, maka lembaga yang lama akan otomatis tidak berfungsi.

e. Perubahan dan Pembangunan dalam Bidang Pertanian

Perubahan dan pembangunan pada bidang pertanian akan dipengaruhi oleh perubahan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana unsur tersebut digunakan untuk menunjang sektor pertanian.



## **BAB VI MASALAH DAN TANTANGAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DESA DI INDONESIA**

### **5.1 Profil Wilayah Pedesaan di Indonesia**

Dalam lintasan sejarah, perkembangan desa di Indonesia mengalami proses yang dinamik, mulai jaman kolonial belanda, masa kemerdekaan, orde baru sampai fase reformasi sekarang ini. Dinamika desa tercermin dari perubahan yang terus menerus yang berkaitan dengan elemen desa, seperti prakarsa masyarakat, penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, dansarana dan prasarana pemerintahan. Di samping itu secara sosial ekonomi dan lingkungan desa memiliki hubungan dinamik dengan wilayah lainnya khususnya kota.

Fokus terhadap warga desa menurut Muta'ali (2016) dianggap perlu karena sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya di desa. Meskipun proporsi jumlah penduduk desa makin menurun akibat urbanisasi yang tinggi, namun hingga tahun 2009, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di desa jumlahnya masih cukup besar dibandingkan yang tinggal di kota. Jadi sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pembangunan desa.

Dalam konteks pembangunan, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi habis ke dalam unit wilayah administrasi terkecil yaitu desa dan kelurahan. Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal itu menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal.

Analisis tentang trend perkembangan ciri-ciri kota yang meningkat pada daerah pedesaan berimplikasi makin meningkatnya desa berciri kota yang sering disebut dengan kelurahan.

Muta'ali (2016) menyatakan dari aspek kependudukan, kawasan pedesaan menghadapi masalah persebaran penduduk yang tidak merata. Salah satu yang terkait dengan hal tersebut adalah terkonsentrasinya sebagian besar sumberdaya ekonomi di wilayah Jawa-Bali yang kemudian menyebabkan penduduk juga terkonsentrasi di wilayah ini. Wilayah Jawa-Bali yang luas wilayahnya kurang dari 7 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia, dihuni oleh 59,82 persen penduduk. Tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di pulau Jawa tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan, tetapi juga dipedesaan.

## **5.2 Problematika Wilayah Pedesaan di Indonesia**

Wilayah pedesaan menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal yang menghambat perwujudan tujuan pengembangan wilayah pedesaan yang produktif, berdaya saing dan nyaman. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya (berdasarkan RPJM Indonesia):

- 1) Rendahnya Aset yang dikuasai masyarakat pedesaan, khususnya aset tanah, modal dan sumberdaya. Akses rendah terhadap penguasaan dan pemilikan tanah ini didorong oleh penyusutan areal lahan pertanian (khususnya di Jawa Bali) dan fragmentasi lahan 'pertanian yang terus meningkat dan menyebabkan penguasaan petani terhadap lahan pertanian terus mengecil hingga berada jauh di bawah skala ekonomi yang layak sehingga produktivitas menurun. Problem lain adalah rendahnya akses masyarakat pedesaan ke sumber daya ekonomi khususnya permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Rendahnya penguasaan asset dan lemahnya akses masyarakat pedesaan dalam menjangkau sumberdaya dan modal mengakibatkan tingkat kesejahteraan yang sulit meningkat atau bahkan terus menurun.
- 2) Rendahnya kualitas SDM di pedesaan yang sebagian besar berkecakupan rendah (*low skilled*). Kondisi SDM yang lemah tersebut tidak hanya



berdampak kepada rendahnya produktivitas tetapi juga akan lemahnya sistem kelembagaan dan organisasi sosial masyarakat.

- 3) Terbatasnya pengembangan alternatif lapangan kerja non pertanian. Sebagian besar kegiatan ekonomi di pedesaan masih mengandalkan produksi komoditas primer yang memiliki produktivitas dan nilai tambah yang kecil. Terbatasnya aset dan sumberdaya manusia mengakibatkan sulitnya mengembangkan kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian (diversifikasi), baik industri kecil yang mengolah hasil pertanian maupun industri kerajinan serta jasa penunjang lainnya sangat terbatas. Akibatnya pendapatan sulit meningkat dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap lahan pertanian tetap tinggi yang secara langsung memberikan tekanan penduduk yang semakin tinggi.
- 4) Rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana pedesaan. Ini tercermin dari total area kerusakan jaringan irigasi, rasio elektrifikasi kawasan pedesaan, jumlah desa yang tersambung prasarana telematika, persentase rumah tangga pedesaan yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum perpipaan, persentase rumah tangga pedesaan yang memiliki akses ke prasarana air limbah, meningkatnya fasilitas pendidikan yang rusak, terbatasnya pelayanan kesehatan, dan fasilitas pasar yang masih terbatas di pedesaan khususnya di kawasan timur Indonesia
- 5) Tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di pedesaan. Kondisi geografis Indonesia yang rentan terhadap bahaya bencana alam (seperti seperti gagal panen karena banjir, kekeringan, maupun serangan hama penyakit) dan karakteristik kegiatan pertanian yang sangat bergantung kepada faktor alam menambah resiko ketidakpastian produksi pertanian dan kehidupan petani. Risiko ini masih ditambah lagi dengan fluktuasi harga dan struktur pasar yang tidak berpihak pada petani.
- 6) Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial. Kondisi ini tercermin dari kurangnya keterkaitan antara sektor pertanian (primer) dengan sektor industri (pengolahan) dan jasa

- penunjang, serta keterkaitan pembangunan antara kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan, kota-kota kecil dan menengah yang berfungsi melayani kawasan pedesaan di sekitarnya belum berkembang sebagai pusat pasar komoditas pertanian, pusat produksi, koleksi dan distribusi barang dan jasa, pusat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah non pertanian dan penyedia lapangan kerja alternatif (non pertanian)
- 7) Meningkatnya kesenjangan pembangunan dan perbedaan kesejahteraan masyarakat (*quality of life*) antar desa-kota, baik dikarenakan faktor mekanisme pasar yang lebih berpihak pada perkotaan (*agglomeration forces*) maupun pemihakan -pemerintah yang masih lemah kepada wilayah pedesaan sehingga kesenjangan semakin lebar
  - 8) Meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis bagi peruntukan lain. Di samping terjadinya peningkatan luas lahan kritis akibat erosi dan pencemaran tanah dan air, paling kritis terkait dengan produktivitas sektor pertanian adalah penyusutan lahan sawah. Kondisi ini selain didorong oleh timpangnya nilai land rent pertanian dibanding untuk permukiman dan industri, juga diakibatkan lemahnya penegakan peraturan yang terkait dengan RTRW di tingkat lokal.
  - 9) Rendahnya tingkat ketahanan pangan disebabkan oleh rendahnya tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat pedesaan (rumah tangga petani) dan rendahnya kapasitas masyarakat (petani) dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Penyusutan kepemilikan lahan oleh petani gurem (kepemilikan lahan kurang atau sama dengan 0,5 hektar) semakin meningkat. Di samping terbatasnya penguasaan lahan oleh petani, juga terjadi peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Di samping itu tekanan terhadap ketahanan pangan juga muncul dari kompetisi penggunaan lahan antara tanaman untuk pangan dan untuk energi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi alternatif non-fosil, kompetisi ini diprediksi akan meningkat.

- 10) Meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam dan lingkungan hidup sebenarnya merupakan aset yang sangat berharga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Namun demikian, potensi ini akan berkurang bila praktek-praktek pengelolaan yang dijalankan kurang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 11) Belum adanya tata ruang khusus di kawasan pedesaan, mengakibatkan wilayah pedesaan baik secara fisik maupun sosial ekonomi terus "tergerus" oleh pengaruh negatif perkembangan kawasan perkotaan. Salah satu fungsi kawasan pedesaan adalah fungsi konservasi. Kasus meningkatnya konversi lahan pertanian dan kerusakan lingkungan di daerah hulu (pedesaan) akibat tekanan ekonomi dan kebijakan pemanfaatan ruang yang tidak konsisiten telah menjadi sumber penyebab berbagai macam bencana dan kerusakan lingkungan di daerah hilir yang umumnya adalah kawasan perkotaan. Oleh karena itu diperlukan perangkat kelembagaan khusus yang mengatur pemanfaatan ruang di kawasan pedesaan.

Disamping masalah-masalah tersebut di atas, pembangunan pedesaan menghadapi kendala terkait dengan aspek kelembagaan, diantaranya:

- 1) Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat. Ini tercermin dari kemampuan lembaga dan organisasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk perencanaan kegiatan pembangunan, serta dalam memperkuat posisi tawar masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Di samping itu juga terdapat permasalahan masih terbatasnya akses, kontrol dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di pedesaan. Kelemahan tersebut terlihat dari hasil perencanaan pembangunan desa, lemahnya pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- 2) Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan. Pembangunan pedesaan secara terpadu akan melibatkan

banyak aktor meliputi elemen pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, dan swasta. Di pihak pemerintah sendiri koordinasi semakin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keterpaduan antar sektor tetapi juga karena telah didesentralisasikannya sebagian besar kewenangan kepada pemerintah daerah. Lemahnya koordinasi mengakibatkan tidak efisiennya pemanfaatan sumber daya pembangunan yang terbatas jumlahnya, baik karena tumpang tindihnya kegiatan maupun karena tidak terjalinnnya sinergi antar kegiatan. Hal ini terlihat dari belum semua pemerintah kabupaten menjalankan secara konsisten arah kebijakan dan program pengembangan otonomi desa atau desa mandiri.

- 3) Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan keuangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pedesaan yang telah menjadi urusan atau kewenangannya. Komposisi pembiayaan pembangunan pedesaan masih sangat rendah, termasuk di dalamnya dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang jumlahnya masih sangat jauh dibanding kebutuhan pembangunan rill di masyarakat pedesaan.
- 4) Lemahnya kemandirian desa, dimana sebagian besar desa masih tergantung kepada layanan pemerintah, dan sekitar 40 persen desa yang berpredikat miskin dan tertinggal. Ketidakmandiriam desa bersumber pada beberapa hal misalnya keterbatasan aset dan akses desa terhadap sumberdaya lokal, serta inisiatif dan kapasitas lokal yang lemah, selain itu, lemah nya pelaksanaan UU No, 32/2004 diantaranya tentang kewenangan asal-usul (desa adat atau masyarakat adat) yang membutuhkan pengakuan dari negara.

Problematika yang tersebut di atas diprediksi akan semakin membesar jika tidak diimbangi dengan sistem kelembagaan dan perangkat manajemen pembangunan pedesaan yang tidak komprehensif.

### **5.3 Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Desa di Indonesia**

Saat ini, potensi dan problematika wilayah pedesaan yang semakin besar, dalam pengembangan wilayah juga harus memperhatikan perubahan lingkungan strategis (internal-eksternal) atau peluang dan tantangan yang

terus berubah yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap wilayah pedesaan. Tantangan pertama berkaitan dengan kondisi eksternal seperti perkembangan internasional yang berhubungan dengan liberalisasi arus investasi dan perdagangan global. Sedangkan yang kedua bersifat internal, yaitu yang berkaitan dengan perubahan kondisi makro maupun mikro dalam negeri. Tantangan internal disini dapat meliputi otonomi daerah, transformasi struktur ekonomi, urbanisasi, masalah migrasi spasial dan sektoral, masalah ketersediaan lahan pertanian, tata ruang pedesaan, masalah investasi dan permodalan, SDM, lingkungan dan masih banyak lagi. Selengkapnya beberapa peluang dan tantangan tersebut menurut Muta'ali (2016) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah

Memasuki akhir dekade 2000 Indonesia mengalami perubahan sosial politik yang bermuara kepada pilihan melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai salah satu moda utama pembangunan Indonesia, Pemberlakuan otonomi daerah berpengaruh secara langsung bagi wilayah pedesaan (otonomi desa) dalam kaitannya dengan penataan sistem kelembagaan desa, politik lokal, partisipasi masyarakat, kewenangan desa, aparatur, keuangan dan meningkatnya keinginan pemekaran desa baik dalam pembentukan, penghapusan, penggabungan maupun perubahan status. Otonomi daerah harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan desa yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Otonomi desa haruslah dipahami sebagai kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat. Pemahaman seperti ini, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah, khususnya adanya pembagian kewenangan dan keuangan yang jelas kepada desa, serta kebebasan untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya dan menentukan masa depan pembangunannya menurut prakarsa sendiri.

## 2. Perubahan Paradigma Pembangunan Pedesaan

Perubahan sistem kapitalis dan otoritarian pemerintahan orde baru yang digantikan sistem semangat baru pembangunan (era—reformasi) telah memberi warna baru bagi pendekatan pembangunan pedesaan, dari yang sebelumnya menjadi objek eksplotasi sosial ekonomi dan politik pusat menjadi desa yang dinamis kritis yang ditandai dengan meningkatnya saluran aspirasi politik lokal (desa) dan kesadaran akan hak desa dalam sistem pembangunan nasional sehingga masyarakat desa semakin berdaya. Shepherd (1998) dalam Arya Hadi Dharmawan menyajikan tentang perubahan pendekatan pembangunan pedesaan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5. 1 Perbedaan Dua Pendekatan Pembangunan Pedesaan Lama dan Baru**

<b>Komponen</b>	<b>Pendekatan Lama</b>	<b>Pendekatan baru</b>
Tujuan	Pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir tidak peduli pada hadirnya sindroma ketergantungan	Keadilan sosial kedamaian, kualitas pertumbuhan, peningkatan kualitas lingkungan sebagai tujuan terpenting
Transfer Kesejahteraan	Redistribusi kesejahteraan hanya dilakukan (melalui dan oleh) negara dan pasar seringkali tidak fair	Merangkul semua pihak dilakukan secara partisipatif mengikutsertakan semua pihak
Kekuasaan	Tumbuhnya kekuasaan otoriter dipahami sebagai konsekuensi tak terelakkan (harga) dari prestasi pencapaian pembangunan (target angka pertumbuhan).	Pencapaian kobebasan, otonomi, dan kedaulatan sebagai prinsip penting pembangunan untuk direalisasikan target pertumbuhan ekonomi agak terabaikan.
Mekanisme pembangunan	Subsidi ekonomi disediakan oleh Negara rakyat menjadi sangat tergantung pada kekuatan negara tuntutan berbagai hal terhadap negara menjadi sangat tinggi	Memberdayakan lokalitas untuk pertumbuhan secara mandiri ( <i>self-reliance</i> ) masyarakat lokal berprakarsa dan ikut memecahkan segala persoalan
Teknologi	Transfer teknologi dan pembangunan berlangsung dari kawasan yang maju ke kawasan miskin sangat tinggi	Pengembangan teknologi yang partisipatif dan pengakuan terhadap bottom-up, apresiasi terhadap indigenous knowledge and local Wisdom
Penentuan ekonomi	Pemerintah (negara) sangat menentukan nilai ekonomi suatu sumberdaya	Masyarakat lokal menentukan penilaian dan cara penilaian atas sumberdaya alamnya
Prinsip pembangunan	Prinsip pembangunan yang kompartementalistik terkotak-kotak berdasarkan	Prinsip pembangunan yang holistik dan mempedulikan semua aspek kehidupan, termasuk eksistensi

<b>Komponen</b>	<b>Pendekatan Lama</b>	<b>Pendekatan baru</b>
	bidang yang tersekat-sekat secara ketat egoisme sektoral	komponen alam bukan manusia (non human society)
Peran negara	Peran negara sangat dominan dan kuat; sebagai regulator, producer dan provider	Negara tidak dominan dan lebih banyak berperan memfasilitasi prakarsa mendorong komunitas lokal untuk lebih banyak berinisiatif

Sumber: Shepherd (1998) dalam Arya Hadi Dharmawan (2007)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan pedesaan yang baru sangat dicirikan oleh penghargaan pada eksistensi sumberdaya alam dan lingkungan yang sangat tinggi, kemandirian lokalitas, partisipasi, dan basis kekuatan lokal yang kokoh, demokratisme (kesetaraan dan kesejajaran) dan ekologisme (pembelaan terhadap alam) tampak sangat menonjol. Pendekatan baru tersebut harus disikapi secara arif dan bijaksana supaya dapat memberikan dampak yang positif dan justru tidak menimbulkan konflik dan kontra produktif bagi pembangunan pedesaan.

### 3. Globalisasi dan Liberalisasi

Berbicara desa, bukan desa itu sendiri tetapi bagaimana posisi desa dalam perkembangan lingkungan strategis sekitarnya, baik yang berskala regional, nasional dan global. Penerapan ideologi liberalisasi perdagangan internasional yang disertai liberalisasi dan investasi dalam kerangka WTO, APEC, AFTA ataupun organisasi internasional lainnya membawa pengaruh langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan pedesaan. Produk pertanian dari pedesaan diperkirakan menjadi komoditas yang paling rentan pengaruh negatif liberalisasi ekonomi. Proses pengintegrasian ekonomi suatu negara kedalam ekonomi dunia ini akan memberikan implikasi terhadap seluruh kehidupan negara, tidak terkecuali wilayah pedesaan baik dalam kegiatan ekonomi maupun kehidupan lainnya, seperti sosial, budaya dan politik. Dalam konteks sosial, kultur global juga telah menjangkau masyarakat desa dan menyebabkan instabilisasi dan menggerus nilai-nilai lokal. Globalisasi juga telah menyebabkan sistem interaksi bahkan ketergantungan yang tinggi masyarakat pedesaan terhadap komoditas global. Peluang bagi masyarakat dan komoditas lokal pedesaan untuk memasuki pasar global masih dihadapkan

pada banyak persoalan terkait dengan kesiapan dan daya saing yang masih rendah. Namun demikian prospek dan harapan besar bagi pedesaan masih bisa bertumpu pada keunikan lokal baik lingkungan maupun budaya serta kegiatan kreatif desa yang menjadi daya tarik masyarakat global.

#### 4. Urbanisasi dan Transisi Demografis

Dalam satu dasawarsa terakhir Indonesia mengalami proses transisi demografis yang cepat ditandai dengan jumlah penduduk desa semakin menurun dan penduduk kota meningkat drastis, bahkan sejak tahun 2000 persentase penduduk yang tinggal di perkotaan telah melampaui penduduk pedesaan. Hal ini menunjukkan arus migrasi dari desa ke kota juga meningkat. Urbanisasi (persentase jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan) yang tinggi membawa persoalan yang berat tidak hanya diperkotaan tetapi juga di pedesaan khususnya *brain drain*, sehingga desa tidak hanya kehilangan banyak tenaga potensialnya tetapi juga sekaligus pergerakan modal. Implikasi lainnya adalah meningkatnya ciri-ciri kehidupan sosial ekonomi kota di pedesaan sehingga membawa gejolak sosial dan perubahan *life style* dipedesaan. Perubahan ciri kota juga mendorong proses reklasifikasi desa atau secara administratif terjadi perubahan status dari desa menjadi kelurahan, Secara geografis, desa-desa di pinggiran kota dan koridor antar kota mengalami tekanan lingkungan yang sangat kuat terlihat konversi lahan pertanian dan ruang di perkotaan juga membawa peluang baik bagi berkembangnya wilayah pedesaan dalam bentuk terjalannya de-urbanisasi dan perubahan orientasi masyarakat kota yang menginginkan lingkungan fisik, sosial dan ekonomi yang lebih nyaman dan ramah, sehingga penduduk kota mulai bergerak ke pedesaan dan memilih tinggal di desa. Peluang yang banyak terjadi adalah di bidang permukiman, pariwisata dan industri kecil pedesaan. Namun peluang ini harus di sikapi secara hati-hati dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

#### 5. Integrasi Ekonomi dan Regional

Implikasi perkembangan ekonomi global yang semakin terbuka memungkinkan terjadinya integrasi produksi dan pasar baik yang bersifat



regional (antar wilayah) maupun antar sektor ekonomi. Hal ini memberikan peluang bagi wilayah pedesaan untuk ambil bagian dalam perkembangan perekonomian global dengan aksi lokal (*think global act local*) bisa diwujudkan. Integrasi ekonomi memposisikan daerah pedesaan sebagai bagian *hinterland* bagi kota-kota regional dan nasional yang juga menjadi bagian sistem perekonomian dunia. Potensi lokal pedesaan yang dapat dioptimalkan adalah kegiatan industri kreatif pedesaan dan pariwisata, Proses integrasi wilayah pedesaan ke dalam sistem ekonotni dunia dipastikan juga akan membawa perubahan-perubahan yang tidak selalu menguntungkan, oleh karena itu perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya.

#### 6. Transformasi Ekonomi Pedesaan

Ditandai dengan penurunan peran sektor pertanian (pedesaan) dalam perekonomian dan digantikan dengan industri dan jasa (perkotaan). Namun ironisnya, perubahan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang proporsional, sehingga sektor pertanian masih harus menampung jumlah tenaga kerja pertanian yang sangat banyak, akibatnya produktivitasnya semakin menurun bahkan terjadi involusi pertanian. Tantangan pedesaan adalah bagaimana melakukan proses transformasi mekonomi pedesaan dengan memberikan peluang kegiatan ekonomi non pertanian dan atau mengintegrasikan kegiatan pertanian dengan industri- Dengan kata lain, pada masa mendatang pedesaan tidak selalu identik dengan kegiatan pertanian saja melainkan lebih luas pada kegiatan ekonomi lainnya Proses transformasi ekonomi pedesaan ini membutuhkan persiapan yang memadai, baik dalam aspek kelembagaan dan perundang-undangan, infrastruktur maupun sumberdaya manusia pedesaan yang lebih berkualitas serta sistem keterpaduan. Sudah saatnya desa tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai wilayah pendukung kehidupan daerah perkotaan, namun seharusnya pembangunan wilayah kota atau daerah pedesaan dilakukan dalam satu kesatuan.

## 7. Jaringan Desa-Kota dan Diffusi Industri dari Kota ke Desa

Dinamika urbanisasi dan membaiknya sistem jejaring transportasi regional telah meningkatkan interaksi desa-kota yang semakin intensif. Akibatnya terjadi penetrasi dan diffusi kegiatan ekonomi perkotaan ke pedesaan khususnya transfer inovasi bidang industri dan perdagangan. Selain itu posisi interaksi desa sebagai pusat produksi pertanian dan kota sebagai tempat pemasaran atau sebaliknya kota sebagai pemasok barang industri, jasa dan pusat pelayanan telah menciptakan hubungan ketergantungan yang semakin menguat antara desa dan kota. Dalam konteks ini, strategi agroindustri dapat menjadi pilihan yang tepat untuk memberikan jaminan proses hubungan regional (desa-kota) dan sektoral (pertanian-Industri) yang seimbang dan saling menguntungkan. Integrasi antara konsep agroindustri dan pembangunan desa menjadi penting keterkaitannya dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi, penyediaan dana dan investasi, teknologi, serta dukungan sistem tataniaga dan perdagangan yang efektif bagi produk pedesaan. Dalam pengembangan tata ruang pedesaan, agroindustri didesain dalam tata ruang kawasan agropolitan yang semakin memperkuat integrasi desa-kota.

## 8. Tata Ruang Wilayah Pedesaan

Perkembangan perkotaan dan urbanisasi yang semakin tinggi memberikan tekanan pada wilayah pedesaan, akibatnya semakin meningkatkan laju konversi lahan pertanian dan *green area*. Di pihak lain kawasan pedesaan memiliki fungsi utama sebagai areal pertanian dan penjaga keamanan pangan sekaligus sebagai areal konservasi untuk menjaga kualitas lingkungan secara regional maupun lokal. Penataan ruang kawasan pedesaan menjadi keharusan yang dilakukan baik pada wilayah desa maju maupun desa terbelakang. Pada desa maju diarahkan untuk penataan ruang dan perlindungan areal pertanian, sedangkan pada desa yang belum dimaju diarahkan untuk areal perlindungan (kawasan lindung). Tata Ruang kawasan pedesaan dapat dilakukan dengan sistem agropolitan. Dalam konteks rencana penataan ruang,

kawasan pedesaan menghadapi problem berkaitan dengan adanya aturan dan kelembagaan khusus yang mewajibkan tata ruang desa. Tata ruang agropolitan belum menunjukkan hasil yang nyata di banyak daerah. Selain itu juga masalah sinkronisasi fungsional dengan kawasan perkotaan dan belum serasinya kegiatan pertanian dan non pertanian. Dipihak lain, kawasan pedesaan merupakan bagian integral dari sistem penataan ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten. Oleh karena itu diperlukan pemantapan kegiatan penataan ruang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Selain itu harus didukung oleh kebijakan pertanahan khususnya perlindungan lahan pertanian abadi pedesaan.

#### 9. Potensi Modal Sosial

Salah satu kekuatan dan modal besar yang dimiliki wilayah pedesaan namun tidak mendapatkan perhatian yang serius adalah eksistensi *social capital* (modal sosial). Modal sosial dianggap sangat penting dalam konsep pembangunan kontemporer, karena fungsinya sebagai perekat elemen-elemen masyarakat. Tiga komponen utama yang penting adalah: (1) *trust-kepercayaan* antar komponen anggota masyarakat yang memudahkan proses komunikasi dan pengelolaan suatu persoalan serta mengurangi biaya transaksi; (2) *social networking*—berupa jejaring organisasi kelompok ataupun jejaring individu berbentuk *bond* (ikatan) and *bridge* (pertemanan) untuk mendukung gerak aksi-kolektivitas menjadi makin sinergis; (3) *norms and institutions*—adalah norma-norma dan sistem nilai (biasanya berciri lokal) yang mengawal serta menjaga proses-pembangunan sehingga tidak mengalami penyimpangan. Optimalisasi *social capital/* pedesaan menjadi peluang yang harus terus dilindungi dan diperkuat untuk pengembangan wilayah pedesaan.

#### 10. Pengembangan Ekonomi Lokal Pedesaan

Sebagai bagian dari proses diversifikasi perekonomian pedesaan, selain potensi produksi sektor pertanian, perlu perhatian pada pengembangan ekonomi lokal pedesaan yaitu kegiatan atau usaha berbasis sumberdaya lokal dengan karakter dan pelaku masyarakat pedesaan tetapi memiliki orientasi pasar regional, nasional dan internasional. Usaha skala kecil skala kecil dan

industri kreatif di pedesaan untuk memiliki peluang besar dikembangkan sebagai bagian dari *multiplier effect* pasar regional dan global. Kegiatan ini diharapkan memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat pedesaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 11. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa dan Kerjasama

Tantangan lainnya adalah meningkatkan kerjasama, koordinasi dan keterpaduan kegiatan antar pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dan antar sektor dalam rangka mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi pedesaan yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Pemerintah dan masyarakat desa diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk optimalisasi sumberdaya pedesaan. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan, tantangannya antara lain adalah meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, memperkuat lembaga ekonomi pedesaan dan peran fasilitator dan pembaharuan pembangunan dalam menggerakkan perekonomian di pedesaan, menyediakan dukungan informasi peluang usaha dan pasar yang tepat, layanan permodalan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dan teknologi tepat guna, serta meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

### 5.4 Kebijakan Pembangunan Desa di Indonesia

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup pembangunan di segala bidang, baik fisik material maupun mental spiritual dalam satu kesatuan integritas usaha yang menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, pembangunan pedesaan yang telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, belum memberikan hasil yang memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan.

Pembangunan pedesaan adalah segala daya upaya yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat (dalam arti luas) didalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk mencapai pertumbuhan desa yang adil, merata, sejahtera, mandiri dan berkelanjutan, berdasarkan uraian tersebut terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pembangunan pedesaan menurut Muta'ali (2016), diantaranya:

1. Pertumbuhan (*growth*).

Pembangunan desa harus memberikan keluaran bagi pertambahan jumlah, jenis, besaran jenis, dan magnitud dari kunci pertumbuhan, baik yang bersifat ekonomi, sosial dan fisik. Hal ini dicerminkan oleh kondisi masyarakat mudah mendapat pekerjaan dan berusaha, meningkat pendapatannya, kesehatannya, pendidikannya, wilayahnya makin maju dan sarana prasarana makin baik.

2. Pemerataan (*equity*) dan Keseimbangan.

Pembangunan pedesaan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa secara adil dan secara keruangan terdistribusi secara merata diberbarbagai macam pelosok pedesaan sehingga pada akhirnya akan terhapus keberadaan desa-desa tertinggal. Pembangunan juga harus dilakukan secara seimbang antara wilayah pedesaan (desa) dan perkotaan (kelurahan), termasuk antara sector pertanian yang menjadi basis ekonomi desa dengan sektor non pertanian.

3. Kesejahteraan (*welfare*) dan kemakmuran (*prosperity*).

Dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan desa pada tujuan utama yaitu membentuk masyarakat yang sejahtera lahir dan batin dan situasi kemakmuran "gemah ripah loh jinawi" atau masyarakat adil makmur.

4. Kemandirian.

Semakin kuatnya kapasitas dan daya tumbuh internal (basis sumberdaya), pembangunan desa diarahkan untuk membangun kemandirian dan keswadayaan masyarakatnya serta mengurangi ketergantungan pada pihak-pihak luar termasuk ketergantungan antar wilayah khususnya dengan wilayah perkotaan.

5. Keberlanjutan (*sustainability*).

Tujuan pembangunan desa bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, dimana semua bentuk-bentuk pendayagunaan sumberdaya desa harus memperhatikan daya dukung dan keberlanjutannya untuk generasi dan waktu yang akan datang dalam jumlah dan kualitas yang berimbang. Menghindari tujuan jangka pendek dan kerusakan lingkungan.

6. Partisipatif.

Dimana pembangunan desa harus menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama atau subjek pembangunan. Partisipasi yang besar dari masyarakat desa harus dilakukan dalam seluruh proses pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring evaluasi. Pembangunan harus menghormati hak yang dimiliki masyarakat, menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya serta menjunjung tinggi keterbukaan

Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup, yakni:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi jaringan jalan dan transportasi, pengairan, energi listrik, telekomunikasi, lingkungan permukiman dan lainnya)
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Penguatan asset pedesaan melalui pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM)
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin)

5. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (rural-urban linkages)
6. Penguatan sistem kelembagaan
7. Penataan tata ruang kawasan pedesaan



## **BAB VI MASALAH DAN SOLUSI PENGEMBANGAN PEDESAAN**

### **6.1 Masalah dan Solusi Pengembangan Ekonomi Lokal Pedesaan**

#### **6.1.1 Kesenjangan Perkotaan dan Pedesaan**

Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih merupakan masalah pembangunan yang rumit di negara-negara sedang berkembang. Kerumitannya semakin parah ketika negara maupun pemerintah tidak mampu mengelola dampak ikutannya (*derived impact*). Todaro (1989) menyatakan bahwa migrasi penduduk ke kota di Asia, Afrika, dan Amerika Latin telah mencapai laju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penyebabnya adalah karena terjadinya stagnasi di wilayah pedesaan. Stagnasi, menurut KBBI adalah keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan), atau keadaan tidak maju atau maju, tetapi pada tingkat yang sangat lambat atau keadaan tidak mengalir (mengarus). Sehingga dapat dikatakan pembangunan di wilayah pedesaan berjalan pada tingkat yang sangat lambat, dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Menurut Schutjer (1991), pembangunan pedesaan pada dasarnya lebih dari hanya membangun sektor pertanian. Strategi pembangunan pedesaan menitikberatkan pada upaya untuk membangun sektor pertanian yang lebih sehat. Bukti empiris menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara peningkatan produksi pertanian di daerah pedesaan dengan peningkatan pendapatan masyarakatnya. Selanjutnya Schutjer menyatakan bahwa tujuan utama dari pembangunan di pedesaan adalah: (1) menumbuhkan output dan pendapatan lokal masyarakat, (2) penciptaan lapangan pekerjaan, (3) peningkatan distribusi pendapatan, selain dari peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang dikemukakan oleh



Schutjer ini sepadan dengan sasaran strategi pengembangan ekonomi lokal (PEL).

Hanya membangun sektor pertanian saja (dalam arti *on farm*) di pedesaan akan mengakibatkan kesenjangan yang semakin melebar. Kesenjangan yang melebar disebabkan proses *spread effects* dan *backwash effects* secara bersamaan. *Spread effect* merupakan dampak yang diinginkan dalam suatu hubungan antara pusat kegiatan ekonomi dan wilayah *periphery*, di mana pertumbuhan ekonomi di wilayah pusat menyebar ke wilayah sekitarnya. Sebaliknya, *backwash effect* menghasilkan pertumbuhan yang tidak paralel di *periphery* tetapi lebih rendah dan stagnan

Hal yang sama pernah diingatkan oleh Hirschman (1960) melalui konsep *trickling-down effect* dan *polarization effect*. *Trickling down effect* adalah dampak ekonomi langsung yang diinginkan dari pertumbuhan suatu daerah maju terhadap daerah belakangnya.

Dampak terpenting berupa peningkatan daya beli di wilayah maju dan peningkatan investasi di daerah belakangnya dapat terjadi apabila perekonomian kedua wilayah bersifat komplementer. Di samping itu, wilayah maju dapat menyerap pengangguran tersembunyi di wilayah belakangnya sehingga meningkatkan produktivitas marginal tenaga kerja dan tingkat konsumsi per kapita di wilayah belakangnya. Pada sisi lain, terjadi pula dampak yang tidak diinginkan yaitu *polarization effect*. Wilayah belakang menjadi tidak efisien karena aktivitas industri dan ekspornya menurun akibat kalah bersaing dengan wilayah maju.

Pada sisi lain, wilayah perkotaan (pusat pertumbuhan) juga mengalami banyak masalah. Masalah pokok yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia saat ini adalah: (1) masalah perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, (2) masalah pengangguran, (3) masalah pendapatan, baik pendapatan kota maupun pendapatan perkapita, (4) masalah pemanfaatan tanah (*land use*) dan nilai tanah, (5) masalah transportasi, (6) masalah infrastruktur, (7) masalah fasilitas pelayanan, dan (8) masalah-masalah lain yang khas di wilayah perkotaan (Surya, 2006).

Urbanisasi sejalan dengan proses industrialisasi dan semakin sulitnya lapangan kerja di daerah. Persoalan yang diakibatkan oleh urbanisasi antara lain adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota sehingga melampaui tingkat penciptaan lapangan kerja di perkotaan, keterbatasan penyediaan lahan untuk rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial serta menimbulkan masalah pada penyediaan moda angkutan darat yang murah, aman dan nyaman (Surya, 2006).

Dalal-Clayton dalam Rustiadi (2009) menyimpulkan bahwa isu umum pembangunan pedesaan di negara-negara sedang berkembang adalah: (1) masalah kemiskinan dan lapangan kerja, (2) masalah pengelolaan berkelanjutan dan akses terhadap sumber daya agraria dan (3) masalah keterkaitan desa-kota (*spatial sectoral links*).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengembangan kawasan pedesaan diarahkan untuk (1) pemberdayaan masyarakat pedesaan, (2) pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, (3) konservasi sumber daya alam, (4) pelestarian warisan budaya lokal, (5) pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, dan (6) penjagaan keseimbangan pembangunan. Tujuan ini hendak dicapai melalui penataan ruang kawasan pedesaan yang dapat berbentuk kawasan agropolitan dan dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan dan beberapa wilayah desa.

Arah atau tujuan penataan ruang pedesaan sangat ideal namun sekaligus ironis. Sampai saat ini, setelah lebih dari 15 tahun pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi); tidak satu pun keenam arah tersebut dapat dicapai secara optimal. Masyarakat pedesaan masih jauh dari kriteria berdaya, kualitas lingkungan hidup menurun, sumber daya alam sudah terkuras dan nyaris habis, warisan budaya lokal mulai terkubur, lahan pertanian abadi masih sebatas angan-angan belaka dan pembangunan desa-kota tak kunjung seimbang.

Secara umum, kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya salah satu atau kombinasi dari tiga aspek pelaksanaan penataan ruang wilayah yaitu

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Inti dari konsep-konsep tersebut adalah bahwa kemajuan suatu pusat pertumbuhan (kota, pasar, industri atau konsentrasi aktivitas ekonomi lain) akan menyebar (*spread*) dan/atau menetes (*trickling-down*) ke daerah-daerah sekitarnya (*hinterland*). Fenomena ini, pada awalnya, diyakini dapat menjadi instrumen bagi peningkatan ekonomi di daerah belakang dari suatu pusat pertumbuhan. Selanjutnya, harapan akan hasil fenomena tersebut dalam jangka panjang akan terjadi suatu polarisasi/konvergensi berbagai aktivitas ekonomi dan manfaatnya bagi pusat pertumbuhan dan *hinterland* sehingga pada gilirannya dapat terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, antara pusat pertumbuhan dan daerah belakangnya.

Fakta yang didapat dilapangan adalah penyebaran dan penetesan manfaat ekonomi tersebut sangat lamban dan tidak dapat diharapkan memacu pertumbuhan di *hinterland*. Proses yang memerlukan waktu yang lama tersebut tergerus oleh fenomena kontradiktif yang terjadi bersamaan, yaitu proses *backwash effect* dan/atau *capital flight*.

*Backwash effect* dan/atau *capital flight* merupakan suatu proses pencucian daerah belakang dan mengalir ke kota. Dengan strategi pembangunan tersentralisasi yang diterapkan selama ini, sumber daya yang ada di *hinterland* malah tercuci ke kota atau pusat-pusat kegiatan ekonomi. Sumber daya yang keluar dari *hinterland* dapat berupa modal, tenaga kerja, dan sumber daya manusia terlatih (*skill labor*). Fakta menunjukkan, selama ini, *backwash effect* dan/atau *capital flight* lebih cepat daripada *spread/trickling down process*. Dengan kondisi tersebut dapat dipastikan jarak antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya bukan semakin kecil, malah semakin lebar dan dalam. Kekuatan kedua proses tersebut pada akhirnya menentukan jarak yang terjadi, semakin lebar atau mengecil.

Dalam konteks wilayah, pembangunan wilayah berarti pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat di dalam wilayah tersebut. Pada hakikatnya, kinerja pembangunan wilayah dapat diukur dengan beberapa tolak ukur (Nasoetion, 1992), yaitu (1) pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), (2) PDRB per kapita, (3) pemerataan pendapatan atau distribusi pemilikan penguasaan faktor-faktor produksi, (4) jumlah tenaga kerja yang menganggur atau setengah menganggur, (5) jumlah penduduk miskin (secara relatif dan absolut), (6) tingkat produktivitas sumber daya wilayah, dan (7) kualitas lingkungan hidup wilayah.

Perencanaan pembangunan wilayah dinilai memiliki peluang untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Bias perencanaan terpusat yang cenderung dengan pendekatan sektoral menimbulkan masalah dalam ekonomi Wilayah (Nasoetion 1992), antara lain (1) disintegrasi struktur perekonomian, (2) kesenjangan Jawa-luar Jawa, bagian Barat-bagian Timur, (3) misalokasi sumber daya, (4) mengabaikan keunggulan komparatif wilayah, (5) kebocoran wilayah (*regional leakages*), (6) hasil investasi tidak dapat direinvestasi di wilayah tersebut, sehingga mengurangi pengganda investasi, dan (7) aliran barang antarwilayah bersifat *mutually exclusive*.

Karenanya, telah lama disadari akan pentingnya perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan lokal dan wilayah. Sebagai negara yang memiliki wilayah-wilayah dengan potensi yang beragam, perencanaan pembangunan telah mulai mengkristal sejak 1999 melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang telah disempurnakan tahun 2004. Berdasarkan semangat desentralisasi, daerah-daerah diberi wewenang mengatur pembangunannya sendiri, meskipun tetap harus mengikuti perencanaan-perencanaan yang bersifat indikatif dari pusat. Pola ini sering disebut sebagai kombinasi antara *top-down policy* dan *bottom-up planning*. Namun, hingga saat ini perencanaan pembangunan wilayah masih menyisakan berbagai kelemahan mendasar.

Urban bias yang terjadi diakibatkan oleh adanya kecenderungan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi melalui kutub pertumbuhan (*growth poles*) yang dari awal telah memprediksikan adanya dampak dari hal tersebut (*trickle down effect*). Sedangkan pada kenyataannya *net-effect* yang terjadi malah menimbulkan pengurusan besar (*massive backwash effect*). *Backwash* di negara-negara sedang berkembang, telah

menimbulkan berjuta-juta orang merana karena menderita kerugian. Yang paling merasakan dampaknya adalah kehidupan masyarakat terbanyak yaitu masyarakat pedesaan (Serageldin, 2009).

#### 6.1.2 Upaya mengatasi Kesenjangan Perkotaan dan Pedesaan

Dikotomi kota-desa hendaknya tidak menyebabkan adanya *disconnect* antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kebijakan penataan ruang di wilayah perkotaan akan memengaruhi wilayah pedesaan, dan sebaliknya, sehingga adanya sinergitas di antara perlu ditekankan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai keterkaitan sistem perkotaan dengan pedesaan dalam wilayah pelayanannya. Keterkaitan wilayah perkotaan dan pedesaan perlu diatur dalam rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten, sehingga tidak menjadi perencanaan terpisah antara *urban planning* dan *rural planning*, melainkan menuju kepada *regional planning* (Dardak, 2009).

Hal yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana membawa potensi pembangunan perkotaan dan pedesaan dalam proses perencanaan. Untuk itu perlu dikenali fungsi dan peranan perkotaan terhadap pedesaan yaitu saling menguatkan (*mutually reinforcing*), bukan *one-way urban to rural* (Daryanto, 2003).

Menurut Rondinelli dan Ruddle (1983), ada tiga hal yang merugikan desa dalam interaksi desa-kota, yaitu semakin terbatasnya jumlah kota-kota kecil menengah, terbatasnya distribusi fasilitas dan pelayanan di kota kecil menengah dan juga terbatasnya hubungan antar kawasan permukiman di wilayah pedesaan. Penyebab gagalnya negara berkembang mencapai pertumbuhan yang merata adalah karena lemahnya sistem penataan ruang. Pembangunan dilaksanakan dalam kondisi kurangnya *market towns*, dan kota-kota perantara (*intermediate cities*), dan distribusi ruang tidak kondusif untuk menciptakan sistem produksi dan perdagangan yang terintegrasi.

Dalam konteks hubungan desa-kota, keterkaitan keduanya dapat diartikan sebagai aliran (*flow*) barang, jasa, orang, informasi, teknologi, modal dan lain-lain serta interaksi (*interaction*) antara desa dan kotas Bentuk-bentuk

keterkaitan desa kota telah dikemukakan beberapa pakar seperti Rustiadi et al. (2009), Rondinelli dan Ruddle (1983), serta Douglass (1998). Keterkaitan desa kota dicerminkan perpindahan orang dan migrasi, aliran barang, aliran jasa, aliran energi, finansial transfer, aset transfer serta informasi. Rustiadi et al, (2009) memberikan salah satu contoh aliran aset desa ke kota melalui pembelian lahan-lahan pedesaan oleh orang kota. Bagi Rondinelli dan Ruddle (1978), keterkaitan desa kota dapat dikelompokkan menjadi hubungan fisik, ekonomi, pergerakan penduduk, teknologi interaksi sosial, delivery jasa, serta politik, administrasi dan organisasi. Douglass (1998) mendeskripsikan keterkaitan desa-kota ke dalam lima bentuk, yaitu orang/penduduk, produksi, komoditas, modal dan informasi.

Pengembangan kota sekunder atau *rural town* dapat menjadi salah satu cara untuk implementasi integrasi pedesaan perkotaan (Dardak 2009).

**Tabel 6. 1 Keterkaitan Utama dalam Pernbangan Spasial**

<b>Tipe keterkaitan</b>	<b>Unsur-unsur</b>
Fisik	Jaringan jalan darat Jaringan transportasi sungai dan air Jaringan kereta api Kesalingtergantungan ekologis
Ekonomi	Pola-pola pasar Arus bahan baku dan barang antara Arus modal Keterkaitan produksi —backward, forward, lateral Pola belanja dan konsumsi Arus pendapatan Arus komoditas sektoral dan antarwilayah Keterkaitan silang ("cross linkages")
Pergerakan penduduk	Migrasi - sementara dan tetap Perjalanan ke tempat kerja
Teknologi	Kesalingtergantungan teknologi Sistem irigasi Sistem telekomunikasi
Interaksi sosial	Pola kunjungan Pola kekerabatan Kegiatan upacara, ritual dan keagamaan Interaksi kelompok sosial
Delivery pelayanan	Arus dan jaringan energi Jaringan kredit dan finansial Keterkaitan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Sistem delivery pelayanan kesehatan Pola pelayanan teknis, komersial dan profesional Sistem pelayanan transportasi

Tipe keterkaitan	Unsur-unsur
Politik, administrasi dan organisasi	Hubungan struktural Arus anggaran pemerintah Kesalingtergantungan organisasi Pola otoritas-persetujuan (approval)-supervisi Pola transaksi antarbatas yurisdiksi Rantai keputusan politik informal

Sumber: Rondinelli dan Ruddle (1978)

### 6.1.3 Teori, Konsep dan Prinsip Pengembangan Ekonomi Lokal di Pedesaan

Pengembangan ekonomi lokal (PEL) mengacu pada proses dimana pemerintah lokal atau organisasi berbasis masyarakat berusaha menggerakkan dan memelihara aktivitas bisnis dan/atau kesempatan kerja. Tujuan utama PEL adalah merangsang kesempatan kerja lokal pada sektor tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam. PEL berorientasi proses, yaitu pengembangan institusi yang baru, industri alternatif, memperbaiki kapasitas tenaga kerja, identifikasi pasar baru, transfer pengetahuan (*knowledge*), dan memelihara perusahaan dan usaha yang baru (Blakely, 1994).

Tidak ada teori atau seperangkat teori yang cukup menjelaskan PEL atau pengembangan ekonomi wilayah (PEW). Namun ada beberapa teori yang dapat membantu untuk memahami alasan rasional PEL. Gabungan teori-teori dimaksud dinyatakan dalam persamaan berikut (Blakely 1994):

*“PEL/PEW = F (sumber daya alam, tenaga kerja, modal kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, skala, pasar ekspor, kondisi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah lokal, pengeluaran wilayah dan negara, faktor pendukung pembangunan)”*

Semua faktor di atas mungkin penting dalam PEL, namun para praktisi pembangunan ekonomi tidak pernah yakin faktor mana yang memiliki bobot terbesar dalam suatu kondisi tertentu. PEL dapat dikaji berdasarkan beberapa teori, di antaranya teori ekonomi neoklasik, teori basis ekonomi, teori lokasi, teori tempat pusat, teori kausasi kumulatif, dan model atraksi. Namun teori-teori pengembangan ekonomi ini tidak cukup menjadi kerangka bagi aktivitas

PEL, sehingga perlu dilakukan sintesis dan reformulasi alternatif pendekatan PEL seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 6. 2 Pendekatan Baru Teori Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)**

<b>Komponen</b>	<b>Konsep lama</b>	<b>Konsep baru</b>
Kesempatan kerja	Lebih banyak perusahaan = lebih banyak pekerjaan	Perusahaan mengembangkan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan penduduk lokal
Basis pembangunan	Membangun sektor-sektor ekonomi	Membangun institusi ekonomi yang baru
Aset lokasi	Keunggulan komparatif berbasis aset fisik	Keunggulan bersaing berbasis kualitas lingkungan
Sumber daya pengetahuan	Ketersediaan tenaga kerja	Pengetahuan sebagai penggerak ekonomi

Sumber: Blakely (1994)

Kebijakan pembangunan wilayah berkembang sesuai dengan, kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat lokal. PEL menjadi alternatif akibat kelemahan *top-down policy* dan *bottom-up policy*. Kebijakan pembangunan dari atas dapat menyebabkan disparitas antar-wilayah akibat eksploitasi sumber daya lokal oleh wilayah yang lebih besar. Kebijakan dari bawah sering kali memiliki muatan yang baik tetapi lemah dalam implementasi sehingga tidak membumi atau bersifat utopia (Adji 2011; Iqbal dan Anugerah 2009; Supriyadi 2007).

Dari beberapa definisi PEL dan penyesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Indonesia, Adji (2011) mendefinisikan PEL sebagai usaha mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.

PEL adalah aktivitas lokal yang merupakan proses pembangunan partisipatif di wilayah administratif lokal melalui kemitraan para pemangku kepentingan publik dan swasta. Pendekatan PEL menggunakan sumber daya lokal dan keunggulan kompetitif untuk menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (ILO, 2010).

Aktivitas PEL berkaitan dengan masyarakat lokal bekerja bersama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi dan perbaikan kualitas hidup bagi semua orang. Tujuan PEL adalah



menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Bank Dunia, 2011).

Adji (2011) memperkenalkan fokus PEL dalam peningkatan kandungan lokal dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal dan partisipatif, pendekatan bisnis bukan pendekatan karikatif, optimalisasi kegiatan ekonomi berdasarkan potensi wilayah, pewilayahan komoditas, tata ruang, atau regionalisasi ekonomi. Sementara Birkhölzer (2005) menawarkan sejumlah prinsip PEL yaitu kepentingan bersama, pendekatan holistik terintegrasi, prioritas kebutuhan yang belum terpenuhi, modal sosial dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat.

Rodriguez-pose (2001) sebagaimana dirujuk Rogerson (2009) mengidentifikasi sejumlah keunggulan strategi PEL jika dibandingkan dengan program pembangunan tradisional. Keunggulan dimaksud dapat dirinci ke dalam keunggulan sosial dan ekonomi. Keunggulan sosial meliputi (1) strategi PEL memberdayakan masyarakat lokal dan mendorong adanya dialog lokal, dan (2) strategi PEL membantu menciptakan institusi lokal yang lebih transparan dan akuntabel yang berkontribusi pada pengembangan masyarakat sipil lokal. Sementara dari sisi ekonomi, keunggulan pendekatan PEL merupakan yang paling nyata, antara lain (1) karena strategi PEL melekatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah dan membuat aktivitas ekonomi tergantung pada keunggulan komparatif dan kondisi ekonomi spesifik wilayah, maka akan tercipta kesempatan kerja yang berkelanjutan dan lebih mampu bertahan dalam perubahan lingkungan ekonomi global, (2) sebagai akibat dari pelibatan para pemangku kepentingan lokal dan mengakar pada aktivitas ekonomi wilayah, strategi PEL juga berkontribusi untuk perbaikan kualitas pekerjaan.

Kecenderungan perkembangan global mengharuskan pemikiran ulang strategi perencanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan tradisional yang dilakukan selama ini perlu mengalami perubahan menjadi kebijakan PEL. Perbedaan yang utama di antara keduanya dinyatakan oleh Rogerson (2009).

**Tabel 6. 3 Perbedaan Utama antara Kebijakan Pembangunan Tradisional dan PEL**

<b>Kebijakan pembangunan tradisional</b>	<b>Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)</b>
Pendekatan top-down di mana keputusan tentang wilayah mana yang akan diintervensi tergantung pada kebutuhan pusat	Menggerakkan pembangunan di semua wilayah dengan inisiatif yang sering kali muncul dari bawah
Dikelola oleh administrasi pusat	Desentralisasi, kerja sama vertikal antara berbagai tingkat pemerintahan dan kerja sama horizontal antara badan-badan publik dan swasta
Pembangunan dengan pendekatan sektoral	Pembangunan dengan pendekatan wilayah (lokalitas, 'milieu')
Pembangunan proyek industri besar untuk merangsang aktivitas ekonomi lain	Memaksimalkan potensi wilayah untuk merangsang sistem ekonomi lokal yang progresif untuk memperbaiki lingkungan ekonomi
Dukungan finansial, insentif dan subsidi sebagai faktor utama untuk menggerakkan aktivitas ekonomi	Provisi sebagai syarat utama untuk pengembangan aktivitas ekonomi

Sumber : Rogerson (2009)

Peran pemerintah lokal dalam PEL adalah menciptakan kondisi yang baik bagi berkembangnya wirausahawan dan meningkatnya pembangunan lokal. Peran pemerintah lokal bukan membentuk perusahaan baru, tetapi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peran pemerintah lokal adalah menciptakan kondisi bagi bisnis lokal untuk bertahan bahkan memperluas aktivitas mereka serta menarik investor dari luar wilayah. Dengan demikian, untuk menggerakkan PEL perlu dilakukan lima tahapan, yaitu (1) pengorganisasian, (2) evaluasi strategi sebelumnya, (3) menyusun rencana strategis untuk membangun ekonomi lokal, (4) menciptakan sistem PEL dan mengimplementasikan rencana strategis dan (5) monitoring dan evaluasi.

Meskipun terutama sebagai strategi di bidang ekonomi, PEL secara bersamaan berkepentingan untuk mencapai tujuan sosial yaitu pengurangan kemiskinan dan inklusi sosial. Strategi PEL terdiri atas intervensi terpadu untuk (1) memperbaiki daya saing perusahaan lokal, (2) merangsang masuknya investasi, (3) meningkatkan keahlian tenaga kerja, dan (4) meningkatkan infrastruktur. Proses PEL mengikuti tahap: (1) memulai aktivitas dan membangun konsensus, (2) diagnosis teritori dan pemetaan kelembagaan,

(3) menggerakkan forum lokal (4) strategi PEL dan perencanaan aksi (5) implementasi pelayanan dan intervensi PEL, dan (6) umpan balik, monitoring dan evaluasi dan keberlanjutan intervensi PEL. Sementara unsur dasar dari PEL terdiri atas (1) mobilisasi dan partisipasi dari aktor-aktor lokal, (2) sikap proaktif pemerintah lokal, (3) keberadaan tim kepemimpinan lokal, (4) kerja sama sektor publik dan swasta, (5) persiapan strategi PEL, (6) promosi usaha mikro-kecil-menengah dan pelatihan sumber daya manusia, (7) koordinasi promosi program dan instrumen, dan (8) institusi PEL (Alburquerque, 2004).

#### 6.1.4 Proses Pengembangan Ekonomi Lokal di Pedesaan

PEL merupakan suatu proses partisipatif di mana penduduk lokal dari semua sektor bekerja bersama untuk merangsang aktivitas ekonomi lokal untuk mencapai ekonomi berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesempatan kerja dan memperbaiki kualitas hidup penduduk, termasuk penduduk miskin dan yang termarginalkan. PEL mendorong sektor publik, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membangun kemitraan dan kerja sama untuk menemukan solusi lokal bagi tantangan ekonomi bersama.

Proses PEL berupaya memberdayakan para pemangku kepentingan untuk mampu menggunakan secara efektif tenaga kerja, modal, dan sumber daya lokal lainnya untuk mencapai prioritas-prioritas lokal (penyediaan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, stabilitas ekonomi lokal, dan mendorong pajak lokal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik). Rancangan strategi PEL bersifat terpadu, berorientasi proses, dan sedapat mungkin tidak memberikan petunjuk (non-preskriptif). Pada akhirnya, PEL terkait dengan pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang, di mana diperlukan waktu untuk mengubah kondisi lokal, membangun kapasitas, mengelola proses partisipatif, dan memberdayakan para pemangku kepentingan, terutama masyarakat miskin dan yang termarginalkan (UN-Habitat 2009).

Kebijakan pembangunan lokal tidak selalu terbatas pada wilayah kecamatan, tetapi dapat merupakan kesatuan dari beberapa kecamatan dengan karakteristik yang sama dalam ekonomi, tenaga kerja, dan lingkungan. Sistem produksi lokal semestinya tidak perlu dibatasi oleh batas kecamatan.

Konsekuensinya, menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi intervensi yang sesuai dengan mempersiapkan sistem informasi khusus untuk PEL. Studi mengenai kaitan produksi dan lokasi usaha dan aktivitas merupakan sesuatu yang penting dalam PEL. Sasaran utama adalah mengidentifikasi dan memahami struktur produksi dan pemasaran bagi ekonomi lokal, relasi ekonomi antara produsen dan pelaku pasar, infrastruktur, pelatihan, pusat penelitian teknologi, layanan bisnis, dan elemen-elemen lainnya (Albuquerque, 2004).

Kriteria aksi dalam inisiatif PEL yang ditawarkan oleh Albuquerque (2004) meliputi (1) pengembangan pasokan lokal terkait dengan jasa pengembangan bisnis, (2) pembangunan lokal dan kecamatan, (3) PEL bukan semata pengembangan sumber daya endogen, (4) akses kredit bagi usaha mikro-kecil, (5) promosi asosiasi dan kerja sama antara usaha mikro-kecil, (6) perlunya keterkaitan ilmuwan/universitas wilayah dan pusat penelitian teknologi dengan sistem produksi lokal, (7) dukungan infrastruktur dasar bagi PEL, (8) adaptasi kerangka yuridis dan hukum untuk promosi PEL dan pentingnya tindak lanjut dan mekanisme evaluasi, (9) koordinasi yang efisien antar-lembaga, dan (10) asas komplementer antara investasi sosial dan sumber daya untuk promosi PEL. Joseph (2002) menyatakan bahwa pemerintah lokal tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa bagi kepentingan publik, tetapi juga berfungsi bagi pembangunan sosial ekonomi. Kebijakan pemerintah lokal harus bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja. Secara rinci, peran pemerintah lokal dalam PEL adalah untuk memastikan bahwa (1) hasil PEL adalah peningkatan kesempatan kerja, (2) PEL mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan dan perbaikan perkotaan, (3) target PEL adalah memberi manfaat bagi masyarakat miskin dan marginal di kecamatan melalui promosi suatu pendekatan redistributif dan inklusif untuk pembangunan

Joseph (2002) menawarkan prinsip utama yang mendasari konsep PEL yaitu (1) kemiskinan dan pengangguran merupakan tantangan utama dalam suatu wilayah, sehingga strategi PEL harus memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, (2) target awal PEL adalah

penduduk miskin, masyarakat marginal, dan usaha mikro-kecil-menengah untuk memampukan mereka berpartisipasi penuh dalam perekonomian wilayah, (3) tidak ada pendekatan tunggal untuk PEL setiap wilayah memerlukan pendekatan tersendiri yang merukan cara terbaik dalam konteks wilayah yang bersangkutan, (4) PEL mempromosikan kepemilikan lokal, pelibatan masyarakat, kepemimpinan lokal dan pembuatan keputusan bersama, (5) PEL mencakup kemitraan lokal, nasional dan internasional antara masyarakat, pebisnis, dan pemerintah untuk mengatasi masalah, menciptakan usaha bersama dan membangun wilayah lokal, (6) PEL memaksimalkan sumber daya, keahlian, dan peluang lokal untuk manfaat jamak, (7) PEL mencakup integrasi berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu pendekatan komprehensif untuk membangun wilayah lokal, (8) PEL sebagai pendekatan yang luwes untuk merespons perubahan kondisi pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dari berbagai tinjauan kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa peran aktivitas ekonomi dalam PEL setidaknya dapat dilihat dari variabel pendapatan, kesempatan kerja, dan peningkatan aktivitas ekonomi. Fokus PEL dari berbagai rujukan terpilih disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6. 4 Sasaran PEL dari beberapa kepustakaan terpilih**

<b>Penulis</b>	<b>Sasaran PEL</b>
Bank Dunia (2011)	Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja berkelanjutan, daya saing, dan pemerataan
ILO (2010)	Kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Supriana dan Nasution (2010)	Pendapatan dan kesempatan kerja
Rustiadi et al. (2009)	Pendapatan dan tenaga kerja
UN-Habitat (2009)	Penggunaan sumber daya lokal secara efektif (tenaga kerja, modal, dan sumber daya lainnya)
Chmura dan Orozobekov (2009)	Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga, pengurangan kemiskinan dan pengangguran
Weisbrod et al. (2004)	Kesempatan kerja dan tingkat pendapatan
Bartik (2003)	Peningkatan produktivitas sumber daya lokal (tenaga kerja, lahan)
James et al. (2002)	Pertumbuhan kesempatan kerja Kesempatan kerja, pembangunan pedesaan berkelanjutan, manfaat bagi masyarakat miskin dan marginal
Joseph (2002)	Kesempatan kerja

## **6.2 Masalah dan Solusi Pengembangan Infrastruktur Pedesaan**

### **6.2.1 Permasalahan Infrastruktur Desa**

Pembangunan infrastruktur sangat penting saat ini membutuhkan lebih banyak perhatian khususnya pada desa-desa yang masih sangat minim sarana dan prasarana infrastrukturnya. Namun saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan masih mengalami kendala, saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah pedesaan umumnya masih terkendala oleh terbatasnya akses masyarakat pedesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desanya, hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait masalah pembangunan yang akan dilakukan. Pemerintah terlihat hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan. Sehingga yang terjadi desa dipaksa untuk menerima program pembangunan dari pemerintah tanpa melihat pembangunan apa yang sesungguhnya dibutuhkan desa tersebut. Permasalahan tersebut menjadikan masyarakat kemudian menganggap pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan pada desa mereka hanya sebatas hadiah yang diberikan pemerintah dan bukanlah kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat. Dengan kondisi yang seperti ini menyebabkan infrastruktur yang telah terbangun tadi fungsinya menjadi tidak tepat sasaran, tidak tepat guna dan tidak tepat waktu yang pada akhirnya infrastruktur yang telah terbangun tadi tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Permasalahan pembangunan yang muncul di daerah pedesaan, dapat ditanggulangi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya yaitu dengan perbaikan infrastruktur yang ada di daerah pedesaan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mulai memperkenalkan program pembangunan yang melibatkan masyarakat dimulai dari tahapan pengusulan kegiatan atau proyek sampai dengan pemeliharannya.

### 6.2.2 Teori, konsep, dan prinsip pengembangan infrastruktur desa

Infrastruktur pedesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin A, 2005).

Dalam memilih jenis infrastruktur yang akan dilaksanakan di desa, harus mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain (1) Memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa, (2) Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat setempat terutama kelompok miskin, (3) Penyediaan lahan untuk infrastruktur disediakan oleh masyarakat, dan (4) Dapat dilaksanakan dan berfungsi pada tahun anggaran 2009, serta (5) Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja setempat dan penggunaan material lokal, dan (6) Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat, (7) Merupakan infrastruktur yang dapat dikelola oleh masyarakat, (8) Menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur yang dibangun, (8) Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya.

### 6.2.3 Infrastruktur sebagai Modal Fisik dalam Pembangunan Desa

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Infrastruktur dalam ilmu ekonomi merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang meliputi: jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur cenderung mengarah pada pembahasan barang publik seperti yang dijelaskan oleh Stiglitz (2000) yang mengatakan

bahwa beberapa infrastruktur jalan merupakan salah satu barang publik yang disediakan oleh pemerintah.

Infrastruktur ekonomi biasanya mempunyai karakteristik monopoli alamiah karena pengadaan dan pengoperasian infrastruktur ekonomi akan lebih ekonomis jika hanya oleh satu perusahaan daripada dua atau lebih perusahaan (Taufiq, 2006). Monopoli alamiah biasanya muncul ketika skala ekonomis yang diperlukan untuk menyediakan suatu barang atau jasa sedemikian besar, sehingga akan lebih bermanfaat. Apabila pasokan barang atau jasa diserahkan kepada satu perusahaan saja (Mankiw, 2006).

#### 6.2.4 Skema pembiayaan pembangunan infrastruktur desa

Pembiayaan infrastruktur desa bersumber dari beragam sisi, antara lain :

##### 1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, Pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, Pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (sebagai salah satu tujuan SPPN Pasal 2 ayat 4 huruf d) memaknai "partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan". Dari pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, Pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya di lakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

##### 2. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD)

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) di maksudkan sebagai bantuan stimulan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat



dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Adapun tujuan dari ADD adalah:

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kemudian adapun rumusan yang dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap desa dalam ADD adalah :

- a) Azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- b) Azas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel independen utama dan variabel independen tambahan, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);

- c) Variabel independen utama terdiri: dari jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, kesehatan, pendidikan, keterjangkauan jarak desa ke Kabupaten;
- d) Variabel independen tambahan terdiri dari: luas wilayah desa, unit komunitas (jumlah RT), potensi desa (PADes).

Dengan besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan azas adil adalah:

- a) Besarnya ADDM adalah 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADD;
- b) Besarnya ADDP adalah 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah ADD.

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari bank rekening Kas Daerah langsung ke bank rekening Kas Desa. Bank rekening Kas Desa sebelum ditetapkan harus memenuhi syarat utama, yaitu:

- a) Bank Pemerintah yang terpercaya;
- b) Lokasi Bank Pemerintah yang terdekat dengan Kantor Desa.

### 3. Bantuan Perusahaan

Bantuan perusahaan didasarkan pada perusahaan swasta yang berada pada kawasan desa tersebut.

### 4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi pendidikan masyarakat akan berhubungan erat terhadap kualitas pola pikir masyarakat di dalam mengolah sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya, tanpa adanya penguasaan teknologi, dan kinerja pemerintah desa yang memiliki kapabilitas, Kredibilitas dan responsibilitas yang memadai.

### 5. Faktor Alam (SDA)

Keadaan alam desa yang memiliki sumber daya alam yang luas, dominan dan memadai sangat mempengaruhi program pembangunan.



## BAB VII KONSEP DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

### 7.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa

Istilah ‘pemberdayaan masyarakat’ sebagai terjemahan dari kata *empowerment* mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah ‘pengentasan kemiskinan’ (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan diksi yang selalu menjadi topik dan kata-kunci dari upaya pembangunan.

Hal itu, tidak hanya berlaku di Indonesia, bahkan World Bank dalam Bulletinnya Vol. 11 No.4/Vol. 2 No. 1 Oktober-Desember 2001 telah menetapkan pemberdayaan sebagai salah satu ujung tombak dari Strategi Trisula (*three-pronged strateo*) untuk memerangi kemiskinan yang dilaksanakan sejak memasuki dasarwarsa 90-an, yang terdiri dari penggalakan peluang (*promoting opportunity*), fasilitasi pemberdayaan (*facilitating empowerment*) dan peningkatan keamanan (*enhancing security*).

Terkait dengan pengertian pemberdayaan, Dharmawan (2006) mengutip pendapat Fear and Schwarzweller (1985) yang mengemukakan bahwa pemberdayaan dipahami sebagai:

*“a process in which increasingly more members of a given area or environment make and implement socially responsible decisions, V”here the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without a decrease (without deteriorating) in the life chances of others”.*

Dalam hubungan ini, Robbins, Chatterjee, & Canda (1998) secara singkat menyatakan sebagai berikut:

*"Empowerment: "process by which individuals and groups gain power, access to resources and control over their own lives. In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collective aspirations and goals".*

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mas'oed, 1993). Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah. Hal ini diperuntukkan agar :

- a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan
- b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, World Bank (2001) memberikan pengertian bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan pada suatu kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, untuk mampu dan memiliki keberanian untuk menyuarakan pendapat, ide, gagasan, kemampuan dan keberanian untuk memilih konsep atau metode yang sesuai bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sehingga, dengan kata lain pemberdayaan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian pada masyarakat.

Seiring dengan hal tersebut, pemberdayaan merupakan bentuk usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang miskin dan marginal untuk

menyampaikan pendapat sesuai kebutuhan dan pilihan. Masyarakat dapat berpartisipasi, bernegosiasi, saling mempengaruhi dan memiliki kemampuan untuk mengelola kelembagaan masyarakat dengan akuntabel untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Sesuai dengan pengertian tersebut, pemberdayaan merupakan perbaikan kualitas hidup atau peningkatan kesejahteraan setiap orang dan masyarakat dalam aspek :

1. Perbaikan ekonomi, misalnya kecukupan pangan
2. Perbaikan kesejahteraan sosial, misalnya perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. Merdeka dari segala bentuk penindasan
4. Sektor keamanan yang terjamin
5. Menjamin hal asasi manusia
6. Dan aspek lainnya

Menurut Parsons et al. (1951), pemberdayaan diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berpartisipasi sebagai bentuk kontrol dan pengaruh dari kejadian maupun lembaga yang berpengaruh terhadap siklus kehidupan individu tersebut. Pemberdayaan memberikan penekanan pada individu untuk mendapatkan ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang mencukupi untuk mempengaruhi kehidupan individu maupun orang disekitarnya.

Secara tersirat pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab masyarakat akan siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu;

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya,

karena jika demikian akan sudah penuh, Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan; dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan yang mendasar sifatnya dalam konsep melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dan interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang dan melunglaikan yang lemah, Melindungi harus dilihat upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah, Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Subejo dan Supriyanto (2004) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

## **7.2 Permasalahan-permasalahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Meskipun nampaknya telah terdapat kesepakatan tentang penting pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, namun terdapat permasalahan-permasalahan yang menimbulkan dilema dalam pelaksanaannya. Seperti yang diungkap oleh Aditya (2009), permasalahan yang muncul dalam pemberdayaan masyarakat desa, antara lain :

1. Pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat diawali dari tahun 1990-an. Usaha ini memiliki hambatan awal berupa perbedaan persepsi mengenai definisi kemiskinan. Sedangkan, kemiskinan juga diartikan sebagai kondisi absolut yang memiliki kriteria tertentu dan diseragamkan untuk digunakan sebagai dasar menyusun program pengentasan kemiskinan. Namun, pada aplikasi di lapangan, kemiskinan menunjukkan kondisi yang relatif. Seseorang dalam kondisi tidak miskin dalam komunitas kultural, walaupun secara absolut orang tersebut didefinisikan sebagai penduduk miskin. Hal ini berarti upaya pemberdayaan yang dilakukan tidak dapat menghadapi kondisi yang pasti.
2. Relativitas dalam mengukur keberhasilan upaya pemberdayaan juga merupakan suatu masalah. Hal ini dikarenakan keberhasilan upaya pemberdayaan masih belum memiliki definisi pasti secara teknis atau substantif. Evaluasi dalam upaya pemberdayaan, pada umumnya

dilakukan dengan mengukur keberhasilan bagaimana program dilaksanakan dan bagaimana anggaran yang direncanakan dapat diterapkan. Namun masih belum mengevaluasi mengenai keberhasilan yang substansial mengenai tujuan pemberdayaan. Sedangkan substansi pemberdayaan juga masih belum pasti, hal ini disangkutkan dengan pemahaman mengenai masyarakat yang berdaya dan siapa yang mendefinisikan.

3. Bentuk dalam upaya pemberdayaan yang memiliki sifat pemberian bantuan, pada kenyataannya tidak menjawab masalah ketidakberdayaan. Pemberian bantuan yang pada umumnya berupa sejumlah uang, justru menyebabkan upaya pemberdayaan mendapatkan titik ketergantungan yang baru. Walaupun pada dasarnya pemberian bantuan diberikan dengan tujuan sebagai pemicu munculnya pemberdayaan, namun masih menciptakan mental masyarakat penerima, bukan menjadi masyarakat penggerak sesuai dengan tujuan awal pemberdayaan.
4. Pemerintah banyak melakukan pengembangan mobilisasi dan partisipasi semu, dimana masyarakat diajak, dipengaruhi hingga diberi perintah untuk ikut dalam program pemberdayaan yang sedang dilakukan, namun pada kenyataannya program tersebut tidak terjaga kelanjutannya. Namun pada sisi lain, organisasi diluar pemerintah menjawab permasalahan pemberdayaan memberikan pernyataan mengenai perlunya kesadaran kritis dalam masyarakat untuk menguatkan kelembagaan, pendidikan politik dan upaya advokasi. Pada kondisi tertentu usaha ini mampu menjawab masalah ketergantungan, namun usaha ini juga mengalami kendala pada lambatnya kemajuan program.
5. Agenda politik atau penguatan kelembagaan dipilih sebagai agenda alternatif setelah agenda yang menangani masalah yang berhubungan dengan kecukupan pangan. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat yang berada dalam kondisi benar-benar miskin akan memilih upaya



pemberdayaan dengan nuansa bantuan ekonomi daripada pemikiran untuk mencari cara agar berdaya dan berusaha secara mandiri.

6. Bentuk pemberdayaan dengan pola kemitraan menjadi kondisi yang menarik. Banyak pihak yang dilibatkan dalam menjalin kerjasama untuk mewujudkan pemberdayaan. Namun program ini akan percuma apabila masing-masing pihak tidak memiliki kapasitas yang sama. Dominasi pada salah satu pihak akan menjadikan kerjasama yang timpang, kesepakatan yang tidak terwujud dalam keadilan dan pada kenyataannya sulit mendorong bentuk kemitraan yang sejajar dalam posisi dan kerjasama.
7. Isu globalisasi memberikan tantangan pada negara mengenai pentingnya pasar dan adanya upaya untuk menyusutkan peran negara. Padahal ketidakberdayaan masyarakat merupakan akibat pembangunan yang seringkali berorientasi pada pasar. Kondisi ini akan menciptakan ketidakberdayaan baru, dimana negara akan menjadi penonton pasif. Pierre Bourdieu mengkritik paham ini dengan menyatakan bahwa dunia akan berada dalam kondisi yang sesuai dengan teori Darwin mengenai seleksi alam, dimana yang tidak berdaya akan semakin tidak berdaya.
8. Negara yang sejahtera dalam konteks Indonesia telah dirancang oleh pemikiran para pendiri bangsa dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah adanya konsep tidak diiringi dengan kemampuan untuk mewujudkan.

### **7.3 Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Axinn (1988) mengartikan 'pendekatan' sebagai suatu 'gaya' yang harus menentukan dan harus diikuti oleh semua pihak dalam sistem yang bersangkutan (*the style of action within a system*). Terkait dengan kegiatan pemberdayaan, Nagel (1997) mengemukakan bahwa, apapun pendekatan yang akan diterapkan, harus memperhatikan:

- 1) Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan

- 2) Sistem transfer teknologi yang akan dilakukan
- 3) Pengembangan sumberdaya manusia/fasilitator yang akan
- 4) melakukan pemberdayaan.
- 5) Alternatif organisasi pemberdayaan yang akan diterapkan, yang berhadapan dengan pilihan-pilihan antara:
  - a. Publik ataukah swasta
  - b. Pemerintah ataukah non-pemerintah
  - c. Dari atas (birokratis) ataukah dari bawah (partisipatif)
  - d. Mencari keuntungan ataukah non-profit
  - e. Karitatif ataukah harus mengembalikan biaya
  - f. Umum ataukah sektoral
  - g. Multi-tujuan ataukah tujuan-tunggal
  - h. Transfer teknologi ataukah berorientasi pada kebutuhan

Ife (1995) menyatakan bahwa pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien (penerima manfaat/masyarakat kelas bawah) atas:

- 1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup yaitu kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- 2) Pendefinisian kebutuhan, yang dalam hal ini kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya,
- 3) Ide atau gagasan, dalam pengertian kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- 4) Lembaga-lembaga, yang tidak terbatas dalam pengertian organisasi, tetapi juga dalam pengertian kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan
- 5) Sumber-sumberterkait dengan kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

- 6) Aktivitas ekonomi, dalam arti kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- 7) Reproduksi yang mencakup pengertian kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Terkait dengan hal itu, pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan yang dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. Parsons, et al., (1994) menyatakan, bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Namun demikian, tidak semua intervensi fasilitator dapat dilakukan melalui kolektivitas. Beberapa situasi strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien (penerima manfaat) dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya.

Karenanya, dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain :

(1) Pendekatan Mikro

pemberdayaan dilakukan terhadap klien (penerima manfaat) secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, dan crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien (penerima manfaat) dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (task centered approach).

(2) Pendekatan Mezzo

pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien (penerima manfaat). Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien (penerima manfaat) agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

### (3) Pendekatan Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena penerima manfaat perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas.

Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien (penerima manfaat) sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Di pihak lain, pendekatan pemberdayaan, dapat pula diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu:

1. Pendekatan partisipatif, dalam arti selalu menempatkan masyarakat sebagai titik-pusat pelaksanaan pemberdayaan, yang mencakup:
  - a) Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan-tujuan "orang luar" atau penguasa.
  - b) Pilihan kegiatan, metoda maupun teknik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pada pilihan masyarakat
  - c) Ukuran keberhasilan pemberdayaan, bukanlah ukuran yang dibawa" oleh fasilitator atau berasal dari "luar", tetapi didasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaatnya
2. Pendekatan kesejahteraan, dalam arti bahwa apapun kegiatan yang akan dilakukan, dari manapun sumberdaya dan teknologi yang akan digunakan, dan siapapun yang akan dilibatkan, pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat terhadap perbaikan mutu-hidup atau kesejahteraan masyarakat penerima manfaatnya.
3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin keberlanjutannya.

Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu menyiapkan masyarakat penerima manfaatnya agar pada suatu saat mereka akan mampu secara mandiri untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan.

Ketiga pendekatan tersebut nampaknya selaras dengan yang dikemukakan Elliot (1987) yang terdiri dari:

- 1) Pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*), yang lebih memusatkan pada pemberian bantuan kepada masyarakat untuk menghadapi bencana alam, dll; tanpa bermaksud untuk memberdayakan masyarakat keluar dari pemiskinan rakyat ketidakberdayaan mereka dalam proses dan kegiatan politik.
- 2) Pendekatan pembangunan (*development approach*), yang memudahkan perhatiannya kepada upaya-upaya peningkatan kemampuan, pemandirian, dan keswadayaan
- 3) Pendekatan pemberdayaan (*empowerment approach*), yang memfokuskan pada penanggulangan kemiskinan (yang merupakan penyebab ketidakberdayaan) sebagai akibat proses politik.

Pendekatan ini dilakukan melalui program-program pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk segera terlepas dari ketidakberdayaan mereka.

Ketiga pendekatan ini, secara lebih sederhana pernah dirumuskan oleh Kartasasmita (1995) kedalam tiga strategi pokok yaitu:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang ada pada masyarakat, dan
- 3) Memberdayakan dalam arti melindungi dan membela kepentingan rakyat.

Terkait dengan ketiga pendekatan tersebut, Kartasasmita (1997) menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah

bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

Pertama, upaya itu harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Kedua, pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan masyarakat yang akan menerima manfaat, mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Selain itu lingkup bantuan juga menjadi luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Sehingga pendekatan kelompok merupakan pendekatan paling efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk kepentingan analisis, pemberdayaan masyarakat harus dapat dilihat baik dengan pendekatan komprehensif rasional maupun inkremental, yaitu:

Pertama, dalam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka, serta penerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional yang mencakup seluruh masyarakat. Dalam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah, maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu.

Kedua, perubahan yang diharapkan tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam derap yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Pada satu sektor dengan sektor lainnya dapat berbeda percepatannya, demikian pula antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya.

Salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan terutama oleh LSM adalah advokasi. Pendekatan advokasi mencoba meminjam pola yang diterapkan dalam sistem hukum, dimana penasihat hukum berhubungan langsung dengan klien. Dengan demikian, pendekatan advokasi menekankan pada pendamping dan kelompok masyarakat dan membantu mereka untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan lainnya, membantu mereka mengorganisasikan diri, menggalang dan memobilisasi sumber daya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar dari kelompok masyarakat tersebut.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi oleh strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan diinginkan. Sumodiningrat menyatakan bahwa strategi pemberdayaan pada dasarnya mempunyai tiga arah.

- 1) Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat,
- 3) Ketiga, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan, dengan strategi sebagai berikut :

- 1) Menyusun instrumen pengumpulan data.

Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, referensi yang ada, dari hasil temuan dari pengamatan-lapang,

- 2) Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
- 3) Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

Di pihak lain, mengacu kepada Korten (1993), mengemukakan adanya lima generasi strategi pemberdayaan, yaitu:

Pertama, generasi yang mengutamakan relief and welfare, yaitu strategi yang lebih mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan setiap individu dan masyarakat, seperti: sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan.

Kedua, *strategy community development* atau *small scale reliant local development*, yang lebih mengutamakan pada kesehatan, penerapan teknologi tepat-guna, dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, strategi ini tidak mungkin dilakukan dengan pen. dekatan pembangunan dari atas (*top down approach*), tetapi harus dilakukan pendekatan dari bawah (*bottom-up approach*).

Ketiga, adalah generasi *sustainable system development* yang lebih mengharapkan terjadinya perubahan pada tingkat regional dan nasional. Melalui strategi ini, diharapkan terjadi perubahan kebijakan yang keluar dari tingkat daerah (*local*) ke tingkat regional, nasional, dan internasional, utamanya terkait dengan dampak pembangunan yang terlalu eksploitatif dan mengabaikan pelestarian/keberlanjutan pembangunan.

Keempat, merupakan generasi untuk mengembangkan gerakan masyarakat (*people movement*), melalui pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan lokal, serta mobilisasi sumberdaya lokal yang ada dan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Strategi ini, tidak sekedar mempengaruhi kebijakan tetapi sekaligus juga mengharapkan terjadinya perubahan di dalam pelaksanaannya.



Kelima, generasi pemberdayaan masyarakat (*empowering people*) yang memperhatikan arti penting perkembangan, teknologi, persaingan, dan kerjasama, Generasi ini memperjuangkan ruang gerak yang lebih terbuka terhadap kemampuan dan keberanian masyarakat, dan pengakuan pemerintah terhadap inisiatif lokal.

Dalam hubungan ini, Ismawan (Priyono, 1996) menetapkan adanya lima strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

- 1) pengembangan sumberdaya manusia,
- 2) pengembangan kelembagaan kelompok,
- 3) pemupukan modal masyarakat (swasta),
- 4) pengembangan usaha produktif, dan
- 5) penyediaan informasi tepat-guna

Dalam telaahannya terhadap strategi pemberdayaan masyarakat, (Suharto, 1997) mengemukakan adanya lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu:

- 1) Motivasi
- 2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan
- 3) Manajemen diri
- 4) Mobilisasi sumberdaya
- 5) Pembangunan dan pengembangan jejaring

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, kelima aspek pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui 5P strategi pemberdayaan yang dapat yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 1997):

- a) Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat,
- b) Penguatan, melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka,

- c) Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil
- d) Penyokongan, atau memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya, Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e) Pemeliharaan, dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha

Pada hubungan ini, (Mardikanto, 2006) menyimpulkan apapun strategi pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan harus memperhatikan upaya-upaya:

- 1) Membangun komitmen untuk mendapatkan dukungan kebijakan, sosial dan finansial dari berbagai pihak terkait.
- 2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat
- 3) Melengkapi sarana dan prasarana kerja para fasilitator
- 4) Memobilisasi dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat.



## **BAB VIII TATA RUANG PEDESAAN**

### **8.1 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Tata Ruang Desa**

UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengklasifikasikan tata ruang berdasarkan kegiatan kawasan yang membagi habis ruang dalam kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Kawasan perkotaan merupakan wilayah yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang secara eksplisit dirumuskan kriteria kawasan pedesaan yaitu: a). berfungsi sebagai kawasan produksi pertanian kabupaten; b) mempunyai sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian; c) adanya aglomerasi penduduk yang bermata pencaharian petani, nelayan, penambang rakyat, atau pengrajin kecil; d) mempunyai tatanan nilai budaya lokal dan berfungsi sebagai penyangga budaya dan lingkungan hidup bagi wilayahnya; e) kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam termasuk perikanan tangkap f) susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan termasuk kawasan transmigrasi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; g) kerapatan sistem permukiman dan penduduk yang rendah; dan h) bentang alam berciri pola ruang pertanian dan lingkungan alami.

Kebangkitan ekonomi perkotaan dan urbanisasi semakin meluas dan menyorok kawasan pedesaan serta mempersempit *open space*. Konversi lahan pertanian dan *green area* semakin meningkat yang berakibat pada perubahan kualitas lingkungan secara regional maupun lokal, Penataan ruang pedesaan sangat strategis untuk mengantisipasi perubahan dan degradasi lingkungan terkait dengan semakin meluasnya fenomena urbanisasi beserta implikasi permasalahannya.

Dalam konteks penataan ruang, kawasan pedesaan menghadapi problem berkaitan dengan sinkronisasi fungsional dengan kawasan perkotaan dan belum serasinya kegiatan pertanian dan non pertanian. Dipihak lain, kawasan pedesaan merupakan bagian integral dari sistem penataan ruang wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten.

Oleh karena itu diperlukan pemantapan kegiatan penataan ruang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Penataan ruang kawasan pedesaan sangat dinamis terkait dengan perubahan cepat dari komponen sumberdaya manusia dan wilayah lain, oleh karena itu diarahkan untuk:

a) Pemberdayaan masyarakat pedesaan

Tata ruang pedesaan diarahkan untuk memperkuat memperkuat sistem sosial kelembagaan masyarakat dan kemampuan perekonomian pedesaan khusus petani dan pertanian. Perlu ada proteksi terhadap sumber kehidupan masyarakat petani (lahan pertanian) dari pengaruh eksternal (modal) serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan kontrol tata ruang dengan prinsip partisipatif. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga terus dilakukan dengan peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, Permendagri No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat mengamanatkan pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, serta penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan, yang

dilaksanakan melalui Pusat Pertumbuhan Terpadu Antardesa (PPTAD),

- b) Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya

Tata ruang pedesaan mendasarkan pada keseimbangan lingkungan dan daya dukungnya untuk menjamin kualitas lingkungan. Pemanfaatan ruang harus sesuai dengan kemampuannya, sehingga eksploitasi dan pemanfaatan sumberdaya pedesaan tidak melampaui daya dukungnya.

- c) Konservasi sumber daya alam

Sebagian terbesar alokasi fungsi ruang kawasan pedesaan adalah untuk konservasi sumberdaya alam, baik terkait dengan sumberdaya flora amupun fauna. Dalam RTRW ditetapkan dalam kawasan berfungsi lindung yang harus dikontrol dan dikendalikan pemanfaatannya. Penjaminan terhadap kawasan ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan struktural perundang-undangan dan kultural dengan pemberdayaan masyarakat.

- d) Pelestarian warisan budaya lokal

Kawasan Pedesaan memberikan cerminan relasi manusia dan alam serta model adaptasi yang alamiah dan harmoni sehingga memunculkan budaya local yang mantap. Warisan budaya (*heritage*) harus dilindungi dari pengaruh negatif bahkan menjadikannya sebagai kawasan lindung budaya.

- e) Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan

Kawasan pedesaan identik dengan kawasan pertanian yang memiliki fungsi ekonomi produksi masyarakat dan pangan dan fungsi ekotogi untuk menjaga keselarasan alam. Kawasan pertanian panganberkelanjutan dapat diarahkan menjadi kawasan strategis pedesaan dengan tujuan utama sebagai ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Undang-undang Nomor 41 tahun

2009 lahan tersebut diberi istilah kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B). Penetapan KP2B di areal pertanian pedesaan dilakukan dengan RTRW harus tetap diletakkan pada tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu didukung oleh perangkat insentif dan disinsentif jika lahan tersebut akan dipertahankan atau dikonversi. Saat ini lahan pertanian menghadapi problem dan tekanan konversi yang sangat berat.

f) Penjagaan keseimbangan pembangunan pedesaan-perkotaan

Tata Ruang pedesaan harus menciptakan ruang interaksi yang seimbang antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Memberikan ruang bagi pengembangan budidaya kawasan, sekaligus mempertahankan fungsi lindung. Model keterkaitan desa kota ini dapat tercipta dengan dukungan sistem interaksi yang seimbang dengan infrastruktur yang memadai. Sejauh ini kawasan pedesaan lebih banyak berfungsi sebagai hinterland (daerah belakang) kota sehingga tidak terciptak keseimbangan. Dalam konteks ini, Undang-undang Penataan Ruang mengamanatkan pembangunan agropolitan sebagai dasar pengembangan ekonomi pedesaan.

g) Kawasan pedesaan berperan penting sebagai penunjang kehidupan manusia.

Karena sebagian besar kawasan masih berupa lahan terbuka yang dapat diolah menjadi lahan pertanian, daerah penyangga, kawasan lindung, dan fungsi-fungsi budidaya dan lindung lainnya. Konsep konservasi harus menjadi domain tataruang kawasan pedesaan karenamasyarakat pedesaan memiliki konsep konservasi tradisional yang biasanya disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik dan budaya masyarakat itu sendiri.

Selain itu perlu disadari bahwa kawasan pedesaan memiliki potensi yang besar untuk berkembang tanpa merubah karakter dan fungsi kawasan. Untuk menjadi daerah yang maju, kawasan pedesaan tidak usah berubah fungsi meniru kawasan kota yang cepat tumbuh, tetapi berkembang sesuai dengan

karakter dan fungsinya yang khas. Kekhasan ini tidak boleh hilang, karena kekhasan adalah salah satu bagian dari kekayaan daerah yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, penataan ruang pada kawasan pedesaan adalah untuk :

- (a) Pemanfaatan ruang diatur agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah serta menanggulangi efek negatif pada lingkungan alam, buatan dan sosial budaya
- (b) Fungsi kawasan pedesaan ditingkatkan sesuai dengan penetapan rencana tata ruang
- (c) Membentuk keterkaitan fungsional dan keserasian perkembangan desa dan kota
- (d) Mencapai perkembangan kegiatan pertanian di kawasan pedesaan agar serasi sehingga dapat menunjang pengembangan wilayah desa yang terpadu
- (e) Melakukan pengendalian konversi pemanfaatan ruang yang berskala besar, terutama pada penggunaan lahan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi dan ekosistem serta keberlanjutan dalam pemenuhan kebutuhan hidup seperti udara, air dan pangan
- (f) Mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan agar lebih efektif dan efisien.

## **8.2 Teknik Penyusunan Tata Ruang Desa**

Rencana tata ruang pedesaan yang menjadi bagian dari rencana tata ruang kabupaten. Penataan ruang pada kawasan pedesaan pada suatu wilayah kabupaten dapat dilakukan pada wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten. Rencana tata ruang pedesaan yang berada pada dua wilayah atau lebih pada wilayah kabupaten menjadi alat koordinasi pada pelaksanaan pembangunan yang lintas wilayah. Rencana tata ruang tersebut berisi tentang struktur ruang dan pola ruang yang memiliki sifat lintas wilayah administrasi.

Pemanfaatan ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pedesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten. Untuk kawasan pedesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antar wilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.

Penataan ruang pada kawasan pedesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah dilakukan dengan memanfaatkan kerja sama antar daerah. Ketentuan yang mengatur penataan ruang kawasan pedesaan seperti untuk kawasan agropolitan yang berada dalam satu kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, sedangkan untuk kawasan agropolitan yang berada pada dua atau lebih wilayah diatur dengan peraturan daerah provinsi serta pada kawasan agropolitan pada dua atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.

Penataan ruang kawasan pedesaan diadakan dengan sistem yang terintegrasi dengan kawasan perkotaan yang merupakan bentuk kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Penataan pada kawasan agropolitan diselenggarakan dengan keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional. Keterpaduan yang dimaksud melingkupi sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non-hijau.

### **8.3 Pengendalian Tata Ruang Desa**

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan pedesaan yang sangat cepat tersebut, maka ada upaya sistematis pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan



untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan dan penggunaan sumber daya alam pedesaan dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, upaya pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pedesaan dapat dilakukan dengan beberapa cara atau metode, diantaranya :

a) Penyusunan zonasi kawasan pedesaan

Penyusunan arahan peraturan zonasi kawasan pedesaan merupakan ketentuan yang mengatur mengenai syarat pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya. Dimana peraturan ini disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dilakukan pada rencana detail tata ruang. Kawasan pedesaan yang memiliki lingkup area perencanaan yang sempit dan detil, sehingga sangat memungkinkan disusunnya arahan pemanfaatan ruang sehingga lebih jelas peruntukannya termasuk daerah terlarang untuk dibudidayakan. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana' serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain, adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

b) Pengendalian perizinan

Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan untuk upaya penertiban dalam pemanfaatan ruang. Sehingga pemanfaatan ruang dilakukan sesuai

dengan rencana tata ruang yang sudah ada. Izin dalam pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda.

c) Pemberlakuan insentif dan disinsentif

Insentif diberikan sebagai upaya untuk memberikan imbalan pada pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, baik pada masyarakat maupun pemerintah daerah. Bentuk insentif yang diberikan dapat berupa keringanan pajak, pembangunan infrastruktur, pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan hingga pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai alat untuk mencegah, membatasi dan mengurangi perkembangan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Disinsentif dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan prasarana dan sarana hingga pengenaan saksi atau pinalti. Disinsentif dengan tindakan pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOB) dan nilai jual kena pajak (NJKP) pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

d) Penerapan sanksi

Sanksi diberikan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Dimana sanksi digunakan sebagai alat tindakan penertiban pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang wilayah dan peraturan zonasi.

Sanksi diberikan jika:

- Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah pedesaan;
- Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem ruang pedesaan;

- Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang pedesaan;
- Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan berdasarkan rencana tata ruang pedesaan;
- Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan berdasarkan rencana tata ruang pedesaan;
- Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.



## **BAB IX** **Rencana Pembangunan Desa**

### **9.1 Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Peraturan ini menjamin dengan legal aspirasi masyarakat dalam pembangunan baik dalam kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif), maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi). Aspirasi sesuai kepentingan masyarakat ini disusun melalui perencanaan partisipatif yang juga legal dalam menjamin kedaulatan rakyat dalam berbagai program pembangunan desa. Perencanaan partisipatif yang dipadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis merupakan bentuk nyata dari kerjasama pembangunan masyarakat dan pemerintah.

Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan disetiap desa dan menjadi kewajiban desa sebagai upaya perencanaan pembangunan yang sistematis. Pada awal tahun 2010, program perencanaan sistem pembangunan partisipatis (P2SPP) muncul sebagai awal integrasi program pembangunan dengan melakukan pendekatan teknokratis, politis dan partisipatis. Integrasi dalam perencanaan pembangunan ini kemudian menjadi inti dari pembangunan desa. Setelah dikeluarkannya undang-undang tentang desa yang menonjolkan satu desa, satu perencanaan dan satu penganggaran mulai digunakan, kemudian menghasilkan perencanaan pembanguann desa yang terdokumentasi dalam rencana pembangunan jangka menengah desa, baik dari sisi partisipatif, politis maupun teknokratis.

Dengan kewenangan yang besar terebut desa dalam perkembanganya harus mampu menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan

semua pemangku kepentingan di desa. Pelibatan masyarakat atau partisipasi pembangunan desa sudah dimulai dari program-program pemberdayaan. Program-program pemberdayaan tersebut dijalankan karena ada pandangan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa kurang efektif. Program yang pernah ada semisal Program IDT, P3DT, PPK, PNPM PPK, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan langkah awal dari upaya membangun desa melalui masyarakat atau yang lebih dikenal dengan *community development*. Pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ini pada perkembangannya dirasa cukup efektif sebab dengan melibatkan mereka, pembangunan semakin dekat dengan kebutuhan. Selama ini penggerak pembangunan adalah masyarakat atau dikenal dengan *community driven development (CDD)*, dengan munculnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat memulai tren baru dalam pembangunan dengan memanfaatkan pemerintah desa yang lebih dikenal dengan *village driven development (VDD)*.

Proses perencanaan menjadi titik penting dalam pelaksanaan pembangunan termasuk nilai dalam partisipasi masyarakat. Nilai-nilai dalam partisipasi masyarakat akan membantu penguatan pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desadisenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selin itu, pada undang-undang tersebut menjadi bentuk upaya nyata dari pemerintah untuk memberikan kewajiban yang jelas mengenai perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dimaksud harus melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan untuk mencapai pembangunan ekonomi masyarakat.

Pada tanggal 28 Februari 2019, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP Nomor 11 Tahun 2019 ini mengubah PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019. Dasar hukum PP 11 Tahun 2019 adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015.

Dasar pertimbangan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Dengan pertimbangan tersebut, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015.

Pada turunan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, saat ini desa telah memiliki kewenangan yang cukup besar, antara lain menyusun produk RPJM Desa dan RKP Desa yang harus ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai bentuk perencanaan pembangunan desa. Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, dilakukan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Prinsip dalam perencanaan pembangunan desa antara lain :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah bagian penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa dan dalam penyusunannya wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan

3. Perencanaan pembangunan desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
4. Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat, antara lain :
  - a. Penyelenggaraan pemerintah desa
  - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa
  - c. Keuangan desa
  - d. Profil desa
  - e. Informasi lain terkait pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat

Produk perencanaan yang dikeluarkan oleh desa dalam keterkaitannya dengan perencanaan daerah, dapat digambarkan pada diagram dibawah ini:



Gambar 9. 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran pada Keterkaitan RPJMDesa dengan Perencanaan Daerah (Sumber : Andusti, 2015)

Selain itu, siklus dan jadwal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa juga telah ditetapkan sebagai berikut



*Gambar 9. 2 Siklus Perencanaan Pembangunan Desa (Sumber : Andusti, 2015)*

Berdasarkan siklus tersebut, maka jadwal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa adalah sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan mulai bulan Juni tahun sebelumnya
- b. Siklus perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
- c. Kegiatan pembuatan RPJM Desa sebelum bulan Oktober
- d. Bulan Oktober hingga Desember mengembangkan RPJM Desa dan RKP Desa menjadi dokumen APB Desa
- e. Pelaksanaan APDesa mulai Januari hingga Desember
- f. Pelaporan pelaksanaan APB Desa pada setiap semester yaitu bulan Juli dan Januari

Perubahan pada RPJM Desa dan RKP Desa dapat dilakukan dengan syarat tertentu, antara lain :

- a. Peristiwa khusus : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dana tau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
- b. Perubahan mendasar kebijakan pemerintah, provinsi atau kabupaten/kota



## 9.2 Teknik Penyusunan RPJM Desa

Penyusunan RPJM Desa awalnya didasarkan pada Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, kemudian dilakukan perubahan sehingga penyusunan dilakukan dengan mengikuti Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui forum musyawarah desa RPJM Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dimana hakekat yang direncanakan adalah visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan arah kebijakan umum desa. Hasil forum ini dikeluarkan dalam bentuk RPJM Desa, yang kemudian dibuat produk hukum berupa Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Agenda yang dilakukan dalam musyawarah perencanaan desa-RPJM antara lain :

- a. Pembahasan visi misi
- b. Pembahasan matriks kegiatan 6 tahunan
- c. Memisahkan usulan program berskala desa dan skala kabupaten
- d. Pembahasan draft Raperdes
- e. Penandatanganan berita acara
- f. Memilih delegasi desa untuk forum musrenbang kecamatan

Untuk menjaga agar perencanaan pembangunan desa lebih terarah dan dapat digunakan sebagai pedoman di seluruh desa, maka Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Desa mengatur secara spesifik mengenai proses dan langkah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, yang antara lain :

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa merupakan tim yang dibentuk oleh kepala desa melalui surat keputusan kepala desa. Struktur yang digunakan adalah kepala desa sebagai pembina, sekretaris desa sebagai ketua dan ketua

lembaga pemberdayaan sebagai sekretaris dengan tokoh masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat serta perwakilan perempuan sebagai anggota. Jumlah tim penyusun minimal 7 orang, dan maksimal 11 orang.

2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota

Menyelaraskan arah kebijakan merupakan kegiatan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan desa. Melalui penyalarsan maka perencanaan pembangunan kabupaten/kota akan selaras dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dapat masuk ke dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini perlu karena kegiatan pembangunan didasarkan pada RPJM Desa.

Pembangunan yang perlu dilakukan penyalarsan meliputi :

- (a) Pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota
- (b) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
- (c) Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
- (d) Rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota
- (e) Rencana pembangunan kawasan pedesaan

3. Pengkajian keadaan desa

Pengkajian kondisi desa merupakan proses untuk menilai kondisi desa secara objektif dengan melibatkan masyarakat. Pengkajian keadaan desa dapat menggunakan 3 alat kaji, yaitu kalender musim, peta sosial desa dan diagram kelembagaan. Pada kegiatan ini proses yang perlu dilakukan antara lain penyalarsan data desa, penggalan gagasan dan penyusunan laporan dari penggalan pendapat masyarakat.

Proses penggalan pendapat masyarakat dilakukan pada kelompok masyarakat yang terbentuk di setiap dusun, RT dan RW. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan kebutuhan tersebut dapat di rekapitulasi dalam laporan untuk dilaporkan kepada kepala desa. Sehingga laporan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kepala desa dan perangkatnya dalam musyawarah desa.

4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa

Setelah melakukan rekapitulasi dan dilaporkan kepada kepala desa, maka kepala desa akan menyampaikan pada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) untuk dilakukan pembahasan dalam musyawarah desa dengan memfokuskan dan memprioritaskan arah pembangunan desa secara demokratis dan partisipatif.

5. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Hasil dari musyawarah desa kemudian disusun oleh tim penyusun dalam format penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa dengan menampung hasil musyawarah desa. Kemudian hasil dari laporan tersebut disampaikan kepada kepala desa untuk diperiksa dan diteliti kembali sebelum dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa

Hasil penyusunan rancangan rencana pembangunan desa kemudian dibahas melalui musrenbangdes. Tujuannya adalah untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dan mendapatkan kesepakatan bersama agar dapat ditetapkan dalam Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

7. Penetapan RPJM Desa

Setelah pelaksanaan Musrenbangdes dan ada kesepakatan bersama, maka tim penyusun melakukan revisi sesuai pembahasan yang dilakukan pada musyawarah tersebut. Kemudian kepala desa melakukan pembahasan raperdes mengenai RPJM desa dengan BPD untuk dijadikan sebagai peraturan desa.

Langkah perencanaan pembangunan desa tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan merupakan poin utama dari pelaksanaan pembangunan. Sehingga perlu adanya proses yang panjang untuk menunjukkan bahwa kepala desa dalam mewujudkan visi dan misi harus berjalan dengan melibatkan dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat pada

proses penggalian ide dan pendapat hingga peyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa merupakan bentuk kepedulian kepala desa untuk mewujudkan visi dan misi dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Sehingga pembangunan akan semakin dirasakan oleh masyarakat karena masyarakat dilibatkan dalam proses pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

### **9.3 Teknik Penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagai penjabaran RPJM Desa, maka dibuat Rencana Kerja Pemeirntah Desa (RKP Desa). RKP Desa memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli pada tahun berjalan. RKP Desa merupakan penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Penyusunan RKP ini dilakukan dalam perencanaan tahunan desa melalui penyelenggaraan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dimana hakekat yang direncanakan adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat kegiatan yang didanai APBDesa terutama berdasarkan kewenangan lokal berskala desa. Sehingga bentuk keluarannya adalah RKP Desa dengan bentuk produk hukum berupa peraturan desa tentang RKP desa.

Pada pedoman perencanaan pembangunan desa, langkah-langkah dalam penyusunan RKP desa adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa

Perencanaan pembangunan desa disusun dengan melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dan kepala desa untuk menyusun rencana pembangunan desa. Hasil musyawarah desa dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa. Musyawarah dilakukan dengan meneliti kembali, menyepakati hasil

yang sudah diteliti dokumen RPJM Desa dan membentuk tim verifikasi sesuai kegiatan dan keahlian yang diperlukan.

b. Pembentukan tim penyusun RKP desa

Setelah musyawarah dilakukan, maka dibentuk tim penyusun RKP desa. Tim ini dibentuk oleh kepala desa melalui surat keputusan kepala desa dengan struktur kepala desa sebagai pembina, sekretaris desa sebagai ketua dan ketua lembaga pemberdayaan sebagai sekretaris dengan anggota antara lain tokoh masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat serta perwakilan perempuan. Jumlah tim minimal sebanyak 7 orang dan paling banyak 11 orang. Tugas tim penyusun adalah meneliti kembali pagu indikatof desa dan penyelarasan program yang masuk ke desa, meneliti ulang dokumen RPJM desa, menyusun rancangan RKP Desa dan menyusun rancangan daftar usulan RKP Desa.

c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program yang masuk ke desa

Tim penyusun RKP menganalisa dengan teliti pagu indikatif desa dan melakukan penyelarasan program yang masuk ke desa. Penyelarasan meliputi rencana dana desa yang bersumber dari APBN, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi, rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa

Melakukan pencermatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan upaya identifikasi tahun anggaran selanjutnya sebagai masukan pada penyusunan RKP Desa.

e. Penyusunan rancangan RKP Desa

Penyusunan Rancangan RKP desa wajib menggunakan acuan dan berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah desa, pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, jaring aspirasi

masyarakat yang dilakukan DPRD kabupaten/kota, hasil pencermatan kembali dokumen RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa dan hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa

Hasil rancangan RKP Desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Prioritas pembangunan ditentukan dari hasil evaluasi perencanaan di tahun sebelumnya. Kemudian dari hasil prioritas tersebut dijadikan rencana kerja pembangunan desa.

- g. Penetapan RKP Desa

RKP akan disepakati dalam musrenbang desa, kemudian akan dilakukan revisi pada hasil musyawarah. Kepala desa kemudian menyusun raperdes RKP desa dan hasil pembahasan RKP yang telah direvisi menjadi lampiran peraturan desa.

- h. Pengajuan daftar usulan RKP Desa

Setelah dilakukan penetapan RKP melalui perdes, maka daftar usulan akan diserahkan ke kecamatan sebagai materi pembahasan dalam musrenbang kecamatan dan kabupaten. Hasil pembahasan akan diinformasikan untuk kegiatan atau program di tahun selanjutnya.

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu kunci dari keberhasilan tujuan pembangunan adalah sejauh mana perencanaan pembangunan dilakukan. Dalam Undang undang desa no 06 Tahun 2014 tentang desa sudah diharuskan dan menjadi prasarat penerimaan dana desa maka desa harus membuat perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RPJM desa ini merupakan penjabaran visi misi Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Selain hal tersebut diatas perencanaan juga sebagai upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan anatara perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota Dengan demikian diharapkan

konsep 1 (satu) Desa, 1 (Satu) perencanaan dan 1 (satu) penganggaran dapat terwujud.

Sebagai bentuk pengawasan, pemantauan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota. Pemantauan oleh masyarakat dilakukan pada tahapan berikut :

- a. Tahapan Perencanaan, menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dengan form 1

**PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA** M.3.1.6

Tanggal Desa : ..... Kabupaten/Kota : ..... Provinsi : .....

Kecamatan : .....

No.	Kegiatan/ Dokumen yang dipantau	Dilaksanakan/ dokumen	Tidak dilaksanakan/ tidak ada dokumen	Keterangan (penjelasan bila tidak dilaksanakan)
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa			
2	Pendataan potensi dan masalah di Desa			
3	Dokumen rekapitulasi gagasan dasar			
4	Laporan hasil pengajian kondisi Desa			
5	Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa			
6	Rancangan RPJM Desa			
7	Musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan RPJM Desa			
8	Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa			
9	Dokumen pagu indikatif desa			
10	Rancangan RKP Desa			
11	Proposal Teknis dan kelengkapannya			
12	Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis			
13	Daftar usulan RKP Desa			
14	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa			
15	Berita acara Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa			

Mengetahui,  
Kepala Desa

Tim Pemantau Masyarakat

**Seterangan pengisian:**  
 .Jtituk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan  
 .Jtituk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen

Gambar 9. 3 Format Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa (Sumber : Andusti, 2015)

- b. Tahap Pelaksanaan, menilai pengadaan (barang/jasa, bahan/material. Tenaga kerja), pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah dan kualitas hasil kegiatan.

Sedangkan untuk pemantauan oleh pemerintah kabupaten/kota , yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memantau dan mengawasi rencana pelaksanaan pembangunan desa
- b. Umpan balik terhadap laporan reaksi pelaksanaan APBDesa
- c. Evaluasi progress kegiatan perencanaan
- d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan rencana pelaksanaan
- e. Terbitkan surat peringatan
- f. Pembinaan dan pendampingan percepatan perencanaan untuk memastikan penetapan (31 Desember) dan penyerapan APBDesa



### **10.1 Konsep *Natural Capital* dalam Pengembangan Desa**

*Natural capital* atau modal alami adalah sebuah konsep yang mengakui pentingnya nilai barang dan jasa yang disediakan oleh alam. Memang terkadang jasa ekosistem dapat dihitung nilainya. Misalnya biaya mengubah pohon menjadi kertas dan menghitung biaya produksi dan penggunaan pabrik. Namun, beberapa jasa ekosistem yang diberikan alam sifatnya tidak ternilai dan tidak terukur, misalnya udara bersih yang dihirup manusia.

Pendekatan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood approach*) mengasumsikan bahwa kehidupan masyarakat mempunyai banyak tujuan (*multiple objectives*), tidak hanya untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi tetapi juga meningkatkan kesehatan dan pendidikan, serta mengurangi kerentanan dan resiko (Saleh, 2015). Oleh karenanya *sustainable livelihood approach (SLA)* menekankan keberfungsian pada lima asset masyarakat yaitu *natural capital, infrastructure/physical capital/man-made capital, human capital, financial capital, and social capital*, yang saling melengkapi untuk meningkatkan ketahanan sosial ketika terjadi guncangan terhadap sistem penghidupan (DFID,1999).

Senada dengan pemahaman diatas, Daly (1990) menambahkan beberapa aspek mengenai definisi operasional pembangunan berkelanjutan, antara lain:

- a. Untuk sumber daya alam yang terbarukan : laju pemanenan harus sama dengan laju regenerasi (produksi lestari)
- b. Untuk masalah lingkungan : laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan



- c. Sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara *quasisustainable*, yakni mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi

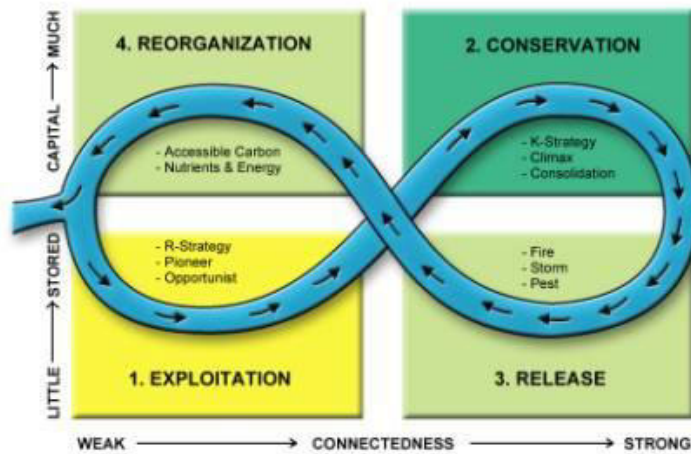
Selain definisi operasional diatas, Haris (2000) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman:

- a. Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
- b. Keberlanjutan lingkungan merupakan sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
- c. Keberlanjutan sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Dalam sisi skala waktu pemanfaatan relatif terhadap siklus regenerasi atau pemulihan sediaan, sumberdaya alam biasanya dikelompokkan menjadi dua kategori: Sumberdaya tidak pulih dan sumberdaya pulih (Tietenberg, 2000, Hussen, 2000). Keduanya memiliki karakteristik yang spesifik, sehingga, bila konsep sumberdaya sebagai “bahan bakar” pembangunan pola pemanfaatnya menjadi kunci dari suatu pembangunan yang berkelanjutan. Sumberdaya yang tak pulih adalah sumberdaya yang laju pemulihannya sangat lambat sehingga sumberdaya tersebut tidak dapat memulihkan stok/sediaannya dalam waktu yang ekonomis (Conrad, 1999, Tietenberg, 2000). Sumberdaya pulih dibedakan dengan sumberdaya tak pulih berdasarkan pada kemampuan pemulihan alami yang dimiliki sumberdaya ini yang lajunya tak dapat diabaikan. Di samping itu, siklus pemulihan ini dapat kembali memperbesar jumlah sediaan yang

berkurang akibat pemanfaatannya (Tietenberg, 2000) . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, meskipun terbatas, aliran pemanfaatan sumberdaya ini dapat dipertahankan secara terus menerus. Volume dan kelanjutan aliran pemanfaatan beberapa siklus sumberdaya alam yang pulih sangat tergantung pada manusia.

Tietenberg (2000) menyatakan bahwa sumberdaya pulih memiliki keterbatasan dalam siklus pemulihan itu sendiri. Holling (1997) mengungkapkan bahwa keberlanjutan sistem ekologis harus menjadi pertimbangan utama karena hal ini berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya (pulih) tersebut. Holling (1997) lebih lanjut mengelaborasi konsep fungsionalitas dari sistem ekologis ini dengan siklus pemulihan sumberdaya pulih tersebut. Konsep fungsionalitas ekosistem tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 10. 1 Fungsionalitas Sistem Ekologi (Holling et al., 1997)

Dalam model ini, suatu sistem akan mengikuti suatu alur dimana sistem tersebut berubah dari tahap eksploitasi, dimana pada tahap ini kolonisasi terjadi setelah suksesi terjadi dalam suatu lokasi sistem yang terganggu (*disturbed*) atau lokasi yang baru (pionir), ke tahap konservasi. Dalam tahap konservasi sistem telah mencapai tahap klimaks dan memerlukan suatu konsolidasi. Setelah tahap konservasi, sumberdaya menjadi berlimpah dan struktur biomas menjadi “dewasa” sehingga dapat melepaskan akumulasi energi

dan nutrisi yang ada dalam ambang. Nutrien dan energi yang dilepaskan kemudian tersedia bagi tahap eksploitasi selanjutnya (Holling *et al.*, 1997).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kedua karakter tersebut berpengaruh pada ketersediaan sumberdaya sebagai *natural capital stock* yang menjadi bahan bakar pembangunan. Mempertahankan sediaan kapital alami memiliki makna yang beragam. Konsep ini dapat diterapkan pada sumberdaya pulih. Bagi sumberdaya tak pulih, konsep ini tidak relevan, karena pada laju pemanfaatan positif dengan nilai minimum sekalipun akan mengurangi cadangan/sediaan sumberdaya alam. Pengelolaan sumberdaya pulih memiliki tantangan yang berbeda dengan pengelolaan sumberdaya tak pulih. Dalam pemanfaatan sumberdaya tak pulih, tantangan terbesar terletak pada alokasi sediaan yang terus menerus berkurang dari satu generasi ke generasi lain sebelum mencapai transisi kepada kepulihan sumberdaya tersebut. Di lain pihak, pengelolaan sumberdaya alam pulih mencakup pemeliharaan aliran sumberdaya alam yang berkelanjutan secara efisien. Dengan demikian, dalam pengelolaan sumberdaya pulih siklus regenerasi sediaan cadangan tersebut menjadi penting.

## **10.2 Permasalahan dan Pengelolaan *Natural Capital* dalam Perencanaan Desa**

Suatu pembangunan, agar dapat berkelanjutan, memiliki suatu persyaratan minimum yaitu bahwa sediaan kapital alami (*natural capital stock*) harus dipertahankan sehingga kualitas dan kuantitasnya tidak menurun dalam suatu rentang waktu (Pearce, 1992). Pemanfaatan sumberdaya alam sebagai *natural capital* adalah suatu proses substraksi dan/atau penambahan materi dari dan kepada sistem alam (Gunawan, 1994). Proses ini kemudian menyebabkan perubahan ke dalam setiap komponen sistem alam tersebut yang berakibat pada perubahan kondisi alami dari sumberdaya.

Konsep *sustainable livelihood approach (SLA)* dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini pun banyak mengalami kendala. Perman *et al.*, (1997) mencoba mengelaborasi lebih

lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan 5 lima alternatif pengertian:

- a. Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (*sustainable*) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (*non-declining consumption*),
- b. keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang,
- c. keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (*natural capital stock*) tidak berkurang sepanjang waktu (*nondeclining*),
- d. keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan
- e. keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi.

Sach dan Warner (1995) menyatakan bahwa sejarah mencatat bahwa kelimpahan SDA suatu negara seringkali justru menjerumuskan negara tersebut dalam jurang kemiskinan yang dalam. Hampir tak ada teladan yang bisa dirujuk negara yang kaya SDA bisa menjadi bangsa yang makmur. Karena itu, pelaksanaan UU Desa secara konsisten dan terarah diharapkan mampu menciptakan terwujudnya desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Dan itulah prototipe imajinasi tentang desa baru yang ditegaskan oleh UU Desa sebagai arah perubahan desa berkelanjutan pada masa depan.

Semua itu bisa dimulai dari tumbuhnya kemandirian desa yang kuat. Komitmen membangun Indonesia dari pinggiran harus dimaknai dalam kerangka dan garis filosofis portofolio kebangkitan desa. Basis argumentasi yang kita bangun adalah bahwa desa merupakan entitas dan sekaligus basis penghidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Tetapi selama ini kebijakan pembangunan dan desentralisasi kurang secara serius berpihak dan responsif terhadap desa, sehingga yang terjadi desa hanya menjadi subyek dari supra desa.

Sumber daya alam yang ada merupakan salah satu sumber penting dari pembiayaan pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang ada saat ini belum memenuhi prinsip keadilan dan berkelanjutan. Kondisi lingkungan hidup yang tercemar akibat eksploitasi sumber daya alam dan aktivitas manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

Permasalahan pokok yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang pertama adalah keterbatasan data dan informasi dalam kuantitas maupun kualitas. Terbatasnya data dan informasi yang akurat mempengaruhi kegiatan pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup agar siklus berjalan dengan baik. Selain itu, transparansi dalam sistem pengelolaan informasi belum menjadi kebiasaan yang baik di kelembagaan, sehingga masyarakat kurang mendapatkan akses terhadap data dan informasi yang memadai. Permasalahan pokok yang kedua adalah pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam yang kurang efektif sehingga menimbulkan dampak kerusakan sumber daya alam. Kondisi ini diawali dengan pengambilan terumbu karang, pemboman ikan, perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan dan pertambangan ilegal. Permasalahan yang ketiga adalah pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik (*transgenik*) yang belum jelas sehingga mengancam keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia serta terjadi ketergantungan yang tinggi pada sumber daya tidak terbarukan misalnya fosil.

Selain permasalahan diatas, tingkat kualitas hidup di darat, air dan udara berada pada titik yang rendah. Misalnya saja tingginya tingkat pencemaran lingkungan dari limbah industri yang terjadi dikawasan perkotaan hingga di kawasan pedesaan serta terdapat kegiatan transportasi dan rumah tangga yang menggunakan bahan berbahaya beracun (B3) ataupun non-B3. Tingkat ketergantungan energi yang tinggi pada sumber daya fosil merupakan masalah penting yang menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan memberikan dampak signifikan pada kenaikan permukaan air laut, perubahan iklim lokal, pola curah hujan, terjadinya hujan asam, belum tergantikannya

bahan perusak lapisan ozon (BPO) seperti *chloro fluoro carbon (CFC)*, halon dan metil bromida, serta masih kurangnya pemahaman dan penerapan agenda21 di level lokal dan nasional.

Prinsip berkelanjutan mengintegrasikan tiga aspek yaitu ekologi, ekonomi dan sosial budaya yang belum diterapkan di banyak sektor pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi saat ini, pembiayaan lingkungan belum dimasukkan kedalam biaya produksi. Selain itu, tidak ada penerapan insentif bagi pemasaran produk yang ramah lingkungan (*green product*). Sehingga produk ramah lingkungan tidak dapat bersaing dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia yang masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Program sukarela seperti ISO 14000 dan *eco-labeling* belum banyak diterapkan oleh sektor industri, atau bahkan masih belum dianggap sebagai bentuk peningkatan efisiensi perusahaan.

Masalah-masalah yang ada tersebut muncul dikarenakan rendahnya kapasitas kelembagaan, belum kokohnya peraturan perundangan serta lemahnya penataan dan penegakan hukum dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum memiliki kejelasan. Hal ini dikarenakan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam peraturan pelaksanaan belum rinci dan lengkap. Selain itu faktor sumber daya manusia yang kurang berkualitas juga menjadi kendala dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Akses masyarakat terhadap data dan informasi sumber daya alam yang terbatas mengakibatkan peran masyarakat ikut terbatas dalam mengelola sumber daya alam dan berperan dalam pelestarian lingkungan hidup. Lemahnya pengawasan, keterlibatan masyarakat serta penegakan hukum dalam mengelola sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu permasalahan penting yang mengakibatkan hak masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam menjadi terbatas dan sering terjadi konflik. Wanita yang berperan sebagai kelompok rentan dalam masalah pencemaran lingkungan tidak banyak diberdayakan. Kearifan lokal

dalam pelestarian lingkungan hidup harus selalu dijaga, termasuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai prinsip pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang harus selalu ditingkatkan.

Sesuai dengan permasalahan dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup diatas, maka dapat dibuat beberapa strategi kebijakan, antara lain :

1. Melakukan integrasi prinsip berkelanjutan antara bidang ekonomi, ekologi dan sosial dalam memanfaatkan sumber daya alam
2. Memunculkan rasa tanggung jawab sosial dan penerapan eko-efisiensi di perusahaan dengan mengintegrasikan biaya lingkungan dan biaya sosial terhadap biaya produksi
3. Menerapkan teknologi yang terbaik untuk kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjamik keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi, hal ini juga perlu didukung kepastian hukum atas kepemilikan dan pengelolaan
5. Menata kelembagaan, termasuk dengan mendelegasikan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap kepada pemerintah daerah
6. Melakukan pembenahan pada sistem hukum agar tercipta sistem hukum yang responsif dan didasari prinsip keterpaduan, pengakuan hak-hak asasi manusia serta keseimbangan ekologis, ekonomis dan pengarusutamaan gender
7. Melakukan reorientasi paradigma pembangunan yang mengakui hak publik terhadap pengelolaan sumber daya alam
8. Mendorong budaya yang berwawasan lingkungan melalui revitalisasi budaya lokal dan menumbuhkan etika lingkungan pada sektor pendidikan dan lingkungan masyarakat
9. Mengembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam

Untuk melaksanakan strategi kebijakan diatas, langkah yang perlu dilakukan harus berpedoman pada program pokok yang ditetapkan, yaitu :

1. Program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Program peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam
3. Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
4. Program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
5. Program peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup

Program-program tersebut merupakan program yang berkaitan satu sama lain dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi dengan kualitas lingkungan hidup yang semaik meningkat.





## **BAB XI MODEL PENGEMBANGAN DESA**

### **11.1 Model Pengembangan Desa Wisata**

Menurut Pitana (2005) desa wisata merupakan wilayah pedesaan dengan suasana yang keseluruhannya mencerminkan keaslian suasana desa dalam struktur ruang, arsitektur bangunan, maupun kehidupan sosial-budaya masyarakatnya, serta mampu menyediakan komponen-komponen kebutuhan pokok seperti akomodasi, makanan dan minuman, cinderamata, dan atraksi-atraksi wisata bagi wisatawan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada pelaksanaan kegiatan wisata, masyarakat yang berada di kawasan wisata ikut mendapatkan peran. Adapun setiap orang yang berada di dalam dan disekitar kawasan destinasi wisata memiliki hal prioritas untuk menjadi pekerja atau buruh, berkongsi dan melakukan pengelolaan.

Desa wisata dalam pelaksanaan pembangunannya membutuhkan peranan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan tersebut berkelanjutan agar desa wisata dapat dikembangkan. Pengembangan desa wisata harus memperhatikan kemampuan dan tingkat penerimaan dari masyarakat yang akan dikembangkan juga. Desa wisata merupakan salah satu alternatif dari pariwisata yang dengan kehidupan masyarakat sebagai daya tarik yang ditawarkan.

Pengembangan desa wisata yang baik adalah pengembangan yang mengutamakan masyarakat sebagai unsur pembangun utama. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan pengembangan pariwisata dengan tingkat keterlibatan masyarakat setempat yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup. Menurut

Harris dan Vogel (2004) kegiatan pariwisata yang berbasis masyarakat dapat memberikan kontribusi dan perlindungan intensif bagi alam dan budaya. Selain itu, hal tersebut juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga konsep pariwisata berbasis masyarakat dapat dikatakan ada jika keputusan mengenai aktivitas wisata dan pengembangannya dikendalikan oleh masyarakat. Permanasari (2011) menyatakan bahwa konsep desa wisata dalam pengembangannya memiliki dua komponen utama yaitu; (1) komponen akomodasi, komponen ini terdiri dari tempat tinggal penduduk atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk; (2) komponen atraksi, komponen ini meliputi keseluruhan kehidupan keseharian penduduk setempat beserta pengaturan fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan yang ditunjukkan dengan partisipasi aktif seperti bahasa, membuat ukiran, membatik, memenun, dll. Selain manfaat dari kedatangan wisatawan, manfaat lain yang dapat diterima oleh masyarakat lokal adalah mereka dapat menjaga dan mempertahankan budaya lokal serta pelestarian alam di wilayah setempat yang menjadi modal utama bagi masyarakat lokal.

### **11.2 Model Pengembangan Desa Pesisir**

Pada pembangunan desa pesisir terdapat beberapa isu kritis yang terbagi pada sektor ekologi, sosial, ekonomi, agraria dan geopolitik.

Pada sektor ekologi, baik yang alami maupun antropogenik, kerusakan ekologis dapat dilihat dari kejadian bencana alam seperti tsunami, angin topan, elnino dan gempa. Pemanasan global termasuk salah satu faktor yang memberikan pengaruh pada perubahan ekologi desa pesisir. Kerusakan alami terjadi diluar kontrol manusia sehingga yang dapat dilakukan adalah upaya untuk meminimalkan dampak bencana alam. Selain itu kerusakan ekologi antropogenik merupakan kerusakan ekologis yang merupakan akibat perbuatan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Kerusakan ekologi yang bersifat langsung misalnya praktek penangkapan ikan yang destruktif, pencemaran serta erosi pantai akibat pembabatan mangrove. Sedangkan

contoh kerusakan ekologis yang bersifat tidak langsung adalah sedimentasi akibat aktivitas hulu yang tidak menjaga kelestarian lingkungan.

Pada sektor sosial, isu yang terkait adalah struktur sosial, budaya dan politik. Menurut pendapat Scott (1993), hubungan merupakan fenomena yang terbentuk karena perbedaan dan sifat fleksibilitas yang dipraktekkan dalam sebuah sistem individu, sehingga ada arus pertukaran dari patron-klien dan sebaliknya. Hal ini mencakup (1) penghidupan substensi dasar seperti pekerjaan tetap, jasa pemasaran dan bantuan teknis, (2) jaminan krisis subsistensi, misalnya berupa pinjaman yang diberikan saat klien mengalami kesulitan ekonomi, (3) perlindungan terhadap klien baik dari ancaman pribadi maupun umum seperti pejabat atau pemungut pajak, (4) memberikan jasa kolektif dengan memberikan bantuan untuk mendukung fasilitas umum, misallnya sekolah, tempat ibadan, jalan dan fasilitas lainnya. Untuk arus dari klien ke patron menurut Scott (1993) sulit untuk dibagi menjadi kategori. Hal ini dikarenakan klien merupakan bawahan dari patron, dimana klien menyediakan tenaga dan keahlian untuk kepentingan patron. Bentuk tenaga dan keahlian yang diberikan misalnya jasa pekerjaan dasarm jasa tambahan bagi rumah tangga patron, jasa domestik pribadi ataupun klien yang merupakan anggota yang loyal terhadap patron.

Isu ekonomi pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir. Perekonomian di desa pesisir meliputi perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan), ekstraktif (pasir laut), pariwisata, industri garam ,pelabuhan dan transportasi serta perdagangan. Potensi sumber daya tersebut dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, namun kebijakan kelautan pemerintah belum ada perkembangan peluang dalam keberpihakan pada pengembangan ekonomi yang berbasis sumber daya pesisir dan lautan. Menurut Kusumastanto (2003), kebijakan pembangunan ekonomi tidak memberi keberpihakan kepada masyarakat pesisir, akibatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi terhambat dan terjebak dalam kondisi kemiskinan.

Pada isu agraria, permasalahan penting yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah struktur agraria di desa pesisir mengalami ketimpangan. Isu agraria di desa pesisir terbagi menjadi dua, yaitu isu agraria di kawasan pesisir di pulau besar (*mainland*) dan isu agraria di kawasan pesisir di pulau kecil (*small island*). Desa pesisir di pulau besar memiliki isu kritis yang muncul, antara lain status lahan permukiman, pola penguasaan area pertambakan, pola penguasaan lahan untuk produksi garam dan mangrove. Permasalahan utama dari isu tersebut adalah ada subjek tertentu yang dominan dalam penguasaan lahan terbut. Masalah selanjutnya adalah permasalahan reklamasi dan konflik spasial yang pada umumnya dikaitkan dengan subjek yang paling mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut.

**Tabel 11. 1 Isu-Isu Agraria di Desa Pesisir-Pulau-Pulau Besar**

<b>Sumber Agraria</b>	<b>Isu Aktual</b>
Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Status lahan pemukiman, tambak, garam, mangrove</li> <li>● Reklamasi, abrasi, konflik spasial</li> </ul>
Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Overfishing, polusi, kerusakan ekosistem</i></li> <li>● Hak pengelolaan sumberdaya laut oleh masyarakat</li> </ul>

Sumber : Satria (2006)

Isu selanjutnya adalah isu geopolitik, dimana desa pesisir merupakan wilayah daratan yang berbatasan dengan wilayah lain. Sehingga desa pesisir rentan terhadap gangguan keamanan secara politik maupun ekonomi. Gangguan secara politik ditunjukkan dengan rentannya pengaruh asing yang mempengaruhi rasa nasionalisme pada pulau-pulau kecil di perbatasan. Misalnya pada kasus yang terjadi di Miangas yang sudah mulai terjadi budaya dan spirit kebangsaan negara Filipina. Sedangkan secara ekonomi, gangguan terlihat pada aktivitas yang ilegal, baik dalam sektor pertambangan, perikanan dan perdagangan.

### **11.3 Model Pengembangan Desa Agropolitan**

Agropolitan atau kota pertanian merupakan kawasan penghasil dan pemasok produk pertanian, dimana kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar pada mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat. Kota pertanian ini dapat berbentuk kota menengah atau kota kecil, kota kecamatan atau kota pedesaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Sehingga hal ini mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan desa dan desa-desa *hinterland*. Adanya pengembangan ekonomi pada sektor pertanian ini tidak dibatasi sebagai pusat pelayanan sektor pertanian, namun juga pembangunan sektor secara menyeluruh, seperti usaha pertanian (*on farm dan off-farm*), industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan dan lain-lain.

Pengertian kawasan agropolitan merupakan jaringan ruang yang secara fungsional mendorong terbentuknya kegiatan usaha yang berbasis pada agribisnis. Kawasan ini memiliki kegiatan utama pada bidang pertanian dengan fungsi kawasan tersusun sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Program dalam pengembangan kawasan agropolitan merupakan pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian di kawasan agribisnis. Dimana kawasan ini didesain dan dilaksanakan dengan mensinergikan potensi yang dimiliki untuk berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang memiliki daya saing, kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Kegiatan akan digerakkan oleh masyarakat dengan fasilitas dari pemerintah.



## BAB XII TATA CARA SURVEI DAN OBSERVASI PEDESAAN

### 12.1 Metode Identifikasi Potensi dan Masalah

Identifikasi potensi dan masalah pada umumnya menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*). PRA dimaksudkan untuk mengembangkan “partisipasi” masyarakat (diterjemahkan sebagai “keikutsertaan” masyarakat). Program ini bukan dirancang oleh orang luar kemudian masyarakat diminta untuk melaksanakan, tetapi program ini dirancang oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh orang luar. Dengan pemikiran ini, aktivitas pembangunan selalu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Metode dan teknik-teknik PRA tidak hanya sesuai untuk diterapkan di daerah rural atau desa, tetapi juga di daerah kota atau daerah pertemuan antara desa dan kota. Dengan demikian akan lebih tepat apabila PRA mencantumkan “*kajian masyarakat*” daripada “*kajian desa*”. PRA mengandung aspek “*appraisal*” atau “*penelitian*”. Metode PRA memang mengembangkan teknik-teknik kajian masyarakat, tetapi metode PRA sendiri bukanlah metode penelitian yang menekankan pada penggunaan teknik-teknik PRA untuk mengumpulkan data. Metode ini merupakan metode pembelajaran masyarakat. Karena tujuan praktis kegiatan pengkajian dengan menggunakan teknik-teknik PRA adalah untuk pengembangan program.

Disamping itu, pengertian PRA diatas, terdapat pula beberapa pendekatan lain yang bersifat partisipatif :

- PALM: *Participatory Learning Methods* (Metode-metode Belajar secara Partisipatif)
- PLA : *Participatory Learning and Action* (Belajar dan Bertindak secara Partisipatif)

Walaupun tidak persis sama, inti pendekatan-pendekatan tersebut dengan PRA sama, yaitu suatu proses pembelajaran partisipatif. Suatu

pendekatan yang memang berbeda dengan PRA adalah RRA (Rapid Rural Appraisal / Pemahaman Desa secara Tepat). Perbedaan-perbedaan utama meliputi:

**Tabel 12. 1 Perbedaan Antara RRA dan PRA**

<b>Sifat Proses</b>	<b>RRA</b>	<b>PRA</b>
Cara melakukan	Penggalian/ pengumpulan informasi	Saling berbagi-pemberdayaan
Peran orang luar	Penyelidik	Fasilitator
Informasi dimiliki, dianalisa dan digunakan oleh	Orang luar	Masyarakat setempat
Hasil jangka panjang	Perencanaan proyek, publikasi	Kelembagaan dan tindakan masyarakat lokal yang berkelanjutan

Secara garis besar latar belakang pengembangan metode PRA adalah :

1. Kebutuhan adanya metode kajian keadaan masyarakat yang “mudah” dilakukan untuk pengembangan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
2. Kebutuhan adanya pendekatan program pembangunan yang bersifat kemanusiaan dan berkelanjutan.

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip PRA :

1. Mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan)
2. Pemberdayaan (penguatan) masyarakat
3. Masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai fasilitator
4. Saling belajar dan menghargai perbedaan
5. Santai dan informal
6. Triangulasi
7. Mengoptimalkan hasil
8. Orientasi praktis
9. Keberlanjutan dan selang waktu
10. Belajar dari kesalahan
11. Terbuka

Cita-cita pendekatan PRA adalah perubahan sosial dan pemberdayaan (pengutn) masyarakat agar ketimpangan itu ditiadakan atau dikurangi. Kesejahteraan seharusnya dinikmati secara adil dan merata. Beberapa catatan penting mengenai hal ini adalah:

- Pemberdayaan masyarakat sebagai perubah perilaku serta perubahan sosial.
- Pendidikan masyarakat sebagai pendidikan orang dewasa.

Dua Tujuan Utama Metode PRA :

1. Tujuan Praktis (tujuan jangka pendek) adalah :

Menyelenggarakan kegiatan bersama masyarakat untuk mengupayaka pemenuhan kebutuhan praktis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai sarana proses belajar tersebut.

2. Tujuan Strategis (Tujuan Jangka Panjang) adalah :

Membawa visi diatas yaitu mencapai pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial melalui pengembangan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran.

PRA merupakan kesimpulan teknik atau perangkat yang dapat digunakan untuk mengkaji keadaan di pedesaan. Teknik ini berupa visual (gambar, tabel, bentuk) yang dibuat oleh masyarakat dan digunakan sebagai media diskusi masyarakat mengenai kondisi masyarakat sendiri dan lingkungannya. Teknik yang sering digunakan seperti :

1. Profil Keluarga.
2. Kajian Mata Pencaharian.
3. Bagan Arus Masukan dan Keluaran.
4. Diagram Venn.
5. Pemetaan Desa.
6. Transek (penelusuran desa).
7. Bagan Peringkat.
8. Sketsa Kebun.
9. Kalender Musim



## 10. Penelusuran Alur Sejarah Lokasi/Desa

## 11. Bagan Perubahan dan Kecenderungan

Selain jenis teknik diatas, teknik PRA sebenarnya telah memiliki banyak jenis lain. PRA pada umumnya diawali dengan sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat dan aparat desa yang telah memiliki pengertian yang baik pada pendekatan partisipatif ini menjadi komponen yang penting. Kualitas informasi yang didapatkan dari PRA pada umumnya tinggi, namun memiliki kuantitas yang rendah. Informasi yang didapatkan pada umumnya tidak seratus persen benar, namun informasi tersebut cenderung mendekati benar. Sehingga perlu memanfaatkan prinsip triangulasi atau pengecekan kembali dan pemeriksaan ulang.

Tahapan yang dilalui dalam proses kajian pedesaan partisipatif antara lain :

### A. Persiapan Desa

Persiapan desa merupakan tahapan penting yang menunjang kelancaran proses pelaksanaan kajian. Persiapan diawali dengan proses sosialisasi, sehingga masyarakat diharapkan telah memahami maksud dan tujuan pemberdayaan serta masyarakat memiliki kepercayaan, keterbukaan dan suasana yang akrab antara masyarakat dan pendamping. Salah satu fase dalam sosialisasi adalah kegiatan PRA, dimana pada kegiatan tersebut sudah menyepakati tentang :

#### 1. Tempat

Pada umumnya masyarakat mengatur penyediaan lokasi untuk pertemuan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

- Luasnya tempat (cukup luas untuk semua peserta).
- Tempatnya sesuai kondisi cuaca
- Tempat mudah dicapai untuk seluruh masyarakat serta fasilitator
- Tempat cocok untuk teknik PRA yang mau dipakai.

## 2. Waktu

Waktu dalam pelaksanaan kajian keadaan pedesaan didasarkan kesepakatan masyarakat. Pada umumnya masyarakat tidak dapat mengikuti kegiatan sepanjang hari karena kendala hal atau pekerjaan lain. Pelaksanaan PRA memerlukan banyak waktu dan kesabaran dari masyarakat dan fasilitator. Kajian keadaan pedesaan umumnya dilakukan lebih dari satu kegiatan dan memerlukan beberapa kali pertemuan. Beberapa kemungkinan dalam pelaksanaan PRA adalah dilakukan dalam bentuk lokakarya selama beberapa hari, misalnya 3-5 hari atau dilakukan bertahap sesuai kesepakatan dengan melakukan satu kali seminggu selama beberapa minggu, misalnya 5 minggu setiap hari sabtu.

Faktor utama adalah kontinuitas agar masyarakat tidak jenuh. Apabila dilakukan dalam bentuk lokakarya, pada umumnya yang terjadi adalah kondisi komunitas baik, namun masyarakat biasanya terbebani dengan kehadiran yang harus dilakukan terus menerus. Melalui lokakarya biasanya hasil yang didapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih konkrit dan dapat dilakukan proses pengembangan kelompok serta perencanaan kegiatan. Sedangkan apabila dilakukan dengan bertahap, hasil yang didapatkan lebih lama. Selain itu masyarakat akan mengalami kebosanan karena hasil yang didapatkan harus melalui beberapa pertemuan. Sosialisasi dalam pemberdayaan yang baik dapat menghindari suasana kebosanan, sehingga apabila dilakukan bertahap maka kegiatan tidak boleh tertunda. Hal ini dikarenakan apabila pemberdayaan secara bertahap dilakukan pada desa yang memiliki kondisi sosial-budaya yang kuat, pada umumnya akan muncul hal yang tidak terencana sehingga dapat menunda jadwal dari kesepakatan awal.

## 3. Pengumuman/Undangan

Rencana untuk mengikuti kegiatan PRA perlu melibatkan seluruh masyarakat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir saat

sosialisasi. Masyarakat perempuan juga dihadirkan dan dilibatkan dalam pengkajian PRA, hal ini dikarenakan pada umumnya kepekaan mengenai peran perempuan masih kurang dan dianggap tidak penting.

#### 4. Akomodasi dan Konsumsi

Tim fasilitator pada umumnya merupakan orang diluar komunitas masyarakat yang akan direncanakan, sehingga harus dipersiapkan mengenai ketersediaan dan akomodasi serta biaya yang akan dikeluarkan.

#### B. Persiapan dalam Tim

Kajian kondisi pedesaan secara partisipatif pada umumnya dilakukan oleh fasilitator yang dibentuk oleh lembaga pengembang. Anggota dari tim fasilitator terdiri dari orang luar (dari lembaga pengembang) dan juga orang dalam (wakil/tokoh masyarakat) yang terdiri dari pria atau wanita yang memiliki beragam disiplin ilmu. Tim dalam kajian kondisi pedesaan secara partisipatif dapat terdiri dari minimal 3 orang dengan mengutamakan kekompakan dan sebagai subjek penentu dari kelancaran proses kajian.

Persiapan untuk tim ini penting dalam kelancaran pelaksanaan kajian di pedesaan. Persiapan yang baik akan meminimalisasi timbulnya kebosanan di masyarakat, konflik antar fasilitator dan kebingungan di masyarakat. Isu penting yang perlu dibahas pada persiapan tim antara lain :

##### 1. Menentukan informasi yang akan dikaji

Informasi yang digali disesuaikan dengan tujuan PRA, dimana tujuannya sangat umum (pemberdayaan masyarakat) atau dikaitkan dengan isu yang sedang dihadapi saat itu. Sesuai dengan tujuan dan hasil dari kesepakatan masyarakat maka akan diputuskan informasi yang akan dikaji. Tim fasilitator perlu memperhatikan mengenai kualitas dari informasi yang berhasil dikumpulkan.

2. Menentukan teknik PRA yang akan dipakai

Berdasarkan informasi yang didapatkan, maka akan ditentukan teknik yang akan digunakan. Pada umumnya teknik yang digunakan adalah pemetaan desa, kalender musim dan alur sejarah desa. Penambahan teknik lainnya dapat dilakukan sesuai dengan tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan

3. Menentukan dan menyediakan bahan pendukung dan PRA

Media dan bahan pendukung yang diperlukan akan disesuaikan dengan teknik yang digunakan. Bahan pendukung dapat berupa kertas, papan, spidol, kapur tulis dan lain-lain. Sedangkan bahan lokal dapat menggunakan batuan, daun, biji dan lain-lain. Pilihan bahan dan media disesuaikan dengan kondisi dan dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi kejenuhan masyarakat

4. Pembagian tugas dalam tim kajian pedesaan yang partisipatif

Pembagian tugas dalam penerapan PRA dilakukan pada masing-masing anggota, pada umumnya tugas yang diberikan antara lain :

- Fasilitator yang berperan sebagai pemandu diskusi bertugas untuk membangun proses diskusi, mendorong masyarakat untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman
- Fasilitator ada yang berperan sebagai pendamping dengan membantu pemandu diskusi untuk menjaga proses agar tujuan tercapai. Misalnya dengan melibatkan peserta pasif dan mengatasi peserta yang terlalu dominan
- Fasilitator sebagai pencatat atau notulensi untuk melakukan pencatatan sebagai bentuk dokumentasi proses dan hasil diskusi
- Fasilitator sebagai penerjemah untuk membantu anggota tim yang tidak menguasai bahasa daerah apabila diperlukan

C. Kegiatan PRA

Kajian kondisi desa secara partisipatif melalui PRA merupakan pendekatan dimana masyarakat mengungkapkan pengetahuan dan

pengalaman serta menganalisa kondisi yang dihadapi sehari-hari. Sehingga, PRA mengutamakan pendekatan kelompok, sekitar 10 hingga 50 orang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu dengan banyaknya jumlah orang akan memudahkan proses triangulasi. Dengan adanya kelompok masyarakat ini PRA dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut :

- Masyarakat memahami maksud dan tujuan kegiatan PRA
- Suasana akrab dan terbuka
- Terdapat kesepakatan waktu pelaksanaan kegiatan
- Masyarakat memahami teknik PRA sebagai kesempatan untuk berdiskusi dan mendapatkan solusi

Berdasarkan hal tersebut, proses kegiatan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan kembali maksud dan tujuan PRA  
PRA dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati dan dimulai dengan menjelaskan ulang maksud dan tujuan kepada masyarakat yang hadir
2. Menyepakati waktu dan kegiatan/teknik yang akan dilakukan  
Fasilitator bersama masyarakat menyepakati total waktu dan kegiatan yang dilakukan. Pada umumnya teknik ini memakan waktu 2 hingga 3 jam, disesuaikan dengan jumlah peserta dan jumlah teknik yang akan dilakukan. Peserta atau masyarakat dibagi menjadi sub kelompok kerja, apabila peserta lebih dari 25 orang, sebaiknya sub kelompok terbagi menggunakan teknik yang berbeda.
3. Membina suasana  
Suasana dibina dengan kondisi yang terbuka, santai dan akrab, fasilitator dapat mengajak melakukan permainan ringan sebelum acara dimulai.
4. Menjelaskan teknik PRA dalam sub kelompok  
Kelompok fasilitator menjelaskan maksudm tujuan serta proses pelaksanaan teknik/kegiatan.
5. Melakukan teknik PRA

Masyarakat melakukan diskusi dan mengkaji keadaan dengan bantuan teknik PRA yang ditentukan. Teknik PRA merupakan alat bantu, namun informasi yang muncul pada diskusi perlu diperhatikan. Pada umumnya saat terjadi diskusi, informasi yang penting kurang terdokumentasi. Ini merupakan tugas penting dari notulen atau pencatat, termasuk pencatatan nama peserta, tempat dan tanggal pelaksanaan. Kajian kondisi pedesaan secara partisipatif mendukung masyarakat untuk mengungkapkan dan menganalisa pengetahuan dan pengalaman yang dialami. Diharapkan dengan bantuan teknik PRA, anggota masyarakat dapat mengemukakan pendapatnya sehingga akan menciptakan proses analisa kondisi pedesaan. Pada kegiatan PRA, seluruh masyarakat dilibatkan untuk membuat teknik dan membahas kondisinya serta pada waktu pembahasan perlu meminimalkan dominasi dari orang tertentu.

Tahapan pada pelaksanaan PRA meliputi :

1. Diskusi umum (pembahasan keadaan)

Diskusi umum dilakukan untuk mengarahkan kegiatan dan menyepakati informasi yang akan dibahas.

2. Pembuatan gambar (visualisasi)

Berdasarkan kesepakatan informasi, akan ditentukan teknik yang digunakan. Misalnya penggunaan simbol atau tanda simbol atau tanda yang akan digunakan pada gambar atau melakukan salah satu teknik PRA. Simbol atau tanda yang digunakan dilakukan dengan kesepakatan kelompok.

3. Diskusi lebih lanjut (analisa masalah, potensi dan peluang)

Kemudian setelah gambar terbentuk, maka masyarakat mendiskusikan hasil dan dapat juga dilakukan penambahan atau perubahan gambar hingga gambar dapat disepakati oleh seluruh masyarakat.

#### 4. Presentasi dan diskusi

Presentasi dan diskusi merupakan tahapan yang penting, dimana setelah teknik PRA dibuat, hasilnya dipresentasikan secara pleno kepada kelompok lainnya. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menganalisa keadaan lebih dalam. Fasilitator membantu mendorong masyarakat untuk menganalisa hasil dan mengemukakan pendapat serta mengarahkan diskusi melalui pertanyaan. Pertanyaan dapat menggunakan kata bantu apa, mengapa, siapa, kapan, dimana dan bagaimana.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka akan disusun rencana untuk melanjutkan kegiatan PRA. Apabila informasi mengenai gambaran dan pengertian tentang desa yang didapatkan sudah mencukupi, maka dapat dilanjutkan untuk menyusun tahap perencanaan. Selain itu juga perlu dilakukan kesepakatan mengenai kesimpulan dan perumusan hasil PRA serta pembahasan menyeluruh mengenai diskusi yang telah dilakukan.

#### D. Perumusan Hasil PRA

Hasil PRA perlu dirumuskan pada suatu laporan sebelum disampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Selain itu juga perlu dilakukan persiapan presentasi. Pengumpulan dan persiapan pada umumnya dilakukan oleh tim fasilitator bersama beberapa wakil masyarakat. Data yang terkumpul dapat disusun dalam laporan atau kertas besar sebagai bahan presentasi. Isu-isu penting yang perlu ada dalam laporan dan presentasi adalah sebagai berikut :

- Gambaran umum keadaan desa (sumber daya alam, manusia, fisik dan sosial)
- Masalah yang dihadapi oleh masyarakat
- Potensi yang ada di desa serta peluang pembangunan

#### E. Lokakarya Musyawarah Masyarakat

Setelah terjadi kesepakatan masyarakat dan fasilitator mengenai jumlah dan kualitas informasi yang dikaji, maka hasil seluruh kegiatan kajian kondisi

pedesaan dapat disampaikan kepada masyarakat dan didiskusikan. Melalui pelaksanaan lokakarya ini diharapkan gambaran lengkap mengenai hasil PRA diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengambil keputusan mengenai tindakan lanjutan seperti pembentukan kelompok dan perencanaan kegiatan.

1. Mempresentasikan semua hasil PRA

Seluruh hasil dari kegiatan PRA dikumpulkan dan dipresentasikan kepada masyarakat. Presentasi dapat dipersiapkan oleh perwakilan masyarakat dengan bantuan fasilitator

2. Mendiskusikan kembali dengan masyarakat untuk mempertajam temuan

Hasil dari PRA didiskusikan kemudian dikaji ulang secara musyawarah dalam kelompok yang dijumpai oleh fasilitator

3. Penyusunan hasil akhir dan tindak lanjut

Hasil akhir dari analisa kajian masalah, potensi dan peluang dalam pengembangan program yang dibuat dan disusun bersama masyarakat. Kemudian fasilitator membantu masyarakat berdiskusi mengenai kegiatan yang akan dilanjutkan.

## **12.2 Penyusunan Desain Survey**

Desain Survey adalah suatu penelitian survei atau survei bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang orang yang jumlahnya besar, dengan cara mewawancarai sejumlah kecil dari populasi tersebut. Survei dapat digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif, deskriptif maupun eksperimental. Desain survey bertujuan untuk memberkan arahan dan mempermudah dalam proses survey di lapangan untuk mencari data. Komponen dalam desain survey dapat terdiri dari :

1. Rencana Kerja

Rencana kerja diuraikan secara detail pada bagian kurun waktu pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan.

- a. Tahap Persiapan

- Mempelajari rencana kerja



- Menyusun metodologi pendekatan penelitian
- Merancang kegiatan survey untuk memperoleh data dan informasi guna mendukung penelitian

b. Tahapan Survei

Dalam pengumpulan data perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi baik yang dikeumpulkan berupa data primer maupun data sekunder. Data dan informasi primer yang didapatkan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder yang didapat dari data-data sekunder yang didapat dari berbagai dinas/instansi terkait.

c. Tahap Analisis

Dalam tahap ini pelaksanaan analisis menggunakan metoda analisis tertentu terhadap input data yang berhasil dikumpulkan.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan penelitian akan membantu mendesain data-data untuk memudahkan peneliti di lapangan. Desain survey ini berisi dari tahapan-tahapan yang harus dilakukan peneliti guna memudahkan dalam proses memperoleh data dan informasi, baik sekunder maupun primer sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

b. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai untuk mencapai tujuan dari desain survey adalah sebagai cara untuk mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan berdasarkan penelitian yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data sekunder pada instansi–instansi yang terkait.
2. Pengumpulan data dilapangan atau survei primer untuk mencari data yang tidak ada pada data sekunder.
3. Wawancara

### 3. Mekanisme Survei

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan melalui survey, secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu: survey sekunder dan survey primer. Berikut penjabaran tentang survey sekunder dan survey primer. Dalam metodologi penelitian menggunakan berbagai metoda pendekatan yaitu :

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan melalui survey, secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu survey primer dan survey sekunder.

#### a. Survey Primer, Data primer diperoleh dari:

##### 1. Observasi :

Yaitu suatu studi penelitian yang sistematis tentang fenomena dan gejala psikis dengan jalan pengamatan pada wilayah kajian.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

#### b. Survey Sekunder

Merupakan pengambilan data survey sekunder diperoleh dari data-data dan literatur yang ada di Instansi terkait atau daftar pustaka dan buku-buku yang ada kaitannya dengan survey sekunder itu sendiri.

**Tabel 12. 2 Contoh Ceklist Data Sekunder**

<b>DATA SEKUNDER</b>			
<b>No</b>	<b>Instansi</b>	<b>Data yang Dibutuhkan</b>	<b>Tahun yang diambil</b>
1	Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang	• Kota Malang Dalam Angka	Tahun terbaru
		• Kecamatan Malang Tengah Dalam Angka	Time Series 5 Tahun Terakhir
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang	• RTRW Kota Malang	Tahun terbaru
		• RDTR Kecamatan Lowokwaru	Tahun terbaru
		• Peta/SHP Administrasi Kota Malang	Tahun terbaru
		• Masterplan Persampahan Kota Malang	
• Studi/Laporan/Data Kajian Persampahan Yang Terkait			

**Tabel 12. 3 Contoh Ceklist Data Primer**

<b>DATA PRIMER</b>			
<b>No</b>	<b>Survei</b>	<b>Jenis Data</b>	<b>Output</b>
1	Observasi	Dokumentasi Kondisi Eksisting	Gambaran umum kondisi eksisting sistem pengangkutan saampah di Kecamatan Lowokwaru
2	Wawancara	Melakukan wawancara megenai sistem pengangkutan sampah	Untuk mengetahui <ul style="list-style-type: none"><li>• Pola pengangkutan sampah</li><li>• Ritasi Pengangkutan Sampah</li><li>• Kondisi Moda pengangkut sampah</li><li>• Rute Pengangkutan Sampah</li><li>• Biaya pengangkutan sampah</li></ul>

**Tabel 12. 4 Contoh Desain Survei**

<b>Tujuan</b>	<b>Variabel</b>	<b>Sub Variabel</b>	<b>Data yang Dibutuhkan</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Metode Survei</b>
Mengevaluasi Rencana Detail Tata Ruang Pedesaan	Kependudukan	Kepadatan dan distribusi penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RDTRK Pedesaan</li> <li>• Profil Kecamatan</li> <li>• Kepadatan penduduk eksisting</li> </ul>	Metode evaluatif	Survei primer dengan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan
	Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB</li> <li>• KLB</li> <li>• TLB</li> <li>• GSB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RDTRK Pedesaan</li> <li>• Intensitas bangunan eksisting</li> </ul>	Metode evaluatif	Survei primer dengan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan
	Ekonomi kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivitas pertanian, perkebunan, dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil Pedesaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode LQ dan <i>Shift Share</i></li> </ul>	survei sekunder ke instansi-instansi terkait
	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah fasilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTRW</li> <li>• RDTRK</li> <li>• Profil Kecamatan</li> <li>• Peta persebaran fasilitas</li> </ul>	Proyeksi kebutuhan fasilitas masa mendatang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• survei sekunder ke instansi-instansi terkait</li> <li>• survei primer dengan pengamatan langsung di lapangan</li> </ul>



**BAB XIII  
PENYUSUNAN DOKUMEN  
TATA RUANG DESA**

**13.1 Aspek yang Diperlukan dalam Tata Ruang Desa**

Penataan ruang kawasan pedesaan diarahkan untuk:

- a. Pemberdayaan masyarakat pedesaan;
- b. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- c. Konservasi sumber daya alam;
- d. Pelestarian warisan budaya lokal;
- e. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
- f. Penjagaan keseimbangan pembangunan pedesaan-perkotaan.

Penataan ruang kawasan pedesaan diselenggarakan pada:

- a. Kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau
- b. Kawasan yang secara fungsional berciri pedesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.

**Tabel 13. 1 Indeks untuk Substansi Pembangunan Pedesaan**

Indikator	Indeks Hasil kemampuan Sendiri	Indeks Tanggung Jawab Bersama	Indeks Keberlanjutan
Pemberdayaan			
Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan asset permukiman</li> <li>• Penambahan asset usaha ekonomi</li> <li>• Penambahan jaminan kesehatan</li> <li>• Penambahan jaminan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan membangun permukiman</li> <li>• Kegiatan usaha ekonomi</li> </ul>	Penambahan modal usaha dan kerja dari dalam rumahtangga

<b>Indikator</b>	<b>Indeks Hasil kemampuan Sendiri</b>	<b>Indeks Tanggung Jawab Bersama</b>	<b>Indeks Keberlanjutan</b>
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rumahtangga pemakai prasarana transportasi</li> <li>• Jumlah pelanggan sarana komunikasi</li> <li>• Jumlah rumahtangga pemakai pasar</li> <li>• Jumlah rumahtangga pelanggan listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gotong royong pembangunan prasarana transportasi</li> <li>• Gotong royong pembangunan prasarana komunikasi</li> <li>• Kegiatan pasar</li> <li>• Tingkat pemadaman listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan waktu perjalanan</li> <li>• Percepatan waktu komunikasi</li> <li>• Pengurangan biaya untuk energi</li> </ul>
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rumahtangga pemakai prasarana kesehatan</li> <li>• Jumlah rumahtangga pemanfaat tenaga kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan prasarana kesehatan</li> <li>• Waktu kerja tenaga kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah wabah penyakit</li> <li>• Jumlah penduduk yang sakit</li> </ul>
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rumahtangga pemakai prasarana pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu pelaksanaan pendidikan</li> <li>• Kegiatan pendidikan non formal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan karir atau usaha dalam rumahtangga</li> </ul>
Kelembagaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rumahtangga anggota organisasi sosial</li> <li>• Jumlah rumahtangga partisipan lembaga organisasi kesenian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan organisasi sosial</li> <li>• Kegiatan kesenian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jaringan organisasi ke luar desa</li> <li>• Peningkatan jaringan organisasi kesenian ke luar desa</li> </ul>
Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rumah tangga pemilik lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gotong royong untuk perbaikan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan rumah tangga yang terkena pencemaran</li> </ul>
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gotong royong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rumah</li> </ul>

Indikator	Indeks Hasil kemampuan Sendiri	Indeks Tanggung Jawab Bersama	Indeks Keberlanjutan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kriminalitas</li> <li>• Jumlah kerusuhan</li> <li>• Jumlah korban bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perbaikan prasarana keamanan</li> <li>• Kegiatan pengamanan</li> <li>• Kegiatan mitigasi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tangga yang mengalami ketidakamanan</li> <li>• Jumlah rumah tangga yang memanfaatkan mitigasi bencana</li> </ul>
<b>Pemerintahan</b>			
Politik dan tata pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah peraturan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rapat desa</li> <li>• Jam kerja pemerintahan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rumah tangga pemanfaat layanan desa</li> </ul>
<b>Pembangunan</b>			
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jumlah usaha</li> <li>• Peningkatan nilai usaha</li> <li>• Peningkatan jumlah tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pendapatan perkapita</li> </ul>

Sumber : Agusta, 2014

### 13.2 Analisis Aspek-aspek Tata Ruang Desa

Pada analisis dalam proses penyusunan tata ruang kawasan, terdapat beberapa tahapan, antara lain :

1. Penentuan arah pengembangan
2. Analisis potensi dan masalah, yang terbagi menjadi 3 kegiatan :
  - a. Analisis sosial ekonomi
  - b. Analisis struktur tata ruang kawasan
  - c. Analisis pola pemanfaatan ruang
3. Identifikasi serta pentahapan pelaksanaan program

Pada setiap langkah tahapan terdapat maksud dan tujuan yang spesifik, dimana untuk mendapatkan hal tersebut masih memerlukan dukungan dan bantuan dari perangkat san/atau menggunakan metode analisis yang lebih spesifik.

#### A. Metode Penentuan Arah Pengembangan

Arah pengembangan yang dimaksud merupakan hasil kumpulan dari tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan pada daerah/kawasan yang diperinci dalam bentuk operasional. Tujuan dan sasaran ini dimaksudkan untuk mendapatkan pola dasar daerah/kawasan yang berkaitan dan/atau dokumen lain yang berhubungan. Arah pengembangan pada tingkat rencana detail tata ruang dijabarkan dalam bentuk teknis dan didasarkan pada perbandingan pada standar teknik sektoral yang sudah diakui. Untuk membantu mempermudah proses analisa, arah pengembangan diperinci dalam tiga unsur yaitu fisik, sosial dan ekonomi.

Arah pengembangan fisik diperinci dalam indikator yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti target lindung atau konservasi, perbaikan lahan yang kritis dan sumber daya keairan, relokasi permukiman penduduk di sekitar hutan lindung, target penghijauan atau reboisasi dan lain sebagainya. Arah pengembangan sosial merupakan rincian dari target dan sasaran pembangunan di bidang sosial masyarakat, yaitu yang berhubungan dengan upaya untuk mempersiapkan manusia dalam proses pembangunan. Dimana tujuan pembangunan pada bidang sosial terdiri dari :

- a. Upaya untuk meningkatkan kehidupan manusia dengan menggunakan indikator Indeks Harapan Hidup yang terdiri dari tingkat pelayanan kesehatan (jumlah puskesmas, rumah sakit dan apotik), tingkat konsumsi protein dan lain sebagainya.
- b. Upaya untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dengan menggunakan indikator jumlah dan penyebaran fasilitas pendidikan
- c. Upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bergantung pada kemampuan untuk mengelola sumber daya dalam rangka menciptakan nilai tambah. Indikator yang dapat digunakan pada upaya ini adalah kemampuan dalam pengelolaan lahan, kemampuan akses informasi, pelayanan kredit serta fasilitas pelayanan lain yang



dibutuhkan dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat.

Arah pengembangan ekonomi merupakan penetapan tujuan dan/atau sasaran pembangunan di bidang ekonomi yang berisikan :

- a. Pertumbuhan ekonomi, yang menggunakan indikator laju kenaikan Produk Domestik Bruto/PDB yang dihitung menurut sub sektor
- b. Pergeseran struktur ekonomi, yang merupakan pergeseran struktur dari sektor pertanian sebagai *primary sector* kearah sektor industri dan jasa sebagai *secondary sector*, dimana indikator yang digunakan adalah kontribusi pada sektor pertanian pada PDB dibandingkan dengan kontribusi sektor industri dan jasa, perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian dengan pada sektor industri dan jasa, perbandingan jumlah penduduk di kota dan di desa serta indikator lainnya

#### B. Metode Analisis Sosial dan Ekonomi

Analisis sosial dan analisis ekonomi memiliki tujuan untuk menemukan potensi dan masalah sosial ekonomi pada suatu kawasan. Sehingga metode analisa sumber daya wilayah/kawasan merupakan alternatif tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan potensi dan masalah kawasan tersebut. Permasalahan sosial berhubungan erat dengan aspek kependudukan/demografi. Sehingga pada proses analisa tahapan ini perlu dilengkapi dengan analisa pola pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang dikaitkan dengan proyeksi pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi kawasan. Analisa tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### a. Analisa Sumber Daya Wilayah

Analisa ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai profil sosial (sistem kelembagaan, tingkat buta huruf, kurang gizi, penyediaan air bersih), ekonomi (tingkat pendapatan, jumlah kepemilikan ternak, produksi padi), kependudukan (tingkat fertilitas dan mortalitas) dan kondisi fisik wilayah (jalan, fasilitas pelayanan dan kondisi rumah). Untuk memudahkan analisa sumber daya

wilayah, data dikelompokkan sesuai pendekatan seperti kawasan sebagai suatu sistem produksi pertanian, sebagai *core-periphery area*, sebagai daerah ekonomi dan perdagangan atau sebagai sistem permukiman, sumber daya dan produksi terpadu. Data yang dikumpulkan didasarkan pada salah satu pendekatan yang sesuai, kemudian dianalisa dengan metode statistik deskriptif, skala dan ranking, tingkat distribusi, spesialisasi, konsentrasi dan asosiasi dan indeks tingkat perkembangan kawasan yang dilakukan didalam dan diluar kawasan rencana.

b. Analisis Kependudukan,

Dimana analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Analisa bunga berganda

Metode ini menggunakan dasar pertumbuhan rata-rata pada kurun 5-10 tahun yang lalu, kemudian pertumbuhan penduduk diproyeksikan dengan menggunakan dasar bunga berganda/bunga manjemuk dengan angka pertumbuhan yang sama setiap tahun

2) Analisa kecenderungan (*trend analysis*) dengan regresi

Merode ini didasarkan pada data pola pertumbuhan penduduk pada 5-10 tahun yang lalu yang didekatkan dengan salah satu pola regresi (linear, logaritma, eksponensial atau regresi berpangkat)

3) Analisa *cohort*

Analisa ini menggunakan data penduduk yang dirinci berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Hasil proyeksinya akan menunjukkan pertumbuhan pada setiap kelompok umur dan jenis kelamin, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memprediksikan kebutuhan berbagai fasilitas pelayanan dan kebutuhan penyediaan lapangan kerja. Ketersediaan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi jika dihubungkan dengan perkembangan jumlah penduduk, dapat

dijadikan indikator arah pengembangan sosial. Hal ini dikarenakan dengan membandingkan kebutuhan baku minimal dari setiap jenis fasilitas pelayanan, dapat ditemukan tingkat pelayanan yang tersedia dan/atau dibutuhkan (tinggi, sedang dan/atau rendah).

c. Analisa Ekonomi

Metode analisa ini disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan dapat menggunakan metode analisa PDRB secara *time series* selama 5 tahun terakhir. Untuk medeskripsikan struktur ekonomi dan penentuan sektor strategis dapat menggunakan model *Input-Output (I-O)* atau untuk skala regional dengan menggunakan metode *Shift-Share (SSA)*. Untuk mengetahui alokasi investasi dengan pendapatan yang dihasilkan dapat menggunakan pendekatan dengan analisa *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*. Sedangkan untuk mengukur spesialisasi relatif pada suatu sektor/kegiatan tertentu pada suatu kawasan dapat menggunakan pendekatan melalui analisa *Location Quotient (LQ)*.

C. Metode Analisis Pola Pemanfaatan Ruang

Analisis dalam pola pemanfaatan ruang meliputi evaluasi dan penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang yang berdasarkan aspek fisik, ekonomi dan teknologi. Penjelasan aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kesesuaian fisik

Hal ini berhubungan dengan karakteristik fisik lahan yang diharapkan dapat memiliki pemahaman yang sama dengan tuntutan aktivis pada lahan tersebut. Jenis metode analisis yang diambil disesuaikan dengan rencana peruntukan pada lahan di kawasan rencana, misalnya saja pada kawasan budidaya pertanian maka dapat menggunakan metode analisa evaluasi kemampuan lahan dan kesesuaian lahan, sedangkan untuk kawasan industri juga menggunakan analisa kemampuan

penyediaan air baku yang dapat menggunakan analisa Imbangan atau Neraca Air

b. Kesesuaian ekonomi

Analisa ini diukur menggunakan analisa keunggulan berbanding (*comparative advantage*) yang ada pada suatu kawasan rencana untuk mengembangkan komoditas atau kegiatan ekonomi tertentu. Metode analisa yang baik untuk menukur hal tersebut adalah analisa biaya sumber daya domestik/BSD (*Domestic Resource Cost/DRC*)

c. Kesesuaian teknologi

Analisa ini memiliki kemungkinan pengembangan pada suatu sumber daya pada kawasan rencana yang memiliki tingkat prioritas yang tinggi pada aspek fisik dan ekonomi. Namin hal ini belum menunjukkan komoditas tersebut layan dikembangkan atau tidak. Sehingga sebelum dilakukan rekomendasi, perlu dilakukan analisa tingkat kesesuaian teknologi dari pengembangan komoditas dan/atau kegiatan ekonomi pada kawasan tersebut.

D. Metode Analisis Struktur Tata Ruang

Analisis struktur tata ruang ditujukan untuk mengidentifikasi masalah dalam pengembangan wilayah/kawasan yang memiliki dimensi keruangan. Analisis ini diarahkan agar mampu memberikan deskripsi yang menyeluruh mengenai keadaan pada pusat-pusat pelayanan pada kawasan rencana, jangkauan pelayanan serta hubungan atau uniteraksi yang muncul antar pusat pelayanan tersebut. Beberapa metode analisa yang dapat diaplikasikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan misalnya, untuk mengidentifikasi daerah/lokasi strategis dapat menggunakan analisa sistem hubungan (*linkage analysis*), untuk menentukan daerah atau kawasan permukiman yang kurang terlayani menggunakan analisa pola permukiman (*settlement analysis*), untuk mengidentifikasi kawasan yang terisolasi dapat menggunakan analisa aksesibilitas (*accessibility analysis*), dan/atau untuk menggabungkan dan mensitesa hasil analisa dapat menggunakan analisa planimetris. Sedangkan

untuk mengoptimalkan tata ruang dapat menggunakan pendekatan memanfaatkan analisis pemrograman linear (*linear programming*).

#### E. Identifikasi dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Tahapan pelaksanaan program disusun sebagai tahapan akhir dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Sehingga diperlukan beberapa langkah untuk mencapai maksud tersebut, yaitu (a) mengidentifikasi potensi dan masalah pada kawasan rencana, (b) menyusun potensi dan masalah menjadi program-program yang indikatif, (c) menyusun program yang disusun menjadi suatu daftar prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan tahapan pelaksanaan program. Metode yang digunakan masing-masing tahapan tersebut adalah :

##### a. Metode identifikasi potensi dan masalah

Metode untuk mengidentifikasi potensi dan masalah harus dipilih yang handal dan sesuai, hal ini dikarenakan setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan. Valid tidaknya hasil identifikasi dipengaruhi oleh keahlian dan pengalaman dari seorang perencana. Metode identifikasi yang dipilih pada umumnya adalah analisis pohon masalah (*tree problem analysis*).

Dalam rangka memudahkan proses identifikasi, pada potensi kawasan rencana dapat dikelompokkan menjadi potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi ruang. Masalah yang dihadapi kawasan rencana dibedakan sesuai dengan tema pembahasan, seperti kemiskinan, pengangguran, keterisolasian, lingkungan permukiman, kebodohan dan kesehatan dasar, atau isu pokok lain yang sesuai dengan kawasan rencana.

##### b. Metode identifikasi program

Hasil dari identifikasi masalah dan potensi yang dilakukan, kemudian disusun program-program indikatif yang bertujuan untuk mendayagunakan potensi serta penanggulangan masalah yang ditemui pada kawasan terencana. Penyusunan ini didasari oleh strategi pembangunan yang merupakan upaya pendayagunaan dan

pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang optimal.

Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan yang menunjukkan bahwa potensi dan masalah kawasan rencana dapat menghasilkan kesempatan atau ancaman. Dengan menganalogikan potensi dan masalah yang teridentifikasi pada tahap analisis sebagai kesempatan dan ancaman, maka metode SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi program indikatif.

Metode SWOT memiliki acuan pada evaluasi faktor *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (kesempatan) dan *threat* (ancaman) di kawasan rencana. Sehingga dengan mengetahui kesempatan dan ancaman yang potensial, maka dapat dihubungkan dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan. Program-program indikatif yang dimaksud digunakan untuk menemukan upaya dalam mendayagunakan kesempatan dan/atau menanggulangi ancaman yang ditemui, dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada kawasan rencana.

c. Metode penentuan urutan prioritas pelaksanaan program

Program yang sudah diidentifikasi kemudian diurutkan berdasarkan peran program pada tujuan pembangunan kawasan di masa mendatang. Hal ini juga mempertimbangkan kemampuan daerah untuk membiayai, kemampuan/daya serap daerah untuk melaksanakan pekerjaan/program serta karakteristik program yang pada umumnya bersifat sekuensial (program harus didahului atau diikuti oleh program lainnya). Metode yang dapat diterapkan adalah *Goals Objectives Achievement Matrices (GOAM)*. Metode ini merupakan metode lanjut dari pembobotan klasik, dimana metode ini cocok diterapkan pada perencanaan pembangunan wilayah yang bersifat *multi objectives planning*.



## **BAB XIV INOVASI SMART VILLAGE**

Pada dasarnya, *Smart Village* merupakan sebuah konsep bagaimana suatu desa dapat menyelesaikan berbagai permasalahannya dengan cerdas. Konsep *Smart Village* juga harus didukung oleh beberapa komponen agar penerapannya mampu memberikan dampak positif dan maksimal. Komponen tersebut antara lain *Smart Institution*, *Smart Infrastructure*, *Smart Service Delivery*, *Smart Technology and Innovation*, dan *Smart Societis*. Untuk menjalankan segala komponen tersebut dengan baik, dibutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik satu sama lain.

Kerjasama untuk mewujudkan desa dengan konsep *Smart Village*, pemerintah desa ataupun masyarakat desa itu sendiri membutuhkan bantuan beberapa elemen penting seperti organisasi sosial, petani, buruh, dan perusahaan-perusahaan kecil ataupun besar.

Membangun desa dengan konsep *Smart Village* berfokus pada bagaimana konsep ini mampu mengubah kondisi masyarakatnya menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera, menumbuhkan kesadaran di masyarakat akan pentingnya sebuah inovasi dalam usaha kecil yang berpotensi untuk menciptakan kewirausahaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan di desa agar lebih mampu memberikan kenyamanan dan kepuasan pada masyarakat. Kunci dari suksesnya konsep *Smart Village* adalah dengan menambah pengetahuan masyarakat desa melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan. Dengan adanya *Smart Village* ini, peran pemerintah desa akan lebih dioptimalkan dengan tujuan agar dapat mengelola sumberdaya desanya secara efektif, efisien, dan *sustainable*.

Pusat pelaksanaan *Smart Village* dapat dilaksanakan di kantor desa atau balai desa, sehingga kantor desa atau balai desa akan terus didatangi masyarakat yang kemudian hal ini juga akan berdampak baik untuk hubungan

antara warga desa dan pemerintah desa, dan kantor desa atau balai desa diharapkan juga bisa berfungsi sebagai rumah kreatif warga atau dapat dikembangkan menjadi tempat *Citizen Sourcing*, yaitu tempat yang memfasilitasi masyarakat untuk memberikan ide atau inovasi yang dapat dikembangkan di desanya.

Dalam penerapan *Smart Village* pun terdapat beberapa kendala, utamanya kendala ekonomi, karena memang dibutuhkan biaya yang besar untuk membeli segala peralatan canggih yang dibutuhkan. Selain itu, juga terdapat kendala dari sisi sumber daya manusia, karena di desa masih banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang kurang, sehingga harus mendatangkan para ahli atau pakar dan itu tentunya juga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Namun, kendala tersebut dapat dilewati bergantung pada inovasi pemerintah dan masyarakat desa dalam menangani permasalahan tersebut.

Mewujudkan sebuah desa yang mandiri memerlukan kreativitas dan juga inovasi untuk merealisasikan. Sehingga nantinya desa tersebut bisa memanfaatkan potensi fisik maupun non-fisik yang dimilikinya. Namun, masih banyak desa yang lebih membidik pembangunan fisik dari pada mengembangkan sumber daya manusia atau masyarakat desa. Pengembangan ini perlu ditinggalkan pada saat ini, dikarenakan sebuah desa akan bisa berkembang dengan pesat ketika semua elemen masyarakat terutama para generasi mudanya mampu berpikir kreatif untuk membuat karya-karya yang menarik. Beberapa contoh inovasi pengembangan *smart village* berdasarkan model desa, yaitu model pengembangan desa wisata, model pengembangan desa pesisir, model pengembangan desa agropolitan dan *smart village*.

### **Inovasi dalam Model Pengembangan Desa Wisata**

Pengembangan inovasi dalam kategori model desa wisata yang memiliki inovasi dapat ditemukan pada Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2017, desa ini berhasil mendapatkan



penghargaan desa wisata terbaik dalam kategori pemanfaatan jejaring bisnis dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

Sesuai dengan pengertian mengenai desa wisata, masyarakat di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi ini memanfaatkan peran masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan potensi desa. Desa Tamansari terletak di kaki Gunung Ijen yang menjadi jalur pendakian wisatawan menuju kawasan Ijen. Desa Tamansari merupakan salah satu desa yang masih menjaga kuat kehidupan budaya suku Osing yang merupakan suku dan budaya asli Banyuwangi.

Sejarah munculnya pengembangan wisata di Desa Tamansari, diawali dari banyaknya wisatawan yang menjadikan desa ini sebagai tempat istirahat saat mendaki ke Kawah Ijen. Sehingga, wisatawan memerlukan lokasi untuk menginap karena pendakian pada umumnya dilakukan saat malam hari. Kemudian atas inisiatif pemerintah desa, disediakan *homestay* untuk para wisatawan yang dikelola oleh BUMDes Ijen Lestari. Para masyarakat yang berminat untuk berbisnis *homestay* diberikan pelatihan untuk memberikan pengetahuan mengenai penataan kamar dan pelayanan wisatawan. BUMDes Ijen Lestari mendapatkan hasil pembagian sekitar 10-15% dari harga sewa kamar. Hal ini awalnya hanya diterapkan pada beberapa pengurus desa dikarenakan masyarakat sekitar masih belum berminat. Namun, setelah beberapa lama, masyarakat Desa Tamansari ikut menyediakan *homestay* dengan pengelolaan dibawah BUMDes Ijen Lestari.

Hingga saat ini pengembangan wisata di Desa Tamansari terus dikembangkan dengan memanfaatkan potensi desa lainnya. Potensi lain yang sudah digali adalah penyediaan paket wisata untuk meningkatkan lama menginap wisatawan. Paket wisata Desa Tamansari yang disingkat dengan Dewi Tari ini mengajak wisatawan yang datang untuk menikmati objek-objek wisata yang ada di Desa Tamansari seperti Kampung Bunga, Kampung Susu dan Kampung Penambang. Selain itu wisatawan juga diajak menikmati kopi produksi masyarakat desa. Paket wisata lainnya adalah wisatawan diajak untuk

berjalan ke hutan pinus sekaligus mempelajari kearifan lokal masyarakat Desa Tamansari.

Pengadaan Dewi Tari ini mampu meningkatkan lama menginap wisatawan di Desa Tamansari. Sehingga, perekonomian masyarakat mampu tumbuh dengan tidak mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan saja. Selain itu, juga disediakan wisata kuliner berupa rumah makan yang menyediakan makanan lokal khas Kabupaten Banyuwangi yaitu Warung Oseng Banyuwangi.

BUMDes Ijen Lestari juga mulai menyediakan *guide* lokal dan kendaraan untuk mengangkut para wisatawan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa travel. *Guide* yang digunakan adalah masyarakat lokal yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ditingkatkan dengan menyediakan pelatihan untuk memandu wisatawan. Selain itu, penyediaan kendaraan berupa jip digunakan untuk mengangkut wisatawan menuju Kawah Ijen. Kendaraan ini dimiliki oleh masyarakat secara individu kemudian dikelola oleh BUMDes untuk menjaga kondisi kendaraan agar tetap dapat digunakan.

Kondisi ini mampu meningkatkan sumber daya manusia dan menyerap banyak tenaga kerja. Tenaga kerja tersebar di kantor BUMDes, sopir kendaraan, *guide* dan pekerjaan lainnya.

Kedepannya, pemerintah Desa Tamansari akan meningkatkan atraksi wisata dengan memanfaatkan perkebunan kopi serta mengelola biji kopi menjadi produk kopi premium dalam kemasan. Sebagai salah satu sentra produsen susu, Desa Tamansari juga akan mengembangkan wisata edukasi dengan memanfaatkan ternak sapi dan kambing perah milik masyarakat. Selain itu, tak hanya dikonsumsi, produksi susu akan diolah menjadi bermacam produk, seperti manisan, kerupuk, dan yoghurt. Atraksi wisata lainnya adalah Sendang Seruni yang dikembangkan sebagai wisata alam yang dapat dimanfaatkan untuk berenang.

Terdapat penelitian yang menilai bagaimana modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa wisata di Desa Tamansari ini.

Penelitian ini dilakukan oleh Puspitasi dan Lubis pada tahun 2017. Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- a) Modal sosial yang dimiliki masyarakat termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal tersebut dikarenakan tingginya kepercayaan yang dimiliki diantara masyarakat ataupun pihak lain, tingginya norma yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menciptakan hubungan yang baik di antara masyarakat Desa Tamansari, dan tingginya jaringan karena dijadikannya Desa Tamansari sebagai desa wisata memberikan manfaat kepada masyarakat.
- b) Faktor pendorong partisipasi termasuk ke dalam kategori tinggi. Masyarakat memiliki kemauan, kesempatan, dan kemampuan untuk dapat terlibat dalam upaya pembangunan desa wisata.
- c) Tingkat partisipasi masyarakat termasuk ke dalam kategori sedang. Mereka kurang diikutsertakan dalam tahapan perencanaan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan termasuk ke dalam kategori tinggi dan masyarakat sangat antusias dalam membangun Desa Tamansari sebagai desa wisata.
- d) Tingkat pembangunan desa termasuk ke dalam kategori rendah. Hal itu karena manfaat yang diterima masyarakat belum merata dan belum banyak program-program yang belum direalisasikan.
- e) Tingkat kapasitas diri yang dimiliki masyarakat termasuk ke dalam kategori tinggi. Masyarakat mendapatkan peningkatan kemampuan untuk berinteraksi dan menambah kemampuan berbahasa asing dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan.
- f) Tingkat pendapatan termasuk dalam kategori rendah karena tidak semua masyarakat mendapatkan peningkatan pendapatan yang sama. Semua tergantung kepada jasa yang mereka tawarkan.

Berdasarkan kondisi di Desa Tamansari yang diambil dari berbagai sumber informasi serta hasil penelitian oleh Puspitasari dan Lubis, didapatkan bahwa keberhasilan Desa Tamansari dalam mengelola wisata didasarkan pada pemanfaatan potensi-potensi yang didukung pengelolaan, pelatihan dan

pemberdayaan yang tepat kepada masyarakat. Sehingga pengembangan Desa Tamansari ini dapat dikategorikan sebagai *smart village* dalam indikator :

- a. *Smart Institution* yaitu pemerintah Desa Tamansari yang memiliki inisiatif dan inovasi dalam memanfaatkan sumber daya alam desa
- b. *Smart Infrastructure*, dimana infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan desa dilengkapi sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan dan memperlama daya kunjung wisatawan
- c. *Smart Societis*, dimana masyarakat dilibatkan dalam pengadaan infrastruktur dan tenaga kerja

### **Inovasi dalam Model Pengembangan Desa Pesisir**

Salah satu model pengembangan desa pesisir yang ada di Indonesia dapat dilihat di Kota Bontang. Kota ini merupakan salah satu kota yang berada di Propinsi Kalimantan Timur. Kota Bontang sendiri terkenal akan potensi kekayaan industri migas dan kondensatnya. Disamping itu, Kota Bontang memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan yaitu berupa kawasan wisata Kampung Laut Bontang Kuala untuk dijadikan objek wisata.

Kampung Laut Bontang Kuala merupakan kawasan perkampungan yang dijadikan sebagai objek wisata oleh Pemerintah Kota Bontang. Sebagai pemilik gelar desa maritim terbaik dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2017, kampung ini mengedepankan pengembangan kampung laut yang tertata dan produktif dalam bidang pariwisata. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekhasan kawasan kampung laut Bontang Kuala sebagai kampung cagar budaya karena kampung Bontang Kuala merupakan kampung pertama di Kota Bontang.

Terbentuknya Kampung Bontang Kuala ditandai dengan sejarah masyarakat Bugis dan secara terbentuknya Kampung Bontang Kuala. Sejarah masyarakat Bontang Kuala berawal dari Ajipao sebagai salah seorang bangsawan Bugis yang melarikan diri dari Tanah Sulawesi akibat perang saudara dan konflik politik dengan pemerintah Kolonial Belanda sehingga menuju ke Kesultanan Kutai Kertanegara. Oleh Sultan Kutai Kertanegara, Ajipao

diangkat menjadi kerabat Sultan dan diperintahkan mencari wilayah baru dan akhirnya Ajipao mendirikan perkampungan Bontang Kuala. Bukti fisik sejarah Kampung Bontang Kuala ialah masjid Al-Wahab yang di dalamnya terdapat makam Ajipao dan jalan kayu yang terdapat di sepanjang sungai Api-api yang menjadi permulaan berdirinya permukiman di Kampung Bontang Kuala.

Wilayah Kelurahan Bontang Kuala terdiri dari daratan dan perairan dan permukiman terletak di atas wilayah perairan yang disebut Kampung Bontang Kuala. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Kampung Bontang Kuala adalah nelayan. Masyarakat masih percaya terhadap penunggu laut yang terdapat di Karang yang melindungi kampung dari berbagai macam bencana. Dalam melakukan aktivitas melaut. Sebagai wujud penghormatan terhadap penunggu laut, maka dilakukan upacara melaut sebelum mencari ikan.

Kampung Laut Bontang Kuala ini merupakan salah satu tujuan wisata lokal maupun mancanegara. Kawasan wisata ini merupakan perkampungan yang awalnya dihuni oleh nelayan. Perkembangan Kampung Apung Bontang Kuala yang awalnya merupakan cikal bakal Kota Bontang kini beralih menjadi potensi wisata yang menjanjikan. Komoditas unggulan hasil lautnya berupa udang, kepiting, ikan kerapu, rumput laut, dan tiram yang banyak diminati oleh pasar luar negeri menjadi daya tarik utama pariwisata Kota Bontang. Ditambah lagi dengan keunggulan sumber daya alamnya berupa pantai, pulau, hutan bakau dan terumbu karang.

Sebagai perkampungan nelayan pertama di Bontang, adat istiadat di Kampung Bontang Kuala masih dipengaruhi oleh Suku Bugis. Tipologi rumah panggung dan sirkulasi yang terbuat dari dek mengikuti ketinggian lantai rumah menjadikan perkampungan ini disebut perkampungan apung yang berada di atas rawa dan laut yang berorientasi Timur-Barat. Aktivitas warga Kampung Bontang Kuala sendiri pada dasarnya masih kental dengan adat, kegiatan budaya dan religi, serta hubungan kekerabatan keluarga (Budiman, 2010). Mata pencaharian utama dari masyarakat Bontang Kuala adalah nelayan. Oleh karena itu warga setempat masih sering mengadakan upacara adat untuk keselamatan para nelayan dan mempercayai kosmologis Timur-

Barat sebagai orientasi yang baik untuk berlayar dan hunian. Beberapa ritual dijadikan acara besar-besaran untuk mengenalkan Kampung Bontang Kuala terhadap wisatawan dan meningkatkan minat pariwisata yang khas dari Kampung Bontang Kuala yaitu keunikan kampung yang terbangun di atas air dan memiliki struktur jalan serta konstruksi kayu ulin.

Permukiman di Kampung Bontang Kuala terbentuk dari kelompok-kelompok masyarakat yang berprofesi di bidang kesenian. Sehingga hal ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Kelompok kesenian yang ada di antaranya adalah tari pesisir, kesenian hadrah, kelompok pengajian, kelompok kesenian musik tingkilan. Secara fisik keberadaan kelompok masyarakat ditandai dengan adanya rumah-rumah warga, rumah tetua adat, dan anjungan sebagai tempat latihan bersama. Aktivitas kelompok masyarakat dapat membentuk pola pergerakan yang mengelompok pada masing-masing rumah tetua adat, anjungan dan rumah warga pada permukiman di Kampung Bontang Kuala.

Pada kawasan wisata Kampung Laut Bontang Kuala terdapat dua kegiatan penting dimana ada aktivitas manusia yang berada di atas perkampungan laut dan juga disisi lainnya terdapat kawasan konservasi mangrove. Perkampungan laut Kampung Laut Bontang Kuala memiliki jalanan yang tersusun rapi dan terbuat dari papan. Terdapat banyak pot bunga di pinggir jalan sebagai hiasan dari rumah-rumah yang berjejer. Ada pula masjid, sekolah, toko-toko dan restoran, bahkan ruang terbuka tempat pentas kesenian atau pertunjukan lainnya. Untuk keliling perkampungan dapat berjalan kaki atau disusuri dengan naik perahu.

Saat ini pengelola Kampung Laut Bontang Kuala, yaitu Pemerintah Kelurahan Bontang Kuala membenahi lokasi parkir dan terminal di depan pintu masuk permukiman Bontang Kuala, lokasi batas darat dan laut yang masih bisa dilewati kendaraan roda empat atau lebih. Pengunjung juga disediakan area untuk berbelanja hasil olahan asli daerah. Beberapa warga lokal yang berjualan hasil laut berupa ikan asin, ikan olahan, rumput laut

olahan dan sejenisnya memiliki lokasi khusus untuk berdagang disamping tempat parkir berupa Kios UMKM.

Pelatihan bagi perajin olahan hasil laut bagi keluarga nelayan sebagai bagian dari industri rumah tangga hingga pelaku UMKM di kios terkait kesehatan olahan makanan dijadikan sebagai bagian pengembangan Kampung Laut Bontang Kuala. Hal ini dapat membantu meningkatkan kunjungan wisatawan baik yang sekedar menikmati alam Bontang Kuala maupun membeli oleh-oleh khas Bontang.

Selain itu, inovasi lain dari desa maritim ini adalah adanya *e-service* atau pelayanan elektronik dari Kelurahan Bontang Kuala. Melalui pelayanan ini para Ketua RT bisa langsung mengakses melalui gawai pintar dimanapun jika ada warganya yang membutuhkan pelayanan. RT dapat mengakses website Kelurahan Bontang Kuala di alamat [www.kelurahanbontangkuala.com](http://www.kelurahanbontangkuala.com) kemudian membuka aplikasi pelayan surat yang dibutuhkan. Kemudian masyarakat akan langsung datang ke Kantor Lurah untuk menandatangani surat yang diminta.

Berdasarkan kondisi yang ada di Kampung Laut Bontang Kuala, maka keberhasilan pengelolaan desa berdasarkan indikator *smart village* antara lain keberhasilan dalam :

- a. *Smart Institution*, yaitu pemerintah Kelurahan Bontang Kuala memiliki inisiatif dan kemauan untuk meningkatkan daya tarik wisata Kampung Laut Bontang Kuala.
- b. *Smart Infrastructure*, dimana pemerintah desa sebagai pengelola Kampung Laut Bontang Kuala menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam peningkatan pelayanan bagi wisatawan yang berkunjung
- c. *Smart Service Delivery*, merupakan salah satu bentuk inovasi dalam mempermudah pelayanan masyarakat Bontang Kuala, yaitu efisiensi waktu dalam pembuatan surat menyurat melalui aplikasi yang disediakan

- d. *Smart Technology and Innovation*, Kelurahan Bontang Kuala mempermudah pelayanan dengan membuat website khusus yang dapat diakses masing-masing RT untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam urusan administrasi

### **Inovasi dalam Model Pengembangan Desa Agropolitan**

Kota pertanian merupakan kota menengah/kota kecil/kota kecamatan/kota pedesaan yang mendorong perkembangan pembangunan pedesaan dan desa *hinterland* dan sekitarnya. Pembangunan ini memanfaatkan pengembangan ekonomi, dimana tidak dibatasi sebagai pusat pelayanan sektor pertanian, namun juga sebagai sektor secara luas, seperti usaha pertanian, industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan dan lainnya.

Salah satu desa yang termasuk dalam desa agropolitan ini adalah Desa Wisata Pujon Kidul yang merupakan salah satu destinasi unggulan di Kecamatan Pujon, Malang, Jawa Timur. Pujon Kidul. Kawasan desa wisata ini menyajikan suasana pedesaan yang sejuk dan asri serta menyediakan banyak titik yang menarik untuk berfoto.

Prestasi yang diraih Desa Wisata Pujon Kidul sebagai desa wisata Agro terbaik pada tahun 2017 dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Sebelumnya Desa Pujon Kidul juga mewakili Jawa Timur untuk tingkat Asean dalam hal pengelolaan Homestay dan masuk lima besar terbaik. Pujon Kidul tidak hanya mengedepankan wisata alam, namun desa ini memiliki kawasan rumah kampung lestari dimana semua dusunnya memiliki sejumlah aktivitas warganya yang produktif dalam agrowisata.

Potensi Desa Pujon Kidul ini beada pada potensi hasil sumber daya pertanian, seperti pertanian, perkebunan, holtikultura serta peternakan. Dari 4.297 penduduk desa ini, sebagian besar sebagai petani dan peternak. Konsep yang diterapkan pada kawasan ini adalah masyarakat sebagai pelaku wisata, pemilik dan pengelola. Pemerintah desa mengelola kawasan dengan modal modal 60 juta pada tahun 2016, kemudian diberikan suntikan dana lagi sebanyak 150 juta pada tahun 2017.



Atraksi wisata yang disediakan di Desa Pujon Kidul antara lain Cafe Sawah. Cafe ini dikonsep secara kontemporer dengan sajian pemandangan alam, latar belakang pegunungan dan suasana sawah. Cafe Sawah menyediakan menyediakan titik-titik swafoto yang bagus. Di dalam area cafe juga ada taman bunga, jembatan, hingga bangunan yang terbuat dari bambu. Omset Cafe Sawah ini sepanjang 2018 mencapai 14 miliar. Café yang dikelola BUMDes ini mempekerjakan 167 orang. Pekerja di Cafe Sawah berasal dari warga sekitar, hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Pujon Kidul, mengeluarkan Peraturan Desa tentang Pengembangan dan Pembangunan Desa Wisata pada tahun 2016. Peraturan desa ini mengatur agar Cafe Sawah mempekerjakan rumah tangga miskin dan anak putus sekolah.

Selain Cafe Sawah, Desa Pujon Kidul juga menyajikan The Roudh 78. Pada kawasan ini ditawarkan berbagai kegiatan fisik yang seru. Kegiatan yang disediakan antara lain off road dengan menggunakan jip yang sudah disediakan, arena bermain *paintball* atau berkuda. Desa Wisata Pujon Kidul juga menyediakan jalur *hiking* ke beberapa kawasan air terjun atau coban. Beberapa coban yang bisa dikunjungi di Pujon Kidul antara lain Sumber Pitu dan Coban Manan. Selain itu juga disediakan wahana ATV, *trail* dan panahan. Wisatawan juga dapat menggunakan ATV untuk berkeliling kawasan pertanian di area desa.

Beberapa atraksi wisata lain adalah pertanian dan peternakan. Atraksi pertanian yang disediakan adalah paket edukasi budidaya tanaman. Wisatawan bisa bersama petani mulai menyemai bibit hingga panen. Selain itu untuk atraksi peternakan, tersedia paket wisata sapi perah, wisatawan bisa pemerah susu sapi dan langsung meminum. Juga menunjukkan cara pengolahan jadi kerupuk dan susu pasteurisasi. Sapi perah di Desa Pujon Kidul jumlahnya mencapai 1.600 ekor sehingga produksi susu setiap hari mencapai 9.500 liter. Susu ini dijual ke industri pengolahan susu melalui koperasi setempat. Melalui penyediaan paket pertanian dan peternakan, mata pencaharian ini juga berhasil menyedot perhatian wisatawan.

Selain memanfaatkan sumber daya alam, ada juga kampung budaya. Kampung ini menyajikan permainan tradisional dan menonjolkan sanggar seni di desa. Wisatawan bisa berinteraksi bersama-sama warga untuk mengikuti kegiatan berkesenian. Selain itu masyarakat yang berpartisipasi merupakan masyarakat yang aktif dalam agropolitan, yang dimaksud adalah masyarakat yang berperan merupakan masyarakat yang sehari-harinya bermata pencaharian sebagai petani atau peternak di Desa Pujon Kidul.

Banyaknya potensi sumber daya alam ini membantu meningkatkan kesejahteraan desa, sehingga menurunkan angka kemiskinan. Pada 2017, rumah tangga miskin di Desa Pujon Kidul sebanyak 387 jiwa. Pada tahun 2018 turun jadi 257 jiwa. Selain penurunan angka kemiskinan, Desa Pujon Kidul juga mengalami penurunan angka pengangguran. Dari penduduk desa sejumlah 4.297 jiwa, kini 20% diantaranya bekerja di sektor pariwisata.

Untuk mengakomodasi kebutuhan para wisatawan, Desa Wisata Pujon Kidul menyediakan *homestay* yang disediakan oleh warga desa. Sehingga wisatawan dapat menginap beberapa malam sambil menikmati suasana pedesaan.

Selain menyiapkan atraksi wisata yang dapat dimanfaatkan oleh para wisatawan, Desa Wisata Pujon Kidul juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan disekitarnya. Air limbah yang dihasilkan dari limbah dapur serta toilet pada Cafe Sawah dialirkan ke reaktor instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu. Air limbah disaring hingga beberapa tahap, sehingga dapat digunakan kembali untuk mengairi air kolam maupun pertanian. Sedangkan untuk ampas yang dihasilkan dari IPAL terpadu digunakan sebagai pupuk. Tanaman-tanaman yang ada di sekitar Cafe Sawah menggunakan ampas dari limbah tersebut sebagai pupuk. Tujuan keberadaan IPAL terpadu ini adalah mengolah seluruh limbah agar tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Sisa makanan pengunjung diolah untuk dijadikan pakan bagi unggas dan ikan. Sehingga, semua limbah terdaur ulang dan tidak bersisa.

Selain itu, pengelola juga menyediakan wastafel untuk mencuci tangan yang ditempatkan di berbagai sudut. Toilet bersih disediakan sekitar 20 bilik.

Setiap sudut gazebo disediakan keranjang sampah, hingga tak ada sampah berceceran. Sampah-sampah pengunjung dikumpulkan dan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu (TPS) Pujon Kidul.

Berikut ini merupakan skema strategi pengembangan dalam membangun Desa Wisata Pujon Kidul :



Gambar 14. 1 Skema Strategi Pengembangan Desa Wisata (Kompasiana, 2017)

Terdapat beberapa langkah-langkah strategi yang digunakan untuk mewujudkan Desa Wisata Pujon Kidul. Berdasarkan artikel Kompasiana, Kepala Desa Pujon Kidul menyebutkan strategi tersebut dalam Program Pendidikan Agrobisnis dan Agrowisata Desa Inovatif (PADI) yang diselenggarakan oleh Komunitas Averroes. Strategi tersebut antara lain :

1. Reformasi Budaya Organisasi Pemerintah Desa

Pembangunan desa wisata merupakan sebuah proses yang panjang. Kepala desa harus memberikan edukasi kepada masyarakat dan memerlukan waktu kurang lebih enam tahun atau satu periode kepemimpinan kepala desa untuk menumbuhkan sikap sadar wisata dari masyarakat desanya.

Membangun desa wisata dijadikan sebagai visi dan misi oleh kepala desa. Upaya yang dilakukan antara lain upaya penyadaran masyarakat dan kelembagaan yang kuat. Lembaga pertama yang harus direformasi adalah pemerintah desa sendiri. Reformasi pemerintah desa menjadi langkah yang

pertama. Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa harus didapatkan sebelum memulai proses pembangunan.

Kepala Desa Pujon Kidul menggunakan konsep sapta pesona wisata untuk memperbaiki kinerja pemerintah desa. Kepala desa dan perangkat desa secara otomatis adalah anggota dari kelompok sadar wisata. Karenanya, perangkat desa harus menerapkan sedikitnya empat dari tujuh prinsip sapta pesona. Empat prinsip tersebut adalah bersih, aman, sejuk dan tertib.

Bersih (*clean*) tidak hanya bermakna kebersihan alam dan lingkungan. Bersih juga harus menjadi karakter kinerja pemerintah desa (*clean govenment*). Pemerintah desa harus amanah dan menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme. Aman dan sejuk berarti stabilitas politik desa harus dijaga oleh kepala desa beserta seluruh perangkat desa. Pemerintah desa juga harus tertib dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Selain berpedoman pada prinsip sapta pesona, penguatan karakter pemerintah desa juga perlu memperhatikan prinsip 3 S (*solid, speed, smart*). *Solid* berarti menyatunya hati, pikiran dan tindakan. Solidaritas antar sesama perangkat desa akan menciptakan suasana persahabatan dalam dunia kerja. Kesamaan visi antar perangkat desa akan mengikat mereka dan kemudian akan memunculkan rasa saling percaya. Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa harus memiliki kemampuan untuk mengikat banyak orang dengan satu persinggungan tujuan dan kepentingan.

*Speed* merupakan karakter mental untuk senantiasa bertindak sebagai pelopor dalam merespon setiap peristiwa. Pemerintah desa harus mampu untuk bertindak cepat dan tepat dalam melayani masyarakat desa.

*Smart* merupakan sikap untuk selalu berpikir dan bertindak cerdas dalam menjalankan tugas. Inovasi dan kreativitas menjadi kunci dalam menjalankan pekerjaan sebagai perangkat desa.

## 2. Aktivasi kelembagaan Wisata Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi instrumen pengantar menuju desa wisata yang sukses. Berdasarkan pengalaman Kepala Desa Pujon Kidul, BUM Desa yang ada di desanya berhasil menjadi garda terdepan dalam

upaya eksplorasi potensi desa. BUMDesa Sumber Sejahtera menjadi sarana bagi desa untuk melakukan investasi yang menguntungkan bagi upaya pembangunan. Anggaran desa yang diperoleh dari pemerintah pusat (Dana Desa) secara sah dapat digunakan untuk modal usaha produktif melalui BUMDesa ini.

Pendirian BUMDesa menggunakan hal asal usul untuk melakukan musyawarah, sehingga melalui musyawarah ini BUMDesa ini dibentuk. Selain BUMDesa, Kepala Desa Pujon Kidul juga menyarankan untuk memperkuat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Lembaga ini berfungsi sebagai penyambung komunikasi antara desa, masyarakat dan pemerintah supra desa. Pokdarwis secara otomatis akan mendapat pembinaan dan bimbingan dari dinas pariwisata kabupaten. Di sisi lain, Pokdarwis juga menjadi organ yang mendidik masyarakat desa untuk menciptakan iklim wisata yang kondusif.

### 3. Sinergi Lima Aktor Pembangunan

Apabila pemerintah desa sudah kuat, Pokdarwis sudah menjalankan peranannya dan BUMDesa telah menjadi motor penggerak ekonomi, langkah yang harus ditempuh selanjutnya adalah memanfaatkan lima jaringan aktor (pentahelix).

Aktor pertama yang harus dimanfaatkan keberadaannya adalah pihak pemerintah. Desa harus berkomunikasi dan bersinergi dengan organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten. Orientasi politik dalam komunikasi dengan pihak kabupaten harus dikesampingkan, karena tujuan yang utama adalah pembangunan desa.

Aktor kedua adalah pihak swasta. Kepala Desa Pujon Kidul berhasil memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mendukung visi pembangunan desa wisata. Beberapa bangunan seperti gapura, lampu penerangan dan dukungan permodalan berhasil didapatkan dari CSR perusahaan swasta maupun BUMN.

Aktor ketiga adalah media massa. Media massa baik elektronik maupun cetak bisa dimanfaatkan dalam rangka promosi wisata.

Keempat adalah akademisi. Warga desa yang telah mengenyam pendidikan tinggi di berbagai jurusan dapat dimintai sumbangan pemikiran untuk pembangunan desa. Selain itu, program penelitian dan pengabdian masyarakat yang masuk ke desa bisa disaring dan diarahkan pada upaya pembangunan desa wisata.

Kelima, masyarakat desa tak kalah penting dibandingkan dengan aktor lainnya. Dukungan masyarakat sebagai tuan rumah menjadi modal utama bagi kenyamanan sebuah desa wisata.

Melalui 3 (tiga) strategi pengembangan tersebut, Desa Wisata Pujon Kidul mampu mewujudkan sebuah desa wisata yang meregenerasi kesadaran masyarakat, kesadaran pemerintah desa dan kesadaran kelembagaan dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik secara sekaligus. Tahapan yang diperlukan dalam pembangunan ini memakan proses yang cukup lama sehingga diperlukan konsistensi dari pemimpin untuk menjaga komponen pembangunan sesuai dengan koridor perencanaan.

Berdasarkan kondisi yang ada di Desa Pujon Kidul, maka keberhasilan pengelolaan desa berdasarkan indikator *smart village* antara lain keberhasilan dalam :

- a. *Smart Institution*, yaitu pemerintah Desa Pujon Kidul memiliki inisiatif dan kemauan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di sekitar kawasan
- b. *Smart Infrastructure*, dimana pemerintah desa melalui BUMDes sebagai pengelola Desa Wisata Pujon Kidul menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan atraksi wisata dan meningkatkan jumlah wisatawan
- c. *Smart Societis*, dimana masyarakat dilibatkan secara aktif serta berpartisipasi dalam atraksi wisata

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. FISIP UI Press:Depok
- Aditya, T. 2009. Teori Pemberdayaan dan Advokasi. <http://id.teguh.web.id>
- Adji, M. M. 2011. Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal Perkotaan, Makalah pada Sosialisasi Pengembangan Ekonomi Lokal Perkotaan se-Provinsi Riau, Pekan Baru, 18 Juli 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI. <http://www.usdrp-indonesia.org.files/downloadContent> [diakses 5 Januari 2018]
- Agusta, Ivanovich dan Fujiartanto (ed.). 2014. Indeks Kemandirian Desa : Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia:Jakarta
- Albuquerque, Francisco. 2004. Local Economic Development and Decentralization in Latin America. Cepal Review 82:155-169
- Andi Asnudin. 2005. Manajemen Proyek Konstruksi. UNTAD Press: Palu
- Andriyani, Anak Agung Istri, Edhi Martono, Muhamad. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali). Jurnal Ketahanan Nasional Volume 23 No.1
- Arsyad, Lincoln et al. 2011. Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN:Yogyakarta
- Axinn, G.H. 1988. Guide on Alternative Extension Approaches. FAO:Rome
- Bierstedt, Robert. 1970.The Social Order. McGraw-Hill Kogakusha, Ltd.:Tokyo
- Bintarto, R. 1983. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia:Jakarta
- Blakely, Edward James. 1994. Planning Local Economic Development Theory and Practice. SAGE Publications, Inc.:California

- Budianta, Aziz. 2011. *Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Maghza Pustaka:Palu
- Budiman, P. W. et al. 2010. *Pelestarian Pola Permukiman Kampung Bontang Kuala Bontang*. *Arsitektur E-Journal* Vol. 3 No. 1.
- Chambers, Robert. 1932. *Pembangunan Desa : Mulai Dari Belakang*. LP3ES:Jakarta
- Conrad, J. M.1999. *Resource Economics*, Cambridge University Press, Cambridge
- Dardak, Emil Elestianto. 2009. *Pengembangan Pusat Kegiatan Pedesaan (Rural Town) sebagai Langkah Integrasi Kawasan Pedesaan dan Perkotaan menjadi Wilayah Fungsional*. *Bulletin Tata Ruang Online* Edisi Juli-Agustus 2009
- Daryanto, Arief. 2003. *Disparitas Pembangunan Perkotaan-Pedesaan di Indonesia*. *Tabloid Agrimedia* 8 (2)
- Daly, Herman. 1990. "Commentary: Toward some operational principles of sustainable development." *Ecological Economics* 2
- Departement for International Development (DFID). 1999. *Sustainable Livelihood Guidance Sheets*. DFID, London, UK.
- Dharmawan, Arya Hadi. *Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan, dan Ekologi Politik*. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Vol. 01. No. 01. April 2007.
- Dharmawan, A.H. 2006. *Pendekatan-pendekatan Pembangunan Pedesaan dan Pertanian:Klasik dan Kontemporer* Makalah disampaikan pada "Apresiasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Daerah bagi Tenaga Pemandu Teknologi Pendukung Prima Tani di Cisarua Bogor 19-25 November 2006
- Douglass, C. Michael. 1998. *A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkage: An Agenda for Policy Research with Reference to Indoesia*. *Third World Planning Review* 20 (1) : 1 -33



- Gurindawangsa, Saga Ardian, Topowijono, Supriono. 2017. Analisis Strategi Pengembangan Produk Agrowisata (Studi pada Desa Wisata Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Jawa Timur). Jurnal Adminisrasi Bisnis Vol. 51 No. 2
- Haris, (2000), Konsep Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, Tiga Aspek Pemahaman Ekonomi berkelanjutan.
- Harris, G and D. Vogel. 2004. E-Commerce for Community-based Tourism in Developing Countries. <http://rogharris.org/e-CBT.pdf> [30 Januari 2018].
- Hirschman, Albert O. 1960. The Strategy of Economic Development. Yale University Press:New Haven
- Hussen, A. M. 2000. Principles of Environmental Economics: Economics, Ecology, and Public Policy, Routledge. New York [ILO] International Lanor Organization.2010. Gender Mainstreaming in a Local Economic Development Strategies: A Guide. ILO Bureau for Gendel Equality:Geneva
- Iqbal, Muhammad dan Iwan Setiajie Anugrah. 2009. Rancang Bangun Sinergi Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah. Analisis Kebijakan Pertanian 7 (2):169-188
- Joseph, Carmel. 2002. Local Economic Development and Job Creation, Occasional Paper No.7, Friedrich Ebert Stiftung South Africa Office
- Kartasmita. G. 1995. Ekonomi Rakyat:Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES:Jakarta
- Khairuddin H.1992. Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan. Liberty:Yogyakarta
- Kartasmita, G. 1997. Pemberdayaan MasyarakatKonsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat. Makalah disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk.I Jawa Timur 14 Maret 1997 Surabaya
- Koestoer, Raldi H. 1997. Perspektif Lingkungan Desa-Kota, Teori dan Kasus. Penerbit Universitas Indonesia:Jakarta

- Komunitas Averroes. 2017. Kisah di Balik Suksesnya Desa Wisata Pujon Kidul.  
<https://www.kompasiana.com/avecom/5a0bb20d2599ec04e617da73/kisah-di-balik-suksesnya-desa-wisata-pujon-kidul?page=all#sectionall>
- Korten, D.C. dan Sjahrir (ed). 1993. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan.yayasan Obor Indonesia dan PustakaSinar Harapan:Jakarta
- Kusumastanto, T. 2003. Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Leibo, Jefta. 1995. Sosiologi Pedesaan. Andi Offset:Yogyakarta
- Lili, Marselina Ara. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak (tesis tidak dipublikasikan)
- Lowrey Nelson. 1977. Geografi Kota. Spring:Yogyakarta
- Mankiw N,Gregory. 2006. Makro Ekonomi, Terjemahan: Fitria Liza, Imam Nurmawan. Penerbit Erlangga:Jakarta
- Mardikanto, Totok. 2010. Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat. UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press):Surakarta
- Mardikanto, T dan T.A.H Purwaka. 2006. Untuk Menanggulangi Kaum Dhuafa. Pengembangan Badan Otorita UMKM
- Masoed. 1993. Ekonomi Politik Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Vol. 5 No.2
- Muhajir, Ahmad. 2017. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pelaksanaan Ketentuan Penataan Ruang di Kota Bau bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Renaissance Volume 2 No.02 Agustus 2017
- Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami, Baruna Setyaningrum, andEni Prasetyawati. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji. Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi 2(1):59-72.
- Muta'ali, Lutfi. 2016. Pengembangan Wilayah Pedesaan (perspektif Keruangan). Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPGF) Universitas Gajah Mada:Yogyakarta

- Nasoetion, Lutfi I. 1992. Beberapa Hasil Kajian Penerapan dan Metode Pengembangan Wilayah dalam Pembangunan di Indonesia. Makalah pada Pentaloka Management Area: Kanwil Departemen Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Pamuji, Kadar dkk. 2017. Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.4 Vol.24
- Parsons, T. 1951. The Social System. The Free Press: New York
- Pearce and Turner. 1995. Economics of Natural Resources and The Environment. Hemel Hemstead: Harvester Wheatsheaf
- Permanasari, I.K., 2011, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Dalam Usaha Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Candirejo, Magelang, Jawa Tengah), Tesis: Universitas Indonesia. (tidak dipublikasikan)
- Pitana, I Gede dan Gayatri, Putu G. 2005. Sosiologi Pariwisata. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Priyotamtomo W., 2001. Bahan Kuliah Sosiologi Pedesaan. Fakultas Pertanian UGM (tidak diterbitkan)
- Puspitaningrum, Eka. 2017. Modal Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor: Bogor
- Rogerson, Christian. 2009. Strategic Review of Local Economic Development in South Africa, Final Report Submitted to Minister Sicelo Shiceka, Supported by the Strengthening Local Governance Programme of GTZ
- Rondinelli, D. A. and K. Ruddle. 1978. Urbanization and Rural Development: a Spatial Policy for Equitable Growth, Praeger.
- Rustiadi, Ernani, Sunsun Saifulhakim dan Dyah R. Panuju. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- S. Wojowasito dan W.J.S Poerwodarminta. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta

- Sachs & Warner.1995.Natural Resource Abundance and Economic Growth.NBER Working Paper 5398
- Saragih, Jef Rudiantho. 2015. Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian. Pustaka Fajar:Yogyakarta
- Schutjer, Wayne A. 1991. Rural Development and Extension:Cooperative Extension. Journal of Extension 29 (1)
- Scott, James C. 1983. Moral Ekonomi Petani. LP3S. Jakarta
- Serageldin, Ismail. 1996. Sustainability and The Wealth of Nations:First Steps in an Ongoing Journey, Enviromentally Sustainable Development Studies and Monographs Series. The World Bank
- Soekanto, Soejono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar.PT Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1994. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali:Jakarta
- Soetarto, Endriatmo dan Martua Sihaloho. 2015. Pembangunan Masyarakat Desa. Universitas Terbuka:Tangerang Selatan
- Stiglitz, Joseph. 2000. Globalization and its Discontent. Penguin Books:London
- Subejo dan Supriyanto. 2004. Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, short paper pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Study on Rural Empowerment (SOREm)-Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM Tanggal 16 Mei 2004
- Suharto E. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial:Spektrum Pemikiran. Lembaga Studi Pembangunan-STKS:Bandung
- Sumodiningrat, G. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Edisi Kedua. Bina Rena Pariwisata:Jakarta
- Supriadi, Edy. 2007. Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal:Pragmatisme dalam Praktik Pendekatan PEL. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 18 (2):103-123
- Surya, Aldwin. 2006. Arus Penglaju dan Moda Angkutan Darat di Kota Metropolitan Indonesia. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau 1 (3) : 84-88

- Susanto,1993. Pengantar Pengolahan Hasil Pertanian.Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya:Malang Tarigan, Antonius. 2003. Rural-Urban Economic Linkage. Jurnal Forum Inovasi Capacity Building and Good Governance:Jakaarta
- Suseno, Dedy Aji dan St Sunarto. 2016. Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jurnal STIE Semarang Vol.8 No.2
- Taufiq, Amrullah. 2006. Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Tesis tidak dipublikasikan, Program MPKP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia:Depok
- Tietenberg,T. 2000. Environment and Natural Resources Economics, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts
- Todaro, Michael P. 1989. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga:Jakarta
- UN-HABITAT. 2009. Promoting Local Economic Development through Strategic Planning, The Local Economic Development Series, Volume 5 : Trainasers Guide, United Nations Human Settlements Programme
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2007. Prospek Pengembangan Desa. CV.Fokusmedia:Bandung
- Yulianti,Yayuk dan Mangku Purnomo. 2003. Sosiologi Pedesaan. Lappera Pustaka Utama: Yogyakarta

## INDEKS DAN GLOSARIUM

---

### A

accessibility analysis · 172  
Achieved-status · 44  
agroindustri · 46, 64  
agropolitan · 65, 73, 113, 115, 116, 147,  
177, 185, 187  
aksesibilitas · 8, 11, 12, 13, 15, 172  
aksi lokal · 63  
Alokasi Dana Desa · 58, 89, 90  
Ascribed-status · 44

---

### B

backwash effects · 72  
bottom-up planning · 3, 33, 75  
BPD · 40, 127, 128, 129  
BUUD · 40, 41

---

### C

community development · 106, 121  
Corporate Social Responsibility (CSR) ·  
191

---

### D

degradasi · 56, 111  
demografi · 1, 4, 168  
desa adat · 5, 18, 21, 32, 58  
Desa Adat · 5  
Desa Agropolitan · 147, 185  
Desa linier · 14  
Desa pantai · 14  
desa pesisir · 9, 145, 146, 147, 177, 181  
Desa terpusat · 14  
desa tertinggal · 13, 68  
desa wisata · 143, 144, 177, 179, 180,  
185, 188, 189, 190, 191

Desain Survey · 160  
desentralisasi · 21, 59, 73, 75, 139  
diferensiasi masyarakat · 46  
disinsentif · 113, 117  
diversifikasi · 54, 66, 67

---

### E

Ekonomi Lokal · 66, 71, 78, 79, 81, 83

---

### F

fragmentasi · 54

---

### G

Globalisasi · 61, 62  
Goals Objectives Achievement Matrices  
(GOAM) · 174

---

### H

hinterland · 12, 63, 74, 113, 147, 185

---

### I

insentif · 82, 113, 117, 140  
Interaksi sosial · 28, 78  
isu agraria · 146  
Isu ekonomi · 146  
isu geopolitik · 147

---

### K

Kearifan lokal · 141  
Keberlanjutan ekonomi · 135  
Keberlanjutan lingkungan · 135  
Keberlanjutan sosial · 135

kelembagaan · 1, 19, 51, 54, 57, 58, 59,  
64, 65, 70, 82, 94, 97, 107, 111, 127,  
139, 140, 142, 169, 189, 190, 191  
kerentanan · 55, 134  
ketahanan pangan · 56, 73, 112, 113,  
164  
klasifikasi desa · 7  
komoditas pertanian · 12, 55  
konflik sosial · 42, 43  
konsep pemberdayaan · 95, 103  
konservasi · 8, 9, 24, 57, 65, 73, 112,  
114, 137, 141, 142, 167, 183  
konversi lahan · 11, 56, 57, 63, 65  
KUD · 40, 41

---

## L

lapisan masyarakat · 42, 44, 104  
liberalisasi · 59, 62  
linkage analysis · 171  
LKMD · 39, 40  
LSM · 41, 104

---

## M

masyarakat tradisional · 6  
Matriks Perencanaan Proyek (MPP) ·  
36  
metode PRA · 149, 150  
Metode ZOPP · 34  
Mobilitas sosial · 27  
modal sosial · 66, 80, 179  
modernisasi · 41, 49, 105  
multiplier effect · 66  
musyawarah desa · 87, 125, 127, 129,  
130

---

## N

Natural capital · 134

---

## O

Otonomi Daerah · 59

---

## P

Participatory Learning and Action · 149  
Participatory Learning Methods · 149  
Participatory Rural Appraisal · 149  
partisipasi masyarakat · 34, 41, 57, 59,  
88, 105, 121, 179, 180  
partisipatif · 33, 34, 60, 61, 80, 83, 99,  
101, 111, 120, 122, 123, 127, 149, 152,  
154, 155, 156, 157  
patron-klien · 145  
pemanfaatan ruang · 13, 16, 24, 57, 74,  
114, 115, 116, 117, 118, 166, 170  
pembangunan pedesaan · 2, 3, 57, 58,  
60, 61, 62, 67, 68, 71, 73, 84, 86, 113,  
116, 164, 185  
Pembangunan Tradisional · 81  
pemberdayaan masyarakat · 34, 67, 71,  
73, 89, 92, 96, 102, 103, 104, 105, 107,  
108, 111, 112, 123, 126, 130, 151, 152,  
154  
Pendekatan Makro · 101  
Pendekatan Mezzo · 101  
Pendekatan Mikro · 100  
Pendekatan penghidupan  
berkelanjutan · 134  
Pengembangan ekonomi lokal · 78  
Perubahan Sosial · 49  
PKK · 40  
polarization effect · 72  
Prinsip berkelanjutan · 140  
public capital · 87  
pulau-pulau kecil · 10, 147

---

## R

Relativitas · 96  
resilience · 138  
Revolusi Hijau · 41  
RKP Desa · 122, 124, 125, 128, 130, 131,  
132  
RPJM Desa · 122, 124, 125, 126, 127,  
128, 129, 130, 132

---

## S

settlement analysis · 172  
Smart Infrastructure · 175, 180, 184, 192  
Smart Institution · 175, 180, 184, 192  
Smart Service Delivery · 175, 184  
Smart Societis · 175, 181, 192  
Smart Technology and Innovation · 175, 184  
Smart Village · 175, 176  
Solidaritas sosial · 28  
sosiologi pedesaan · 38  
spread effects · 72  
strategi pemberdayaan · 100, 105, 106, 107, 108  
Stratifikasi sosial · 27, 29, 41, 42  
sumber daya lokal · 79, 80, 83, 85  
sustainable livelihood approach · 134, 138  
Swadaya · 19, 20, 41

---

## T

The Cluster Village · 15  
The Line Village · 15  
The Scattered Farmstead · 15  
tipologi desa · 7, 16, 19  
Transformasi · 63  
trickling-down effect · 72

---

## U

urban · 4, 11, 12, 25, 38, 70, 76  
Urban bias · 76  
Urbanisasi · 49, 62, 73

---

## Z

zonasi · 116, 118